



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 74 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN
SUMBAWA TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa perubahan rencana strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 merupakan perubahan rencana pembangunan lima tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rencana strategis perangkat daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan/atau kegiatan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah berkenaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 74 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2031;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 571);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 686);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 697) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 712);
26. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 64 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 64 Tahun 2020 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 74 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021-2026.

Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 74 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 74), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa
pada tanggal 12 April 2023

BUPATI SUMBAWA,



MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa
pada tanggal 12 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,



HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2023 NOMOR 17

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR
74 TENTANG RENCANA STRATEGIS
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN
SUMBAWA TAHUN 2021-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa dan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 64 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa).

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa merupakan sub sistem dari sistem pembangunan jangka menengah daerah, sehingga untuk menjaga konsistensi pelaksanaan pembangunan Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa, penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa berpedoman kepada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021- 2026.

Memperhatikan Renstra kementerian/lembaga dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dengan menyelaraskan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional. Selain itu, keterkaitan antara Renstra PD dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat dengan keberadaan Renstra PD yang telah ditetapkan dijadikan pedoman bagi penyiapan Renja Dinas Perhubungan

Kabupaten Sumbawa selama periode perencanaannya, yang dalam penyusunannya juga mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sumbawa. Selanjutnya, dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, keberadaan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa akan menjadi pedoman bagi penyusunan rancangan RKA Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa yang dalam kaitan ini pula substansi RKA tersebut akan tercermin pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Renstra PD ini dilaksanakan berdasarkan dan/atau memperhatikan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- 7) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa;
- 8) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- 9) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

-
- Kinerja, Pelaporan Kerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - 12) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - 16) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 17) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 18) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
 - 19) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional;

- 20) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;
- 21) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 22) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2031;
- 23) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2005-2025;
- 24) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 25) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026;
- 26) Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 64 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 64 Tahun 2020 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa 2021-2026 dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pelaksanaan program dan rencana kerja (rencana kegiatan) dalam kurun waktu 5 tahun (2021-2026). Dengan demikian Rencana Strategis ini akan menjadi landasan penyusunan semua dokumen operasional perencanaan pembangunan urusan wajib bidang Perhubungan di Kabupaten Sumbawa. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis ini adalah:

- 1) Memberikan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dibidang perhubungan di Kabupaten Sumbawa.
- 2) Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2021-2026.
- 3) Sebagai dokumen pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan, dan pengendali pelaksanaan anggaran tahunan.
- 4) Menyajikan ukuran kinerja yang harus dicapai sebagai dasar pengukuran kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUMBAWA

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa
- 2.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUMBAWA

-
- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas & Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa
 - 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati
 - 3.3 Telaahan Renstra Renstra K/L dan Perangkat Daerah Provinsi terkait
 - 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

- 6.1 Rencana Program dan Kegiatan

- 6.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

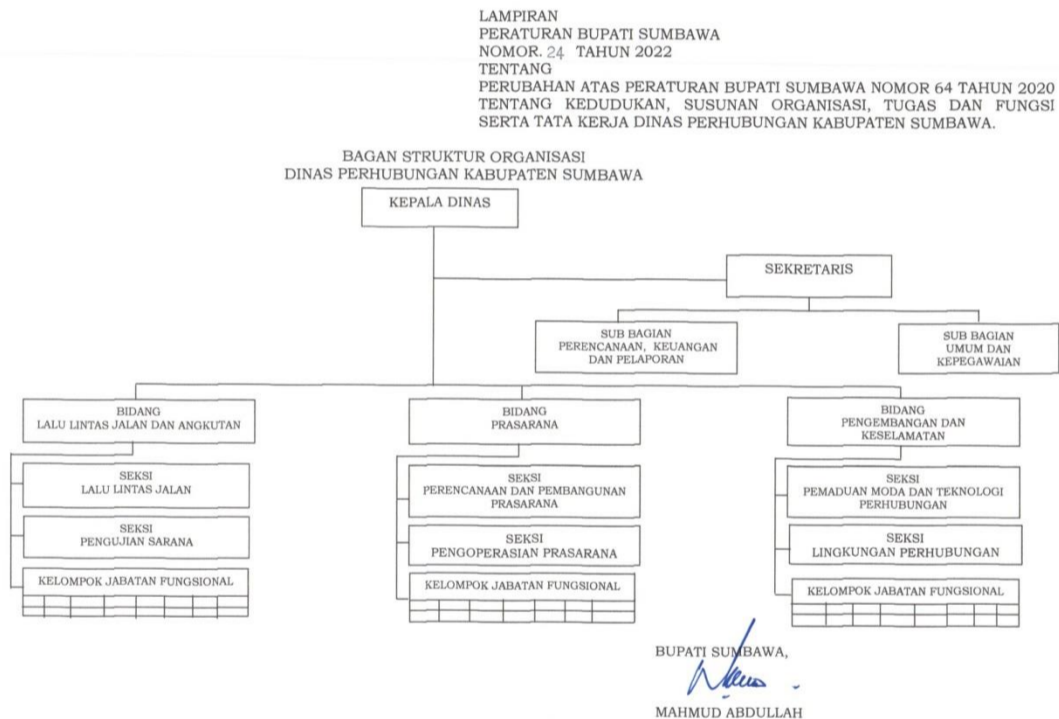
BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa

Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Tugas dan fungsi yang diselenggarakan adalah membantu Bupati Sumbawa melaksanakan kewenangan otonomi daerah bidang perhubungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 24 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 64 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa.



Rincian Tugas dan Fungsi

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
1	Kepala Dinas	membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang perhubungan dan tugas pembantuan yang diberikan kepala Daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan; b. pelaksanaan administrasi/penatausahaan Dinas; c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan; dan

			d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2	Sekretaris Dinas	Menyelenggarakan penyusunan perencanaan dan pelaporan, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian	<ul style="list-style-type: none"> a. penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan pelaporan; b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian; c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat; d. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan; e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3	Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan	Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang bina transportasi	<ul style="list-style-type: none"> a. penyusunan bahan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang lalu lintas jalan, angkutan dan pengujian sarana; b. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas jalan, angkutan dan pengujian sarana; dan c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4	Kepala Bidang Prasarana	merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pembangunan prasarana, pengoperasian prasarana dan perawatan prasarana	<ul style="list-style-type: none"> a. penyusunan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pembangunan prasarana, pengoperasian prasarana dan perawatan prasarana; b. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang perencanaan dan pembangunan prasarana,

			<p>pengoperasian prasarana dan perawatan prasarana; dan</p> <p>C. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>
5	Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pepaduan moda dan teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan	<p>a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pepaduan moda dan teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan;</p> <p>b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pepaduan moda dan teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan;</p> <p>c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pepaduan moda dan teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan; dan</p> <p>d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>

2.2. Sumber Daya Dinas Perhubungan

1) Sumber Daya Manusia

Sumber daya Manusia pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa menurut pangkat/golongan dan tingkat pendidikan kondisi tahun 2021 disajikan pada tabel data berikut ini :

a. Data SDM Berdasarkan Pangkat/Golongan

No	Golongan	Pegawai Struktural (org)	Pegawai Fungsional (org)	Staf (orang)	Jumlah
1	I/a	-	-	-	-
	b	-	-	-	-
	c	-	-	-	-
	d	-	-	-	-
2	II/a	-	-	-	-
	B	-	-	1	1
	C	-	-	3	3
	D	-	-	9	9
3	III/a	-	-	4	4
	b	1	-	4	5
	C	1	1	2	4
	D	12	-	1	13
4	IV/a	1	-	-	1

No	Golongan	Pegawai Struktural (org)	Pegawai Fungsional (org)	Staf (orang)	Jumlah
	B	1	-	-	1
	C	1	-	-	1
5	PTT			73	73
	Jumlah	17	1	97	115

b. Data SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan Formal	Struktural (org)	Pegawai Fungsional (org)	Staf (org)	Jumlah (org)
1	S1	11	-	32	43
2	S2	2	-	-	2
3	D3	1	-	10	11
4	D1	-	-	1	1
5	SLTA	3	1	54	58
6	SLTP	-	-	-	-
7	SD	-	-	-	-
		17	1	97	115

Dari tabel data tersebut terlihat bahwa sumber daya manusia di Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan kuantitas cukup memadai di bidangnya. Disamping itu, untuk menunjang pelaksanaan tugas dan kegiatan lainnya dimanfaatkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebanyak 84 orang.

Berdasarkan jumlah SDM yang ada, terkait dengan pelaksanaan tugas yang memerlukan keahlian spesifik di bidang perhubungan, beberapa pegawai Dinas Perhubungan Kab. Sumbawa telah melaksanakan pendidikan dan pelatihan baik formal maupun non formal, diantaranya pelatihan pengujian kendaraan bermotor.

2) Aset/Modal

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Barang Milik Daerah yang lebih teknis diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa telah melakukan pencatatan barang milik daerah yang dikelola atau berada di Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa disesuaikan dengan sebaran terhadap pemanfaatan asset/modal tersebut sebagaimana dimuat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB). Berikut disajikan data asset/modal pada Dinas

Perhubungan Kabupaten Sumbawa berdasarkan jenis asset sesuai data KIB Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa s.d.Tahun 2021, sebagai berikut:

- (1) Asset Tanah
- (2) Asset Mesin dan Peralatan
- (3) Asset Gedung dan Bangunan
- (4) Asset Jalan, Irigasi dan Jaringan
- (5) Asset Tetap Lainnya
- (6) Asset Konstruksi dalam Pengerjaan
- (7) Asset Lainnya



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) A
TANAH

Provinsi : PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
 Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
 Bidang : Bidang Perhubungan
 Unit Organisasi : Dinas Perhubungan
 Sub Unit Organisasi : Dinas Perhubungan
 U P B : Dinas Perhubungan
 NO. KODE LOKASI : 12.15.06.06.01.01.01

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor		Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
		Kode Barang 1.3.	Regis-ter				Hak	Tanggal	Sertifikat Nomor				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Tanah Bangunan Terminal Darat	01.01.01.02.007	000001	3.037,00	2012	Terminal Bugis	Hak Pakai	11/12/1993	20	Terminal	Pembelian	835.175,00	Tanah Terminal Bugis
2	Tanah Bangunan Terminal Darat	01.01.01.02.007	000002	1.650,00	2012	Labuhan Badas	Hak Pakai	11/12/1993	14	Terminal	Pembelian	483.450,00	Tanah Terminal Labuhan Badas
3	Tanah Bangunan Terminal Darat	01.01.01.02.007	000003	10.000,00	2012	Tanah Terminal Utan	Hak Pakai	11/13/2003	09	Terminal	Pembelian	360.000,00	Tanah Terminal Utan
4	Tanah Bangunan Terminal Darat	01.01.01.02.007	000005	3.566,00	1994	Brang Bara	Hak Pakai	11/12/1993	34	Terminal	Pembelian	394.350,00	Tanah Terminal Brang Bara
5	Tanah Bangunan Terminal Darat	01.01.01.02.007	000006	3.174,00	1994	Empang	Hak Pakai	3/31/1994	04	Terminal	Pembelian	399.924,00	Tanah Bangunan Terminal Empang
6	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.01.04.001	000001	105.870,00	1995	Jl. Garuda KM. 6 Kecamatan Labuhan Badas	Hak Pakai	5/4/1995	7	Gedung Kantor	Pembelian	338.000,00	Tanah eks BB Uma Gedung Karang Dima
Jumlah Harga												2.810.899,00	

MENGETAHUI
Kepala Dinas Perhubungan

Sumbawa Besar, 1 Januari 2021
Pengurus Barang

Drs. Abdul Aziz, M.Si
NIP. 19651102.199803.1.003

Erny Suhardiningrum, S.I.P
NIP. 19810122.200604.2.009



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B
PERALATAN DAN MESIN

Provinsi : PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
Bidang : Bidang Perhubungan
Unit Organisasi : Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : Dinas Perhubungan
U P B : Dinas Perhubungan
NO. KODE LOKASI : 12.15.06.06.01.01.01

No.	Kode Barang 1.3.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk / Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pembelian	Nomor				Kondisi Barang (B/KB/RB)	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	02.01.01.05.003	Dump Truck	000001	Mitsubishi Truck		Fiber & Besi	2010		MHMF74F5AK029765	4D34T-F41685	EA 9091 AA	H-03394167	Pembelian	411.400,00	Truk Angkutan Perintis Diperuntukkan Untuk Kecamatan
2	02.02.01.01.003	Station Wagon	000001	Toyota / Kijang		Besi	1996		MHCTBR54 F3 249057	E.249057	EA 1132 AA	5578988	Pembelian	43.940,00	Barang Hilang dan Tidak Diketahui Keberadaannya
3	02.02.01.01.003	Station Wagon	000002	Isuzu / Panther		Besi	2003		MHCTBR54 F3 249057	E.249057	EA 1132 AA	5578988	Pembelian	180.000,00	Ex Dinas Perhubungan
4	02.02.01.01.003	Station Wagon	000003	Daihatsu Great New Xenia / X MT 1,3 STD VIN 201R		Fiber	2019		MHKV5EALJK051624	1NRG002560	EA 1232 AA		Pembelian	198.091,25	Mutasi dari Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor : 024/199.a/Ummu-Setda -2019
5	02.02.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	000001	Cerry / KF		Besi	1994		MHCTBR54F6K281149	E281149	EA 41 A	E.1510968.0	Pembelian	42.000,00	Barang hilang dan tidak diketahui keberadaannya
6	02.02.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	000002	Isuzu / TBR541 M	2499	Besi, Fiber, Plastik	2016		MHCTBR54F6K281135	E281135	EA 33 AA		Pembelian	90.000,00	Barang berada di UPT PKB
7	02.02.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	000003	ISUZU NEW PANTHER TBR 541 LM			2006		MHF31KFS0100112137	7K-0431918	EA 9105 AA	C.7561820	Pembelian	180.000,00	Ex Dinas Perhubungan
8	02.02.01.03.002	Pick Up	000001	Toyota / Kijang Pick Isuzu Panther		Besi	2001		MMBENK B70 9D 037502	4MHOUB5436	EA 9096 AA	F-8831941	Pembelian	80.000,00	Kendaraan perintis untuk Kecamatan Tarano
9	02.02.01.03.002	Pick Up	000002			Besi	2009						Pembelian	276.848,00	

No.	Kode Barang 1.3.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pembelian	Nomor					Kondisi Barang (B/KB/RB)	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
10	02.02.01.03.002	Pick Up	000003	Isuzu Panther /	2835	Besi	2009		MMBENK B70 9D 038746	UAB 5436	EA 9101 AA	F.8831945.0	RB	Pembelian	276.848,00	Kendaraan Perintis untuk Kecamatan Alas
11	02.02.01.03.002	Pick Up	000004	Isuzu Panther		Besi	2009		MMBENK B70 9D 038641	UAB 5468	EA 9099 AA	F-8831944	RB	Pembelian	276.848,00	Kendaraan perintis untuk Kecamatan Orong Telu
12	02.02.01.03.002	Pick Up	000006	Isuzu Panther		Besi	2009		MMBENK B70 9D 038723	UAB 5673	EA 9095 AA	F-8831940	RB	Pembelian	276.848,00	Mobil Angkutan Perintis Untuk Kecamatan Batu Lanteh
13	02.02.01.03.002	Pick Up	000007	Isuzu Panther		Besi	2009		MMBENK B70 9D 036974	UAB 5392	EA 9097 AA	F-8831942	RB	Pembelian	276.848,00	Mobil Angkutan Perintis Untuk Kecamatan Batu Lanteh
14	02.02.01.03.002	Pick Up	000008	Mitsubishi Strada		Fiber & Besi	2010		MMBENKB70AD023 213	4M4OUAB8480	EA 9092 AA	H-03394168	RB	Pembelian	369.875,00	Mobil Angkutan Perintis Untuk Kecamatan
15	02.02.01.03.002	Pick Up	000010	Isuzu Panther		Besi	2011		MHCTBR54BBK158 950	E158950	DR 1129 XX		Pembelian	148.000,00	Angkutan Darat Bermotor Roda 4	
16	02.02.01.03.002	Pick Up	000011	Isuzu		Besi	2011		MPATFS85HBT1073 15	JE7170	DR 9010 KX		RB	Pembelian	305.750,00	Mobil Angkutan Perintis Untuk Kecamatan
17	02.02.01.03.002	Pick Up	000012	Isuzu		Besi	2011		MPATFS85HBT1073 16	JE7171	DR 1043 AX		RB	Pembelian	305.750,00	Mobil Angkutan Perintis Untuk Kecamatan
18	02.02.01.03.002	Pick Up	000013	Isuzu		Besi	2011		MPATFS85HBT1073 17	JE7166	DR 1216 XX		RB	Pembelian	305.750,00	Mobil Angkutan Perintis Untuk Kecamatan
19	02.02.01.03.002	Pick Up	000014	Isuzu / NKR71HD E2	4570	Besi	2012		MHCNK71LYCJ0405 32	B040532	EA 8661 A	J-04243314	Pembelian	1.342.442,20	Mobil Angkutan Perintis Untuk Kecamatan	
20	02.02.01.03.002	Pick Up	000015	Hilux		Metal	2008		MR0AW126980012 468	ITR FE	EA 8070 AA		Pembelian	139.380,00	Mutasi Dari DPPK Dan Barang Berada Di Operasional Darat	
21	02.02.01.03.003	Yeengler/Trailer	000001	Kawasaki / LX150F	150		2017		MH4LX150FHJP528 60	LX150CEW73019	EA 4672 AA		Pembelian	39.528,00		
22	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000001 s/d 000004	Suzuki / A.100		Besi	1980						RB	Pembelian	8.800,00	Barang hilang dan tidak diketahui keberadaannya
23	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000005	Yamaha / L2		Besi	1980						RB	Pembelian	550,00	Ex Kantor Informasi & Komunikasi
24	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000006	Honda / Win / NF 100		Besi	1993						RB	Pembelian	6.500,00	Barang hilang dan tidak diketahui keberadaannya
25	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000007	Honda / Win		Besi	1994						RB	Pembelian	3.500,00	Barang hilang dan tidak diketahui keberadaannya

No.	Kode Barang 1.3.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pembelian	Nomor					Kondisi Barang (B/KB/RB)	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
26	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000008	Yamaha / YT	115	Besi	1998						RB	Pembelian	3.250,00	Barang hilang dan tidak diketahui keberadaannya
27	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000009	Yamaha / YT	115	Besi	1998						RB	Pembelian	3.200,00	Di Kantor Kecamatan Ropang
28	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000012	Honda / Bebek		Besi	2001						RB	Pembelian	3.800,00	Barang hilang dan tidak diketahui keberadaannya
29	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000013	Honda/Win / NF 100		Besi	2003		MH1HABD163K0022403	ABDE-10021	EA 3210 AA	C73035330	RB	Pembelian	8.500,00	Barang hilang dan tidak diketahui keberadaannya
30	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000014	Honda/Win / NF 100		Besi	2003						RB	Pembelian	8.500,00	Barang hilang dan tidak diketahui keberadaannya
31	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000015	Honda Supra X 125 D	125 CC	Besi	2010		MH1JB8110AK501619	JB81E-1496972	EA 4000 A	H-00880501		Pembelian	14.000,00	Dropping Dari DPKA Ke Dishubkominfo
32	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000016	Honda / NF 125 TD	125 CC	Besi	2012		MH1JB8116CK785986	JB81E-1780779	EA 4176 AA			Pembelian	14.662,50	Dropping Dari Bagian Aset Setda Kab. Sumbawa
33	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000017	Suzuki EN 125 A		Fiber	2006		MH8EN125A9J-606574	F.405-ID-606632	EA 3843 AA			Pembelian	15.232,00	Mutasi Dari Kepala Desa Boal Kecamatan Empang
34	02.02.03.01.006	Kapal Motor	000001	Kapal Angkutan Perintis GT		Besi & Kayu	2009						RB	Pembelian	150.675,00	Kapal Angkutan Perintis
35	02.02.03.01.006	Kapal Motor	000002	Kapal Angkutan Perintis GT 17 6		Besi & Kayu	2009						RB	Pembelian	122.000,00	Kapal Angkutan Perintis
36	02.03.01.01.002	Mesin Frais	000001	LPE 320		Besi	2007							Pembelian	750,00	Ex Dinas Perhubungan
37	02.03.01.03.033	perkakas bengkel listrik lainnya (dst)	000001	-			2007							Pembelian	3.000,00	Ex Dinas Perhubungan
38	02.03.01.03.033	perkakas bengkel listrik lainnya (dst)	000002 s/d 000011	-		Besi	2010							Pembelian	1.650,00	Dinas Perhubungan Komunikasi & Informatika
39	02.03.01.09.012	Trafo Stater	000001	-		Fiber	2009							Pembelian	1.000,00	Dinas Perhubungan Komunikasi & Informatika
40	02.03.02.03.004	perkakas bengkel service lainnya (dst)	000001 s/d 000002	Takuba		Besi	2007							Pembelian	16.000,00	Ex Dinas Perhubungan
41	02.03.02.05.004	Kunci Pipa	000001 s/d 000002	-		Fiber	2007							Pembelian	100,00	Ex Dinas Perhubungan
42	02.03.02.06.002	Kunci Khusus Alat Besar Darat	000001	-		Besi	2011							Pembelian	1.750,00	Slak Letter
43	02.03.02.08.013	Kunci Pas	000001 s/d 000003	-		Besi	2007							Pembelian	425,00	Ex Dinas Perhubungan
44	02.03.03.01.072	Global Positioning System	000002	Garmin		Fiber	2013							Pembelian	6.000,00	Dinas Perhubungan Komunikasi & Informatika
45	02.03.03.09.018	alat ukur lain-lain lainnya (dst)	000001	Luica Desto		Besi	2007							Pembelian	18.000,00	Barang Berada Di UPT PKB

No.	Kode Barang 1.3.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pembelian	Nomor					Kondisi Barang (B/KB/RB)	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
46	02.03.03.10.037	alat timbangan/biara lainnya (dst)	000001	-		Besi	2007						Pembelian	35.000,00	Ex Dinas Perhubungan	
47	02.03.03.16.005	Smoke Tester	000001	Cosber		Besi	2020						Pembelian	157.278,00	Pengadaan Smoke Tester + Honor Pengadaan Barang Jasa	
48	02.04.01.04.004	Rak-Rak Penyimpan	000003 s/d 000004	-		Kayu	2004						Pembelian	640,00	Ex Dinas Perhubungan	
49	02.05.01.01.001	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	000017	Brother		Besi	2003						Pembelian	784,00	Ex Dinas Perhubungan	
50	02.05.01.01.001	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	000024	Brother / 11-13 Inchi		Besi	2011						Pembelian	1.200,00	Di Pelabuhan Alas	
51	02.05.01.04.004	Rak Kayu	000001 s/d 000002	-		Kayu	2002						Pembelian	614,00	Ex Dinas Perhubungan	
52	02.05.01.04.004	Rak Kayu	000003 s/d 000006	-		Kayu	2004						Pembelian	1.120,00	Ex Dinas Perhubungan	
53	02.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	000005	Brother		Besi	2002						Pembelian	691,00	Ex Dinas Perhubungan	
54	02.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	000007 s/d 000013	Brother		Besi	2003						Pembelian	1.692,00	Ex Kantor Pengolahan Data Elektronik (PDE)	
55	02.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	000023	Brother		Besi	2003						Pembelian	282,00	Ex Kantor Pengolahan Data Elektronik (PDE)	
56	02.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	000027	Brother		besi	2007						Pembelian	1.150,00	Ex dinas perhubungan	
57	02.05.01.04.007	Brandkas	000009	Nasional		Besi	2004						Pembelian	3.600,00	Ex Dinas Perhubungan	
58	02.05.01.04.007	Brandkas	000010	Ichiban		Besi	2004						Pembelian	3.600,00	Ex Dinas Perhubungan	
59	02.05.01.05.005	White Board	000002	-		Triplek	2004						Pembelian	160,00	Barang Berada Diruang Server Lantai 3 Kantor Bupati Sumbawa	
60	02.05.01.05.005	White Board	000003	Mitsubishi		Triplek	2007						Pembelian	375,00	Ex Dinas Perhubungan	
61	02.05.01.05.012	Mesin Absensi	000001	Fingerspot		Fiber	2013						Pembelian	4.500,00	Dinas Perhubungan Komunikasi & Informatika	
62	02.05.01.05.039	Mesin Laminating	000001	LFT-320		Fiber	2006						Pembelian	1.498,00	Ex Dinas Perhubungan	
63	02.05.01.05.053	Focusing Screen/Layar LCD Projector	000001	G Lite Tripod / 70' x 70'	Besar	Kain Dan Besi	2015					EKSTRA	Pembelian	960,00	Barang Berada Di Kepegawaian	
64	02.05.01.05.077	Papan Pengumuman	000001 s/d 000020	-		Besi	2011						Pembelian	7.800,00	Papan Nama Jalan	
65	02.05.01.05.077	Papan Pengumuman	000021	-		Besi dan Kaca	2016						Pembelian	1.134,00	Dishubkominfo Kab. Sumbawa	
66	02.05.01.05.088	Alat Kantor Lainnya	000001	-		Aluminium Dan Kaca	2016						Pembelian	1.000,00	Dishubkominfo Kab. Sumbawa	

No.	Kode Barang 1.3.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pembelian	Nomor					Kondisi Barang (B/KB/RB)	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
67	02.05.02.01.017	Meja Panjang	000002 s/d 000003	-		Kayu	2004								Ex Dinas Perhubungan	
68	02.05.02.01.030	Kursi Rapat	000026 s/d 000055	Fortuner / FN Hitam		Besi	2012								Dinas Perhubungan Komunikasi & Informatika	
69	02.05.02.01.030	Kursi Rapat	000056 s/d 000100	Napolly		Plastik	2014						EKSTRA		Barang berada di aula	
70	02.05.02.01.030	Kursi Rapat	000101 s/d 000140	Chitose		Besi	2019						EKSTRA		Barang berada di aula Dinas Perhubungan	
71	02.05.02.01.030	Kursi Rapat	000102 s/d 000107	Chitose		Besi	2019						EKSTRA		Barang berada di aula Dinas Perhubungan	
72	02.05.02.01.031	Kursi Tamu	000001	-		Besi & Kain	2002								Barang Berada Di Ruang Sekretaris	
73	02.05.02.01.031	Kursi Tamu	000007	-		Besi & Kain	2004								Barang Berada Di UPT PKB	
74	02.05.02.01.031	Kursi Tamu	000008	-		Kain & Kayu	2007								Ex Kantor Informasi & Komunikasi	
75	02.05.02.01.032	Kursi Putar	000001	Canon			2003								Ex Kantor Pengolahan Data Elektronik (PDE)	
76	02.05.02.01.032	Kursi Putar	000003	Isebel		Besi dan kain	2005								Ex Kantor informasi dan komunikasi	
77	02.05.02.01.036	Kursi Lipat	000076	Olimpic		Besi	2008								Barang hilang dan tidak diketahui keberadaannya	
78	02.05.02.01.039	Meja Komputer	000027 s/d 000028	-		Serbuk Kayu	2007								Barang Berada Di Ruang Server Lantai 3 Kantor Bupati Sumbawa	
79	02.05.02.01.039	Meja Komputer	000030 s/d 000032	-		Kayu	2007								Ex Kantor Pengolahan Data Elektronik (PDE)	
80	02.05.02.04.003	A.C. Window	000009	Nasional		Fiber	2003								Ex Kantor Pengolahan Data Elektronik (PDE)	
81	02.05.02.04.003	A.C. Window	000010	Uchida		Fiber	2004						RB		Ex Dinas Perhubungan	
82	02.05.02.04.003	A.C. Window	000011	Panasonic		Fiber	2004						RB		Barang Berada Di Ruang Keuangan	
83	02.05.02.04.003	A.C. Window	000014	Uchida		Fiber	2007								Ex Kantor Informasi & Komunikasi	
84	02.05.02.04.003	A.C. Window	000016	Sharp	1 PK	Fiber	2011								UPTD RPD	
85	02.05.02.04.003	A.C. Window	000017	Sharp		Fiber	2014								Pengadaan Pengatur Suhu Ruang	

No.	Kode Barang 1.3.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pembelian	Nomor					Kondisi Barang (B/KB/RB)	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
109	02.05.03.03.006	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	000008 s/d 000009	Isable		Kain dan besi	2014						Pembelian	3.600,00	Pengadaan Kursi Kerja	
110	02.05.03.03.008	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	000106	Isebel		Kain	2007						Pembelian	600,00	Ex Kantor Pengolahan Data Elektronik (PDE)	
111	02.05.03.03.008	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	000115 s/d 000118	Polaris		Kain & Besi	2013						Pembelian	1.200,00	Dinas Perhubungan Komunikasi & Informatika	
112	02.05.03.07.005	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon III	000001 s/d 000002	-		Kayu	2001						Pembelian	1.805,00	Ex Kantor Informasi & Komunikasi	
113	02.05.03.07.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	000016	-		Kayu & Kaca	2011						Pembelian	1.997,00	Dinas Perhubungan Komunikasi & Informatika	
114	02.05.03.07.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	000017	Sucitra		Kayu & Kaca	2013						Pembelian	1.750,00	UPTD RPD	
115	02.05.03.07.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	000018 s/d 000020	-		Aluminium & Kaca	2013						Pembelian	10.350,00	Dinas Perhubungan Komunikasi & Informatika	
116	02.05.03.07.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	000024 s/d 000025	Emporium	Sedang	Besi Dan Kaca	2019						Pembelian	6.300,00	Barang Berada Di Ruang Sarana dan Ruang Keuangan	
117	02.06.01.02.003	Camera Electronic	000002	Canon DSC H300 / DSC H300		Fiber	2016						Pembelian	5.900,00	Barang berada di Bidang Operasional Dishubkominfo	
118	02.06.01.02.105	Layar Film/Projector	000002	LG / 2000 ANSI		Fiber	2011						Pembelian	7.500,00	Dinas Perhubungan Komunikasi & Informatika	
119	02.06.01.05.022	Rambu/Bak Ukur	000001 s/d 000004	-		Besi	2011						Pembelian	13.728,00	Pengadaan Rambu Pendahuluan Petunjuk Jurusan (RPPJ)	
120	02.06.01.05.022	Rambu/Bak Ukur	000005 s/d 000102	-		Besi	2011						Pembelian	66.640,00	Rambu-rambu Lalu Lintas	
121	02.06.02.01.003	Pesawat Telephone	000011	Favorite		Plastik	2004						Pembelian	280,00	Barang Berada Di Ruang Kepala Dinas	

No.	Kode Barang 1.3.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk / Type	Ukuran / CC	Bahan	Tahun Pembelian	Nomor					Kondisi Barang (B/KB/RB)	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
122	02.06.02.01.003	Pesawat Telephone	000012	Panasonic		Plastik	2006						Pembelian	291,00	Ex Kantor Informasi & Komunikasi	
123	02.06.02.01.006	Handy Talky (HT)	000007 s/d 000010	Welerwel		Fiber	2013						Pembelian	14.000,00	Dinas Perhubungan Komunikasi & Informatika	
124	02.06.02.01.010	Facsimile	000003	HP		Fiber	2011						Pembelian	1.000,00	Dinas Perhubungan Komunikasi & Informatika	
125	02.06.02.03.005	alat komunikasi radio hf/fm lainnya (dst)	000001	-			2013						Pembelian	180.559,50	UPTD RPD	
126	02.06.03.03.001	Unit Pemancar VHF/FM Portable	000001	-	3000 W		2009						Pembelian	5.000,00	Dinas Perhubungan Komunikasi & Informatika	
127	02.06.03.03.004	peralatan pemancar vhf/fm lainnya (dst)	000001	-	1000 W		2008						Pembelian	95.001,50	Ex Dinas Perhubungan	
128	02.06.03.10.006	peeralatan antena shf/parabola lainnya (dst)	000001	Winner Set		Fiber	2004						Pembelian	6.000,00	Barang Berada Di RPD Setda Kab. Sumbawa	
129	02.07.02.01.003	Audio/Vidio Communication	000001	Vitron		Fiber	2004						Pembelian	680,00	Barang Berada Di RPD Setda Kab. Sumbawa	
130	02.08.01.08.063	alat laboratorium mekanika tanah dan batuan lainnya (dst)	000001	12 Canel			2009						Pembelian	5.000,00	Dinas Perhubungan Komunikasi & Informatika	
131	02.08.01.14.024	Rotator	000001 s/d 000010	-		Plastik	2011						Pembelian	1.200,00	Kasi Operasional & Pengamanan LLAJ	
132	02.08.01.41.062	Distiling Apparatus	000002	LG / 14 Inci	Besar	Fiber	2015						Pembelian	5.000,00	Barang Berada Di UPT PKB	
133	02.08.03.03.033	alat peraga praktek sekolah bidang studi : ipa dasar lainnya (dst)	000001 s/d 000050	Halex 7/8			2010						Pembelian	4.900,00	Kabel Antena	
134	02.08.03.04.025	Thermometer Badan	000001 s/d 000005	CEM		Fiber	2020						Pembelian	11.000,00	Barang Pengadaan Covid-19 dan barang berada di Kasubbag perencanaan keuangan dan pelaporan (3 buah), Kasi Lalu Lintas Jalan 1 buah) dan Bendahara pengeluaran (1 buah)	
135	02.10.01.02.001	P.C Unit	000019 s/d 000020	ACER		Fiber	2011						Pembelian	10.000,00	Dinas Perhubungan Komunikasi & Informatika	
136	02.10.01.02.001	P.C Unit	000049 s/d 000050	HP		Campuran	2017						Pembelian	13.000,00		
137	02.10.01.02.002	Lap Top	000004	Dell / 14 Inci	Besar	Fiber	2015						Pembelian	14.000,00	Barang Dipegang Oleh Kasubbag Program	

No.	Kode Barang 1.3.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pembelian	Nomor					Kondisi Barang (B/KB/RB)	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
138	02.10.01.02.002	Lap Top	000006 s/d 000007	Lenovo	17 inci	Fiber	2017						Pembelian	16.000,00	Barang diBagian Bidang sarana darat Dan Bagian Kepegawaian Dishub	
139	02.10.01.02.002	Lap Top	000008	Dell	17 Inchi	Fiber	2017						Pembelian	16.000,00	Barang berada di Kasubbag Perencanaan, Keuangan Dan Pelaporan	
140	02.10.01.02.002	Lap Top	000010	Dell / 14 Inchi	Sedang	Fiber	2017						Pembelian	17.150,00	Barang Berada Di Kasubbag Perencanaan, Keuangan Dan Pelaporan Dinas Perhubungan	
141	02.10.01.02.002	Lap Top	000011	Lenovo	17 Inchi	Fiber	2019						Pembelian	10.000,00	Barang Berada Di PKB (Pengujian Sarana)	
142	02.10.01.02.002	Lap Top	000012 s/d 000013	Lenovo	14 inci	Fiber	2020						Pembelian	18.000,00	Laptop untuk Bendahara Penerimaan dan untuk Forum LLAJ	
143	02.10.01.02.003	Note Book	000005	ACER		Fiber	2011						RB	Pembelian	5.000,00	Dinas Perhubungan Komunikasi & Informatika
144	02.10.01.02.003	Note Book	000006	ASUS		Fiber	2011						RB	Pembelian	5.000,00	Dinas Perhubungan Komunikasi & Informatika
145	02.10.01.02.003	Note Book	000007	Toshiba		Fiber	2013						RB	Pembelian	6.750,00	Dinas Perhubungan Komunikasi & Informatika
145	02.10.01.02.003	Note Book	000008	Toshiba		Fiber	2013						RB	Pembelian	6.750,00	Dinas Perhubungan Komunikasi & Informatika
145	02.10.01.02.003	Note Book	000009 s/d 000011	Toshiba		Fiber	2013						Pembelian	21.000,00	Dinas Perhubungan Komunikasi & Informatika	
146	02.10.01.02.003	Note Book	000014	Lenovo / 14 Inchi	Sedang	Fiber	2015						Pembelian	5.000,00	Barang Berada Di Bendahara Barang	
147	02.10.01.02.003	Note Book	000015	Lenovo / 14 Inchi	Sedang	Fiber	2015						RB	Pembelian	5.000,00	Barang Dipegang Oleh Bendahara Penerimaan
148	02.10.01.02.003	Note Book	000016	Acer		Fiber	2011						RB	Pembelian	5.000,00	Dinas Perhubungan komunikasi dan informatika

149	02.10.02.01.006	CPU (Peralatan Mainframe)	000002	LG	31 M ES 2	Fiber	2011					Pembelian	4.500,00	Dinas Perhubungan Komunikasi & Informatika
150	02.10.02.03.002	Monitor	000003 s/d 000006	LG		Fiber	2010					Pembelian	10.911,70	Dinas Perhubungan Komunikasi & Informatika
151	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000001 s/d 000004	Canon Pixma IP 2770		Fiber	2013					Pembelian	3.000,00	Dinas Perhubungan Komunikasi & Informatika
152	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000005	Omnikey 5422		Fiber	2019					Pembelian	42.500,00	Barang Berada Di PKB (Pengujian Sarana)
153	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000019	HP / Deskjet 3920		Fiber	2006				RB	Pembelian	2.080,00	Barang Berada Di Ruang Server Lantai 3 Kantor Bupati Sumbawa
154	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000034	Canon Pixma / MP 2778		Fiber	2012				RB	Pembelian	1.200,00	Dinas Perhubungan Komunikasi & Informatika
155	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000035 s/d 000038	Canon Pixma MP 237		Fiber	2013					Pembelian	3.900,00	Dinas Perhubungan Komunikasi & Informatika
155	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000037	Canon Pixma MP 237		Fiber	2013				RB	Pembelian	1.500,00	Dinas Perhubungan Komunikasi & Informatika
156	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000047 s/d 000048	Canon / IP 2770	Sedang	Fiber	2015				EKSTRA	Pembelian	1.500,00	Barang Berada Di Kepegawaian Dan Keuangan
157	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000049 s/d 000053	Canon / IP 2770		Fiber	2017					Pembelian	5.000,00	Barang berada di kepegawaian, keuangan, bidang sarana darat, bidang keselamatan dan bidang operasional Dishub
158	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000054	HP / 3 In 1		Fiber	2017					Pembelian	3.500,00	Barang berada di Bagian Keuangan
159	02.18.01.01.001	Traffic Light	000001	ASP SMP EL02		Fiber, Kaca & Besi	2007					Pembelian	22.755,00	Lampu Lalu Lintas Depan Dinas Peternakan Sumbawa
160	02.18.01.01.001	Traffic Light	000002	ASP SMP EL02		Fiber, Kaca & Besi	2007					Pembelian	22.755,00	Lampu Lalu Lintas Depan Dealer Honda NSS Sumbawa
161	02.18.01.01.003	rambu bersuar lainnya (dst)	000001	-			2019					Pembelian	56.230,19	Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL)
162	02.18.01.02.001	Rambu Jalan	000001	-			2007					Pembelian	72.000,00	Pemeliharaan Rambu & Traffic Light

163	02.18.01.02.001	Rambu Jalan	000004	-		2009					Pembelian	253.615,50	Pengadaan Rambu Jalan + Pengadaan Rambu Jalan Tahun 2015 + Reklas Dari Kib D
164	02.18.01.02.001	Rambu Jalan	000005	-		2017					Pembelian	127.844,00	Pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas + biaya pengawasan
165	02.18.01.02.001	Rambu Jalan	000006 s/d 000009	-	Besi	2020					Pembelian	6.328,89	Jalan Yos Sudarso
166	02.18.01.02.001	Rambu Jalan	000010 s/d 000014	-	Besi	2020					Pembelian	7.911,12	Jalan Dr. Wahidin-Jalan Merdeka-Jalan Thamrin-Jalan Urip Sumoharjo
167	02.18.01.02.001	Rambu Jalan	000015 s/d 000020	-	Besi	2020					Pembelian	9.493,34	Jalan Kerangka Baja-Jalan Hasanuddin-Jalan Kamboja
168	02.18.01.02.001	Rambu Jalan	000021 s/d 000048	-	Besi	2020					Pembelian	44.302,24	Jalan Ruas Simpang Bukit Permai-Simpang Boak 1,2,3,4,5
169	02.18.01.02.001	Rambu Jalan	000049 s/d 000068	-	Besi	2020					Pembelian	31.644,46	Jalan Simpang Kebayan- Simpang Bukit Permai 1,2,3,4
170	02.18.01.02.001	Rambu Jalan	000069 s/d 000072	-	Besi	2020					Pembelian	6.328,89	Jalan Bungur-Simpang Olat Rarang-Jalan Garuda
171	02.18.01.02.001	Rambu Jalan	000073 s/d 000088	-	Besi	2020					Pembelian	25.315,57	Jalan Simpang Olat Rarang- Simpang Kerato 1,2,3
172	02.18.01.02.001	Rambu Jalan	000089	-	Besi	2020					Pembelian	1.582,22	Jalan Melati
173	02.18.01.02.001	Rambu Jalan	000090	-	Besi	2020					Pembelian	1.582,25	Jalan Diponegoro
174	02.18.01.02.002	Rambu Papan Tambahan	000001	-		2007					Pembelian	58.795,40	Papan Nama Jalan
175	02.18.01.02.002	Rambu Papan Tambahan	000002	-		2016					Pembelian	126.944,00	Pengadaan Portal
176	02.18.01.02.011	rambu tidak bersuar lainnya (dst)	000001	-		2015					Pembelian	71.800,00	Pengadaan Appil Zona Sekolah + Biaya Perencanaan dan Biaya Pengawasan
177	02.18.02.05.006	Run Way Traffic Light	000002	-		2016					Pembelian	30.000,00	Pengadaan Road Barrier
178	02.18.02.05.006	Run Way Traffic Light	000003	-		2015				EKSTRA	Pembelian	13.120,00	Pengadaan Traffic Cone
Jumlah Harga												8.029.497,47	

MENGETAHUI
Kepala Dinas Perhubungan

Drs. Abdul Aziz, M.Si
NIP. 19651102 199803 1 003

Sumbawa Besar, 1 Januari 2021
Pengurus Barang

Erny Suhardiningrum, S.IP
NIP. 19810122 200604 2 009



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) C
GEDUNG DAN BANGUNAN

Provinsi : PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
 Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
 Bidang : Bidang Perhubungan
 Unit Organisasi : Dinas Perhubungan
 Sub Unit Organisasi : Dinas Perhubungan
 U P B : Dinas Perhubungan
 NO. KODE LOKASI : 12.15.06.06.01.01.01

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor		Kondisi bangunan (B,KB,RB)	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Luas (M2)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
		Kode Barang 1.3.	Regis-ter		Bertingkat / Tidak	Beton/ Tidak			Tanggal	Nomor						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.01.01.01.001	000001	Baik	Tidak	Beton	725	Dinas Perhubungan Komunikasi & Informatika	12/31/2004			Tanah Hak Pakai	01.01.01.04.001.0001	Pembelian	1.624.691,50	Bangunan Gedung Kantor Dishubkominfo
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.01.01.01.001	000002	Kurang Baik	Tidak	Beton	1	Kantor UPTD PKB	12/31/2008			Tanah Hak Pakai		Pembelian	366.202,34	Rehab Kantor UPTD PKB
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.01.01.01.001	000003	Baik	Tidak	Beton		Dinas Perhubungan	10/28/2019	027/11/Dishub/2019				Pembelian	59.972,21	Rehab Gedung Kantor Dinas Perhubungan + Biaya Perencanaan + Biaya Pengawasan
4	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	03.01.01.08.001	000001	Baik	Tidak	Beton	60	Terminal Empang	12/31/1994			Tanah Hak Pakai	01.01.01.02.007.0001	Pembelian	80.079,00	Musholla Di Terminal Empang
5	Gedung Pos Jaga Permanen	03.01.01.13.001	000002	Baik	Tidak	Beton		Muara Kali	12/31/2009					Pembelian	26.400,00	Pos Pelayanan Muara Kali
6	Gedung Pos Jaga Permanen	03.01.01.13.001	000003	Baik	Tidak	Beton	1	Shelter Langam	12/31/2011					Pembelian	9.000,00	Pembangunan Pos Jaga Shelter Langam
7	Gedung Pos Jaga Permanen	03.01.01.13.001	000004	Baik	Tidak	Beton	1		12/31/2012					Pembelian	38.013,89	Pengadaan Konstruksi Rumah Jaga/Pos Jaga
8	Gedung Pos Jaga Permanen	03.01.01.13.001	000005	Baik	Tidak	Beton	1		12/31/2012					Pembelian	38.013,89	Pengadaan Konstruksi Rumah Jaga/Pos Jaga
9	Gedung Pos Jaga Permanen	03.01.01.13.001	000006	Baik	Tidak	Beton	1		12/31/2012					Pembelian	38.013,89	Pengadaan Konstruksi Rumah Jaga/Pos Jaga

No.	Jenis Barang / Nama Barang	N o m o r		Kondisi bangunan (B,KB,RB)	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Luas (M2)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
		Kode Barang 1.3.	Regis-ter		Bertingkat / Tidak	Beton/ Tidak			Tanggal	Nomor						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	Gedung Pos Jaga Permanen	03.01.01.13.001	000007	Baik										Pembelian	5.984,00	Biaya Perencanaan Halte Dan Portal
11	Gedung Pos Jaga Permanen	03.01.01.13.001	000008	Baik										Pembelian	38.306,00	Biaya Fisik Pembangunan Halte
12	Gedung Pos Jaga Permanen	03.01.01.13.001	000009	Baik										Pembelian	104.819,00	Biaya Fisik Pembangunan Portal
13	Gedung Pos Jaga Permanen	03.01.01.13.001	000010	Baik	Tidak	Beton		Simpang Sernu Sumbawa						Pembelian	89.758,00	Pembangunan Pos Jaga Lalu Lintas
14	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen	03.01.01.18.001	000001	Kurang Baik	Tidak	Beton	106	Terminal Alas	12/31/1980			Tanah Hak Pakai	01.01.01.02.007.0001	Pembelian	59.673,00	Kantor Terminal Alas
15	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen	03.01.01.18.001	000008	Kurang Baik	Tidak	Beton	1	Pelabuhan Alas	12/31/2007			Tanah Hak Pakai		Pembelian	156.550,00	Rehab Kantor Pelabuhan Alas
16	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen	03.01.01.18.001	000009	Kurang Baik	Tidak	Tidak	1000	Labuan Bua	12/31/2007			Tanah Hak Pakai		Pembelian	250.000,00	Pengerukan Muara Sungai Labuan Bua
17	Bangunan Halte/Shelter	03.01.01.18.004	000001	Baik	Tidak	Beton		Kecamatan Empang	7/14/2020	027/29/KPA/Dis hub/2020		Tanah Milik Pemda		Pembelian	38.462,46	Pembangunan Halte Di Kecamatan Empang (1 Unit)
18	Bangunan Halte/Shelter	03.01.01.18.004	000002	Baik	Tidak	Beton		Kecamatan Utan	7/14/2020	027/29/KPA/Dis hub/2020		Tanah Milik Pemda		Pembelian	38.462,46	Pembangunan Halte Di Kecamatan Utan (1 Unit)
19	Bangunan Gedung Terminal Lain-lain (dst)	03.01.01.18.005	000002	Kurang Baik	Tidak	Beton	15	Terminal Bugis	12/31/1984			Tanah Hak Pakai	01.01.01.02.007.0002	Pembelian	8.022,00	Loket Di Terminal Bugis
20	Bangunan Gedung Terminal Lain-lain (dst)	03.01.01.18.005	000013	Kurang Baik	Tidak	Beton	1	Shelter Langam	12/31/2007			Tanah Hak Pakai		Pembelian	157.800,00	Rehab Landasan Shelter Langam
21	Bangunan Gedung Terminal Lain-lain (dst)	03.01.01.18.005	000020	Kurang Baik	Tidak	Beton	1	Shelter Langam	12/31/2007			Tanah Hak Pakai		Pembelian	34.808,40	Rehab Kantor & MCK Shelter Langam
22	Bangunan Gedung Terminal Lain-lain (dst)	03.01.01.18.005	000023	Baik	Tidak	Tidak	2	Pasar Empang	12/31/2007			Tanah Hak Pakai		Pembelian	9.000,00	Portal Pasar Empang
23	Bangunan Gedung Terminal Lain-lain (dst)	03.01.01.18.005	000024	Baik	Tidak	Tidak	2	Shelter Langam	12/31/2007			Tanah Hak Pakai		Pembelian	21.500,00	Portal Shelter Langam

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor		Kondisi bangunan (B,KB,RB)	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Luas (M2)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
		Kode Barang 1.3.	Regis-ter		Bertingkat / Tidak	Beton/ Tidak			Tanggal	Nomor						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
24	Bangunan Gedung Terminal Lain-lain (dst)	03.01.01.18.005	000026	Baik	Tidak	Beton	174.3	Sepanjang Jalan Negara Di Kabupaten Sumbawa	12/31/2007					Pembelian	617.439,40	Pengadaan Marka Jalan + Pengadaan Marka Jalan Tahun 2015 + Pemeliharaan Marka Jalan Tahun 2015 + Reklas Dari Kib D
25	Bangunan Gedung Terminal Lain-lain (dst)	03.01.01.18.005	000027	Baik	Tidak	Beton	1	Terminal Empang	12/31/2008			Tanah Hak Pakai	01.01.01.02.007.0027	Pembelian	596.886,00	Pembangunan Pagar Terminal Empang
26	Bangunan Gedung Terminal Lain-lain (dst)	03.01.01.18.005	000030	Baik	Tidak	Beton	27	Terminal Plampang	12/31/2008					Pembelian	57.300,00	Rehab Ruang Tunggu Plampang
27	Bangunan Gedung Terminal Lain-lain (dst)	03.01.01.18.005	000037	Baik	Tidak	Beton	2	Kecamatan Rhee Dan Kecamatan Alas Barat	12/31/2011					Pembelian	40.000,00	Pembangunan Halte Rhee Dan Alas Barat
28	Bangunan Gedung Terminal Lain-lain (dst)	03.01.01.18.005	000038	Baik	Tidak	Beton		Terminal Empang	4/10/2017			Tanah Milik Pemda		Pembelian	310.532,45	Rehabilitasi Bangunan Terminal Empang (rehab lantai)
29	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Semi Permanen	03.01.01.30.002	000001	Baik	Tidak	Tidak		Kantor Dinas Perhubungan	12/31/1994			Tanah Hak Pakai	01.01.01.04.001.0001	Pembelian	138.578,00	Bangunan Parkir Di Kantor Dishubkominfo
30	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Semi Permanen	03.01.01.30.002	000002	Baik	Tidak	Beton	300	Terminal Alas	12/31/1994			Tanah Hak Pakai	01.01.01.02.007.0002	Pembelian	239.784,00	Bangunan Parkir Di Terminal Alas
31	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	03.01.01.30.005	000001	Kurang Baik	Tidak	Tidak	2	Shelter Seketeng	12/31/2007					Pembelian	9.000,00	Portal Shelter Seketeng
32	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	03.01.01.30.005	000002	Baik	Tidak	Tidak	2	Shelter Brang Bara	12/31/2007			Tanah Hak Pakai	01.01.01.02.007.0002	Pembelian	28.000,00	Portal Shelter Brang Bara
33	Bangunan Penerangan Jalan	03.01.01.32.003	000001	Baik										Pembelian	127.675,00	Pengadaan dan pemasangan LPJU Solar Cell untuk 5 lokasi tambatan perahu dan biaya retensi pekerjaan

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor		Kondisi bangunan (B,KB,RB)	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Luas (M2)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
		Kode Barang 1.3.	Regis-ter		Bertingkat / Tidak	Beton/ Tidak			Tanggal	Nomor						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
34	Bangunan Stasiun Bus Lain-lain (dst)	03.01.01.35.004	000001	Baik	Tidak	Beton	1	Depan SMPN 1 Moyo Hulu	12/31/2012					Pembelian	16.291,67	Pengadaan Halte Bis
35	Bangunan Stasiun Bus Lain-lain (dst)	03.01.01.35.004	000002	Baik	Tidak	Beton	1	Depan MTSN Sumbawa	12/31/2012					Pembelian	16.291,67	Pengadaan Halte Bis
36	Bangunan Stasiun Bus Lain-lain (dst)	03.01.01.35.004	000003	Baik	Tidak	Beton	1	Depan Rumah Sakit Rujukan Propinsi Pulau Sumbawa	12/31/2012					Pembelian	16.291,67	Pengadaan Halte Bis
37	Bangunan Stasiun Bus Lain-lain (dst)	03.01.01.35.004	000004	Baik	Tidak	Beton	1	Depan SMKN 1 Alas	12/31/2012					Pembelian	16.291,67	Pengadaan Halte Bis
38	Bangunan Stasiun Bus Lain-lain (dst)	03.01.01.35.004	000005	Baik	Tidak	Beton	1	Depan SMKN 1 Buer	12/31/2012					Pembelian	16.291,67	Pengadaan Halte Bis
39	Bangunan Stasiun Bus Lain-lain (dst)	03.01.01.35.004	000006	Baik	Tidak	Beton		pembangunan halte di kecamatan utan & Kecamatan Moyo Hilir	12/31/2013			Tanah Hak Pakai		Pembelian	45.000,00	Pembangunan Halte di Kecamatan Utan (1 Unit) & di Kecamatan Moyo Hilir (2 Unit)
40	Bangunan Stasiun Bus Lain-lain (dst)	03.01.01.35.004	000007	Baik	Tidak	Beton		Simpang Pamunga Kecamatan Plampang						Pembelian	30.000,00	Pengadaan Halte Bus
41	Bangunan Stasiun Bus Lain-lain (dst)	03.01.01.35.004	000008	Baik	Tidak	Tidak		Kecamatan Moyo Hilir	8/14/2017			Tanah Milik Pemda		Pembelian	38.390,00	Pembangunan Halte
42	Bangunan Stasiun Bus Lain-lain (dst)	03.01.01.35.004	000009	Baik	Tidak	Beton		Kecamatan Plampang	8/14/2017			Tanah Milik Pemda		Pembelian	38.390,00	Pembangunan Halte
43	Bangunan Stasiun Bus Lain-lain (dst)	03.01.01.35.004	000010	Baik	Tidak	Beton		Kecamatan Empang	8/14/2017			Tanah Milik Pemda		Pembelian	38.390,00	Pembangunan Halte
44	Bangunan Stasiun Bus Lain-lain (dst)	03.01.01.35.004	000011	Baik	Tidak	Beton		Kecamatan Buer	8/14/2017			Tanah Milik Pemda		Pembelian	51.130,00	Pembangunan Halte + Honor PPK + Honor PPTK + Honor PPHP
45	Bangunan Stasiun Bus Lain-lain (dst)	03.01.01.35.004	000012	Baik	Tidak	Beton		Kecamatan Tarano, Kecamatan Labangka, Kecamatan Lape, Kecamatan Lopok Dan Kecamatan Moyo Utara	7/1/2019	027/24/KPA/Dis hub/2019				Pembelian	232.760,03	Pembangunan Halte + Honor Panitia Penerima Hasil pekerjaan + Honor Pejabat Pembuat Komitmen + Honor Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa

No.	Jenis Barang / Nama Barang	N o m o r		Kondisi bangunan (B,KB,RB)	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Luas (M2)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
		Kode Barang 1.3.	Regis-ter		Bertingkat / Tidak	Beton/ Tidak			Tanggal	Nomor						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
46	Bangunan Menara Perambuan Penerang Pantai Lain-lain	03.03.01.01.006	000001	Baik	Tidak	Tidak		Desa Juru Mapin Kecamatan Buer				Tanah Milik Negara		Pembelian	28.000,00	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Peringatan Tenaga Surya (Warning Light Solar Cell) tiang lurus
47	Bangunan Menara Perambuan Penerang Pantai Lain-lain	03.03.01.01.006	000002	Baik	Tidak	Tidak		Kawasan Pasar Empang	7/10/2017			Tanah Milik Pemda		Pembelian	56.194,50	Pengadaan dan pemasangan lampu peringatan tenaga surya (warning Light Solar Cell)
48	Bangunan Menara Perambuan Penerang Pantai Lain-lain	03.03.01.01.006	000003	Baik	Tidak	Tidak		Kawasan Pantai Jempol Labuhan Badas	7/10/2017			Tanah Milik Pemda		Pembelian	56.194,50	Pengadaan dan pemasangan lampu peringatan tenaga surya (warning Light Solar Cell)
49	Pagar Permanen	03.04.01.04.001	000001	Baik	Tidak	Beton	66	Desa Pelat Kecamatan Unter Iwes	12/31/2011					Pembelian	95.172,00	Pembangunan Pagar Jalan Di Desa Pelat Kecamatan Unter Iwes
50	Pagar Permanen	03.04.01.04.001	000002	Kurang Baik	Tidak	Beton	25	Terminal Labuhan Badas	12/31/1990			Tanah Hak Pakai	01.01.01.02.007.0002	Pembelian	16.560,00	Pagar Keliling Di Terminal Labuhan Badas
51	Pagar Permanen	03.04.01.04.001	000003	Baik	Tidak	Tidak	68	Peruak Ai Bawi Kecamatan Lantung (Di Tahun 2015)	12/31/2012					Pembelian	575.644,00	Pagar Pengaman Jalan + Pengadaan Guadrail Tahun 2015 + Reklas Pengadaan guadrail Dari Kib E

No.	Jenis Barang / Nama Barang	N o m o r		Kondisi bangunan (B,KB,RB)	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Luas (M2)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
		Kode Barang 1.3.	Regis-ter		Bertingkat / Tidak	Beton/ Tidak			Tanggal	Nomor						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
52	Pagar Permanen	03.04.01.04.001	000004	Baik	Tidak	Tidak	132	Desa Brang Pelat Kecamatan Sumbawa	12/31/2013					Pembelian	174.817,00	Pengadaan Pagar Pengaman Jalan
53	Pagar Permanen	03.04.01.04.001	000005	Baik	Tidak	Tidak		Desa Semongkat Sampar Kecamatan Batu Lanteh	7/1/2019	027/26/KPA/Dis hub/2019				Pembelian	49.974,57	Pengadaan Dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan (Guadrail)
54	Pagar Permanen	03.04.01.04.001	000006	Baik	Tidak	Beton	52	Ruas Jalan Lantung - Ropang	7/14/2020	027/45/KPA/Dis hub/2020		Tanah Milik Pemda		Pembelian	74.255,01	Pembangunan Pagar Pengaman Ruas Jalan Lantung - Ropang
Jumlah Harga															7.141.056,82	

MENGETAHUI
Kepala Dinas Perhubungan

Sumbawa Besar, 1 Januari 2021
Pengurus Barang

Drs. Abdul Aziz, M.Si
NIP. 19651102 199803 1 003

Erny Suhardiningrum, S.IP
NIP. 19810122 200604 2 009



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) D
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Provinsi : PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
Bidang : Bidang Perhubungan
Unit Organisasi : Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : Dinas Perhubungan
U P B : Dinas Perhubungan
NO. KODE LOKASI : 12.15.06.06.01.01.01

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor		Konstruksi	Panjang (Km)	Lebar (M)	Luas (M2)	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen		Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Kondisi (B, KB, RB)	Keterangan
		Kode Barang 1.3.	Regis-ter						Tanggal	Nomor						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Jembatan Penyebrangan Lain-lain	04.01.02.10.006	000003										Pembelian	6.204.162,18	Baik	Biaya Fisik Pembangunan Tambatan Perahu Labu Ijuk Kecamatan Moyo Hilir + perencanaan dan pengawasan + Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan + Honor Pejabat Pembuat Komitmen + Honor Pejabat Pengelola Teknis + Biaya Fisik Tambatan Perahu Labu Tarujung
2	Jembatan Penyebrangan Lain-lain	04.01.02.10.006	000004				210	Bugis - Medang Kecamatan Labuhan Badas	1/22/2020	027/81.b/KPA/Dishub/2020	Tanah Milik Pemda		Pembelian	11.302.695,15	Baik	Dermaga Bugis Medang Kecamatan Labuhan Badas

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor		Konstruksi	Panjang (Km)	Lebar (M)	Luas (M2)	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen		Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Kondisi (B, KB, RB)	Keterangan
		Kode Barang 1.3.	Register						Tanggal	Nomor						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	Jembatan Penyebrangan Lain-lain	04.01.02.10.006	000005					Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas	4/10/2017		Tanah Milik Pemda		Pembelian	9.126.451,00	Baik	Belanja uang muka penyusunan DED + pembayaran uang muka 30% + bayar belanja kedua penyusunan DED + pembayaran uang muka 30% yg kedua + pembayaran termin 1 + bayar termin 3 + pembayaran angsuran kedua + belanja jasa penyusunan UKL-UPL Pembangunan Dermaga
4	Bangunan Box Tersier (Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air)	04.02.05.06.005	000001					Muara Kali Kecamatan Labuhan Badas					Pembelian	27.357,00	Baik	Pengadaan Border + Biaya Perencanaan dan Biaya Pengawasan Fasilitas Keselamatan
5	Saluran Pembawa Air Baku Tertutup	04.02.06.03.002	000001					Terminal Sumer Payung	12/31/2013				Pembelian	70.110,50	Baik	Pengadaan Jaringan Air Bersih Kios Terminal Sumer Payung

No.	Jenis Barang / Nama Barang	N o m o r		Konstruksi	Panjang (Km)	Lebar (M)	Luas (M2)	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen		Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Kondisi (B, KB, RB)	Keterangan
		Kode Barang 1.3.	Regis-ter						Tanggal	Nomor						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	Saluran Pembawa Air Baku Tertutup	04.02.06.03.002	000002					Pos Jaga Lalu Lintas Simpang Karaci Dan Simpang La					Pembelian	11.796,00	Baik	Pengadaan Instalasi Air Bersih MCK Pos Jaga Lalu Lintas
7	Saluran Pembawa Air Baku Tertutup	04.02.06.03.002	000003					Pos Polisi Lapangan Pahlawan					Pembelian	15.000,00	Baik	Pembangunan MCK dan Instalasi Air Bersih
8	Jaringan Telepon Diatas Tanah Kapasitas Kecil	04.04.03.01.001	000001				1	UPTD PKB					Pembelian	14.948,50	Baik	Instalasi Telepon Balai Pengujian Kendaraan Bermotor
Jumlah Harga													26.772.520,33			

MENGETAHUI
Kepala Dinas Perhubungan

Sumbawa Besar, 1 Januari 2021
Pengurus Barang

Drs. Abdul Aziz, M.Si
NIP. 19651102 199803 1 003

Erny Suhardiningrum, S.IP
NIP. 19810122 200604 2 009



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) E
ASET TETAP LAINNYA

Provinsi : PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
Bidang : Bidang Perhubungan
Unit Organisasi : Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : Dinas Perhubungan
U P B : Dinas Perhubungan

NO. KODE LOKASI : 12.15.06.06.01.01.01

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Kode Barang 1.3.	Nomor Register	Buku / Perpustakaan		Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan			Hewan/Ternak dan Tumbuhan		Jumlah	Asal usul	Tahun Cetak / Penjualan	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
				Judul/ Pencipta	Spesifikasi	Asal Daerah	Pencipta	Bahan	Jenis	Ukuran					
1	Musik	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		05.01.01.08.007	000001	-	-	-	-	-	-	-	1	Pembelian	1998	4.928,00	Orgen / Elektone
Jumlah Harga															
4.928,00															

MENGETAHUI
Kepala Dinas Perhubungan

Sumbawa Besar, 1 Januari 202
Pengurus Barang

Drs. Abdul Aziz M.Si
NIP. 19651102 199803 1 003

Erny Suhardiningrum, S.IP
NIP. 19810122 200604 2



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) F
KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan**

Provinsi : PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
 Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
 Bidang : Bidang Perhubungan
 Unit Organisasi : Dinas Perhubungan
 Sub Unit Organisasi : Dinas Perhubungan
 U P B : Dinas Perhubungan

NO. KODE LOKASI : 12.15.06.06.01.01.01

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Bangunan (P, SP, D)	Konstruksi Bangunan Bertingkat / Tidak	Beton / Tidak	Luas (M2)	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Tgl. Bln Thn Mulai	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal-usul Pembiayaan	Nilai Kontrak (ribuan Rp)	Keterangan	
							Tanggal	Nomor							
1	Kapal Motor	1	Tidak	Tidak	0		8	9	10	11	12	13	14	15	
							12/2/2019		12/2/2019		00.00.00.00.0000.0000	Rembelan	99.000,00	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan untuk Kapal Kapasitas 20 Penumpang	
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Tidak	Beton	1119	Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa	6/1/2020	027/ /KPA/Dishub/2020	6/3/2020	Tanah Milik Pemda		Rembelan	9.905,50	Perencanaan Rehab Gedung Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa	
Jumlah Harga											108.905,50				

MENGETAHUI
Kepala Dinas Perhubungan

Sumbawa Besar, 1 Januari 2021
Pengurus Barang

Drs. Abdul Aziz, M.Si
NIP. 19651102 199803 1 003

Erny Suhardiningsrum, S.IP
NIP. 19810122 200604 2 009

2.3. Kinerja Pelayanan/Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2020

Pada sub bagian ini, akan disajikan dan dideskripsikan tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa periode Tahun 2016-2021 sesuai dengan indikator kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa beserta faktor-faktor yang mempengaruhi capaian-capaian yang tidak sesuai target yang disajikan dalam Tabel T-C.23 dan Tabel T-C.24.

Tabel T-C.23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2021

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Jumlah arus penumpang (multi moda) yang terlayani (orang)				21,72	42	62,29	82,58	102,86	49,38	121,6	124,8	111,3	53,3	2,3	2,9	2	1,4	0,52
2	Persentase layanan Angkutan Darat				0,07	0,04	0,03	0,04	0,05	0,07	0,04	0,03	0,03	0,03	1	1	1	0,8	0,6
3	Rasio Ijin Trayek				0,03	0,03	0,03	0,04	0,05	0,03	0,03	0,03	0,02	0,01	1	1	1	0,5	0,2
4	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan				1,29	1,2	1,2	1,2	1,2	1,29	1,2	1,2	0,58	2,41	1	1	1	0,5	2

Berdasarkan tabel TC-23, capaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

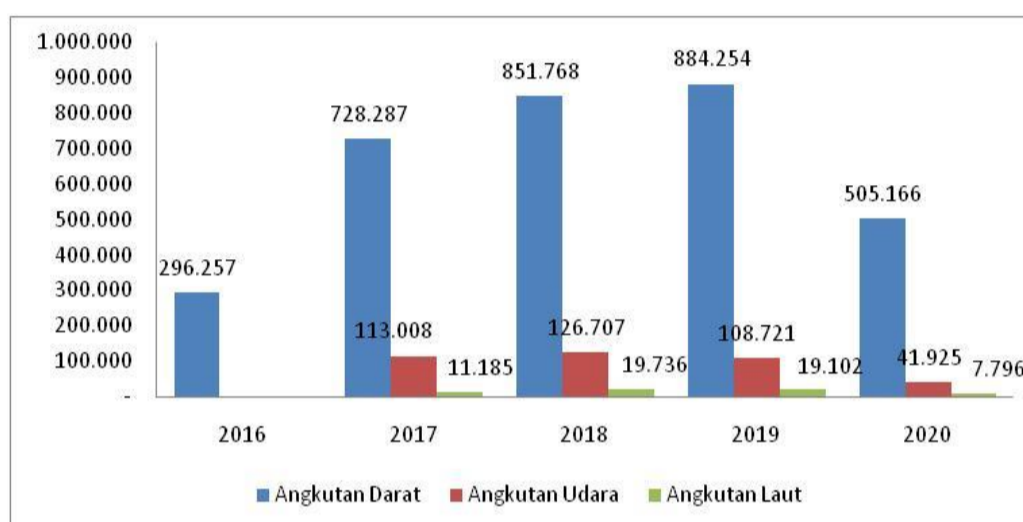
- 1) Capaian Kinerja Pelayanan/Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan
 - a. Persentase peningkatan arus penumpang.

Jumlah arus penumpang (multi-moda) terdiri dari jumlah arus penumpang angkutan umum per tahun (orang), jumlah arus penumpang angkutan laut per tahun (orang), dan jumlah arus penumpang angkutan udara per tahun (orang). Jumlah arus penumpang angkutan umum variatif dari tahun ke tahun, dan mengalami peningkatan yang signifikan sejak tahun 2017, Jumlah arus penumpang angkutan umum Tahun 2019 sebanyak 1.001.660 meningkat sebesar 100,34% dari jumlah penumpang pada Tahun 2018, hal ini mengindikasikan meningkatnya kinerja angkutan umum di Kabupaten Sumbawa sekaligus sebagai indikasi meningkatnya pelayanan di terminal Sumer Payung, mengingat pengelolaannya sudah menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan RI sejak 1 januari 2017. Hal tersebut berdampak pada kinerja antara lain bertambah efektifnya pelayanan dan pencatatan/update data di Terminal Sumer Payung. Tahun 2020 jumlah arus penumpang (multi-moda) mengalami penurunan sebanyak 554.887, penurunan ini diakibatkan karena adanya pembatasan aktifitas warga yang keluar masuk ke daerah/wilayah lain sebagai akibat

dari mewabahnya pandemi covid-19 sejak awal tahun 2020. Realisasi capaian disajikan dalam tabel Jumlah Arus Penumpang (multi moda) Tahun 2016-2020 sebagai berikut:

Sasaran Strategis I	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Capaian (orang)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1. Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan	Persentase peningkatan arus penumpang (multi moda) yang terlayani	49,38	121,60	124,8	111,30	51,81

Sumber : Hasil Analisis Dishub Kab. Sumbawa



Grafik Jumlah Arus Penumpang Multi Moda

Jumlah arus penumpang angkutan umum dicatat berdasarkan arus penumpang naik dan penumpang turun di Terminal Sumer Payung Sumbawa Besar pada Tahun 2020 sebanyak 505.166 orang terdiri dari penumpang AKAP sebanyak 54.065 orang, penumpang AKDP sebanyak 410.015 orang, penumpang Angkutan Kota sebanyak 34.662 orang, penumpang angkutan perdesaan sebanyak 6.424 orang, dan penumpang angkutan Jemaah Haji (PP) untuk Tahun 2020 tidak ada karena penyelenggaraan ibadah haji untuk tahun ini ditiadakan sebagai akibat dari adanya wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Jumlah Penumpang Angkutan Umum Tahun 2020

No.	JENIS KENDARAAN	Tahun	
		2019	2020
1	2	3	4
1	AKAP	111.776	54.065
2	AKDP	705.979	410.015
3	Angkutan Kota	16.242	34.662
4	Angkutan Perdesaan	49.659	6.424
5	Angkutan Haji (PP)	598	-
	Jumlah	884.254	505.166

* Penumpang Jemaah Haji Tahun 2019 menggunakan armada angkutan umum dan dicatat oleh Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kab. Sumbawa

Jumlah arus penumpang angkutan laut dicatat berdasarkan arus penumpang naik dan turun di Pelabuhan Badas Sumbawa Besar. Berdasarkan laporan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Badas, jumlah penumpang angkutan laut yang dicatat di Pelabuhan Nusantara dan Pelabuhan Rakyat Tahun 2020 sebanyak 10.195 orang, terdiri dari penumpang di Pelabuhan Nusantara sebanyak 7.517 orang, dan penumpang di Pelabuhan Rakyat sebanyak 2.678 orang.

Data Arus Penumpang di Pelabuhan Badas Tahun 2020

No	BULAN	PENUMPANG			
		PELABUHAN NUSANTARA		PELABUHAN RAKYAT	
		NAIK	TURUN	NAIK	TURUN
1	2	3	4	5	6
1	Januari	974	1.191	423	372
2	Pebruari	728	719	197	169
3	Maret	231	244	100	147
4	April	237	316	212	138
5	Mei	80	65	116	128
6	Juni	39	34		
7	Juli	57	52	5	9
8	Agustus	30	57	21	23
9	September	31	33	39	30
10	Oktober	76	1.022	248	71
11	November	81	773	45	86
12	Desember	75	372	20	79
	Jumlah	2.639	4.878	1.426	1.252
	Total	7.517		2.678	

Jumlah arus penumpang angkutan udara dicatat berdasarkan arus penumpang naik dan turun di Bandar Udara Sultan M. Kaharuddin Sumbawa Besar. Berdasarkan laporan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Sultan Muhammad Kaharuddin Sumbawa Besar, aktivitas Bandara Sultan Muhammad Kaharuddin Sumbawa Besar adalah melayani penerbangan domestik, pada tahun 2020 tercatat sebanyak 698 trip pesawat terdiri dari keberangkatan sebanyak 349 kali dan kedatangan sebanyak 349 kali. Sedangkan jumlah penumpang di terminal kedatangan dan keberangkatan tahun 2020 sebanyak 41.925 orang terdiri dari kedatangan sebanyak 20.566 orang dan keberangkatan sebanyak 21.308 orang. Aktivitas Bandar udara Sultan Muhammad Kaharudin Sumbawa Besar sebagai berikut:

Aktivitas Bandara Sultan Muhammad Kaharuddin Sumbawa Besar Tahun 2020

No	Bulan	Jenis Penerbangan	PESAWAT		Penumpang		
			DTG	BRK	DTG	BRK	JML
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Januari	Domestic	61	60	4.106	4.325	8.431
2	Februari	Domestic	62	62	4.048	4.120	8.168
3	Maret	Domestic	56	57	3.434	4.006	7.440
4	April	Domestic	58	58	3.439	3.033	6.472
5	Mei	Domestic	24	25	1.073	922	1.995
6	Juni	Domestic					
7	Juli	Domestic					
8	Agustus	Domestic					
9	September	Domestic					
10	Oktober	Domestic					
11	November	Domestic	31	31	1.720	2.015	3.735
12	Desember	Domestik	57	56	2.779	2.887	5.666
Jumlah			349	349	20.566	21.308	41.925

*Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Sultan Muhammad Kaharuddin Sumbawa Besar.

Berdasarkan pengukuran capaian indicator kinerja Jumlah arus penumpang (multi-moda) yang terlayani Tahun 2020, ditargetkan sebesar 102,86% hanya terealisasi sebesar 53,30% atau mengalami penurunan sebesar 51,81% dari target, hal ini disebabkan karena adanya pandemi corona virus disease 2019 (covid-19) sehingga masyarakat yang bepergian ke luar daerah jumlahnya berkurang.

b. Persentase layanan Angkutan Darat

Persentase layanan Angkutan Darat dihitung menggunakan formula jumlah angkutan darat dibagi jumlah penumpang angkutan darat dikalikan 100%. Jumlah angkutan darat atau angkutan penumpang Tahun 2020 sebanyak 77 unit, sedangkan jumlah penumpang Tahun 2020 sebanyak 505.166 orang. Berdasarkan pengukuran indikator kinerja Persentase layanan Angkutan Darat Tahun 2020 terealisasi sebesar 0,03% atau terealisasi sebesar 60% dari target. Persentase layanan angkutan darat tahun 2020 tidak berbeda signifikan dengan persentase layanan angkutan darat Tahun 2019 yang lalu.

Persentase layanan Angkutan Darat Tahun 2016-2020

Sasaran Strategis I	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Capaian (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1. Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan	Persentase Layanan Angkutan Darat	0,07	0,04	0,03	0,03	0,03

Sumber : Hasil Analisis Dishub Kab. Sumbawa



Grafik Jumlah Angkutan Darat dan Jumlah Penumpang
(Persentase Layanan Angkutan Darat)

c. Rasio Ijin Trayek

Pada tahun 2017 Rasio ijin trayek dihitung menggunakan formula perbandingan jumlah ijin trayek yang dikeluarkan dengan jumlah penduduk. Ijin Trayek yang menjadi kewenangan kabupaten/Kota adalah ijin trayek untuk angkutan perkotaan dan perdesaan, berdasarkan data permohonan ijin trayek Tahun 2017, telah direalisasikan sebanyak 153 ijin trayek angkutan kota/perdesaan, sedangkan untuk AKAP, AKDP, dan kendaraan angkutan tertentu yang beroperasi dan memiliki ijin trayek yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi/Pusat sebanyak 105 unit angkutan. Dengan demikian maka rasio ijin trayek Tahun 2017 adalah sebesar 0,000579 dengan jumlah penduduk Tahun 2017 sebanyak 445.503 jiwa atau secara proporsional 1:1.727. Untuk tahun 2018 Rasio Ijin Trayek dihitung berdasarkan ijin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa terdiri dari Ijin trayek Angkutan Perkotaan sebanyak 19 ijin dan Trayek Angkutan Pedesaan sebanyak 118 ijin. Rasio Ijin Trayek Tahun 2018 1:3.252 atau 0,03 %.

Ijin trayek yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Sumbawa terdiri dari ijin trayek untuk angkutan perdesaan dan ijin trayek untuk angkutan kota. Rasio Ijin Trayek Tahun 2019 yang dihitung berdasarkan ijin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa terdiri dari Ijin trayek Angkutan Perkotaan sebanyak 12 ijin dan Trayek Angkutan Pedesaan sebanyak 93 ijin, tidak berbeda dengan Tahun 2018 jika rasio ijin trayek dihitung sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Demikian juga untuk tahun 2016 dan 2017 perbedaannya tidak terlalu signifikan. Rasio ijin trayek tahun 2019 mengalami penurunan dari 0,03% tahun

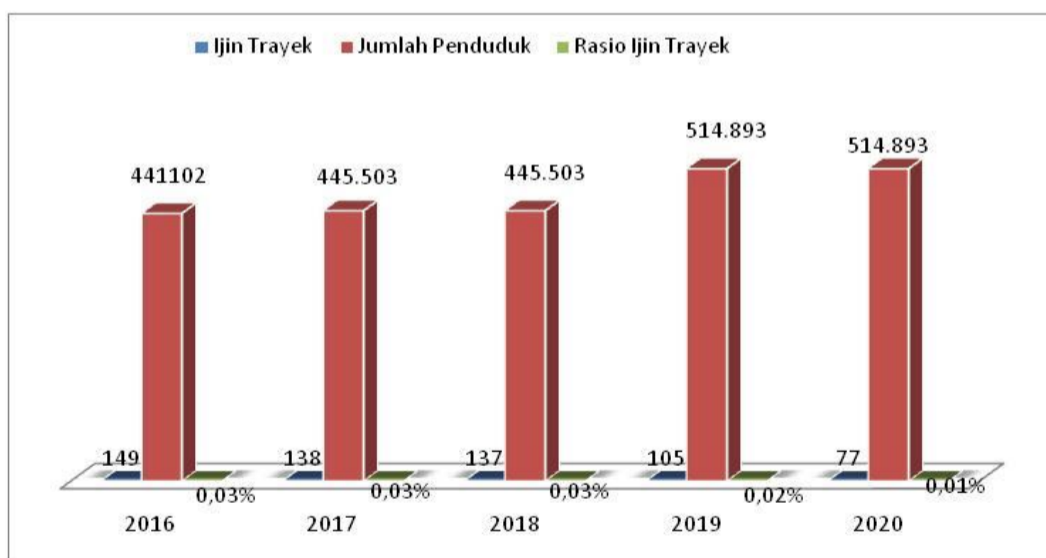
2018 menjadi 0,02% ditahun 2019. Jumlah ijin trayek di tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa sebanyak 77 ijin yang terdiri dari 8 ijin trayek perkotaan dan 69 ijin trayek pedesaan. Tahun 2020 ijin trayek yang dikeluarkan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2019 lalu. Ini berarti bahwa setiap 1 rekomendasi trayek yang diberikan terkait dengan pelayanan transportasi kepada 6.686 penduduk atau dari 77 rekomendasi yang diberikan terhadap jumlah penduduk maka persentase rekomendasi yang diberikan adalah 0,01%. Rasio ijin trayek tahun 2020 lebih kecil dibandingkan tahun lalu, hal ini disebabkan karena jumlah kendaraan tidak berbanding lurus dengan penambahan jumlah penduduk.

Rasio Ijin Trayek Tahun 2016-2020

Sasaran Strategis I	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Capaian (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1. Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan	Rasio Ijin Trayek	0,03	0,03	0,03	0,02	0,01

Sumber : Hasil Analisis Dishub Kab. Sumbawa

Jumlah Ijin Trayek dan Rasio Ijin Trayek yang diterbitkan bervariasi dari tahun ke tahun seperti tampak dibawah ini :



Grafik Ijin Trayek dan Jumlah Penduduk (Rasio Ijin Trayek)

2) Capaian kinerja sarana dan prasarana transportasi yang sesuai dengan standar teknis kebijakan transportasi.

a. Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan

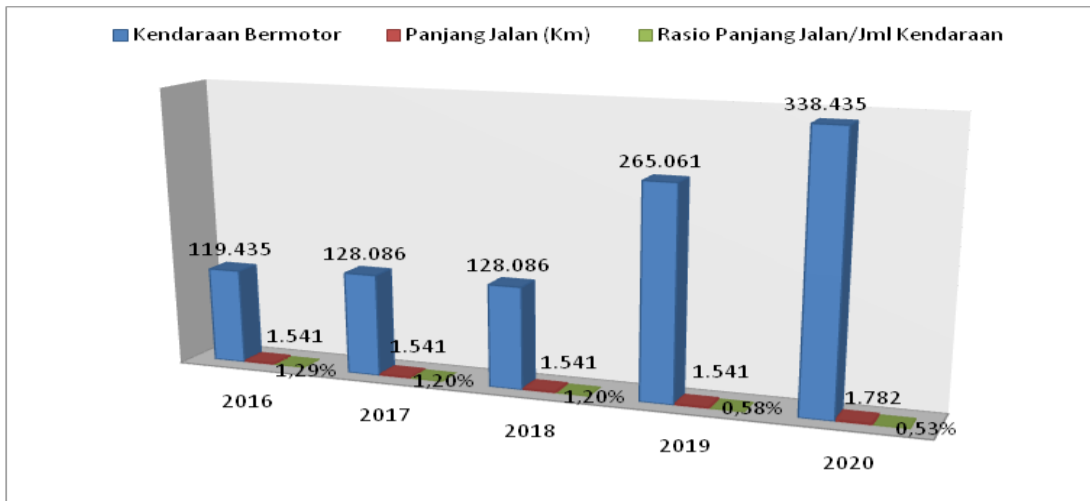
Rasio Panjang Jalan tahun 2016 - 2020

Sasaran Strategis II	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Capaian (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1. Tersedianya Sarana dan prasarana transportasi yang sesuai dengan standar teknis kebijakan transportasi	Rasio Panjang Jalan per jumlah kendaraan	1,29	1,20	1,20	0,58	0,53

Sumber : Hasil Analisis Dishub Kab. Sumbawa

Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sumbawa pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa tahun 2020 berupa Rasio *panjang jalan per jumlah kendaraan* menunjukkan capaian sebesar 17,20%. dari target yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2021 sebesar 11,50%, maka dibandingkan target RPJMD Kabupaten Sumbawa dengan tingkat realisasi sebesar 149,57% , Nilai ini berarti 1 km jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah kendaraan. Kendaraan yang diperhitungkan disini terdiri dari mobil penumpang, bus, truk dan sepeda motor.

Panjang jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten di Kabupaten Sumbawa dari Tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 tetap sebesar 1.541 Km, sedangkan untuk tahun 2020 ada penambahan data jalan desa sepanjang 241 Km, sehingga total panjang jalan di Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 sepanjang 1.782 Km. Penambahan jumlah kendaraan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 meningkat. Untuk tahun 2020 di Kabupaten Sumbawa per 1 km sebanyak 190 unit kendaraan bermotor dengan perhitungan pembagian jumlah kendaraan tahun 2020 sebanyak 338.435 dibagi panjang jalan 1.782. Jadi Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan 1/10 km pada tahun 2020 19,00%, 17,20% pada tahun 2019, 8,30% tahun 2018. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan seperti tampak pada grafik di bawah ini :

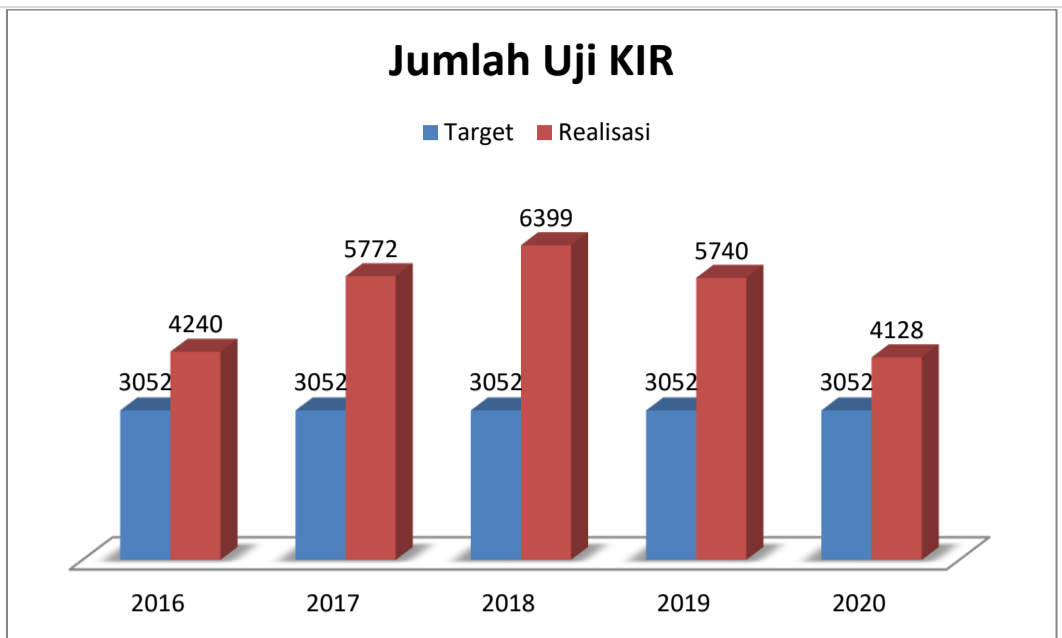


Grafik Jumlah Kendaraan Bermotor dan Panjang Jalan

Adapun capaian kinerja Dinas Perhubungan di luar Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

a. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

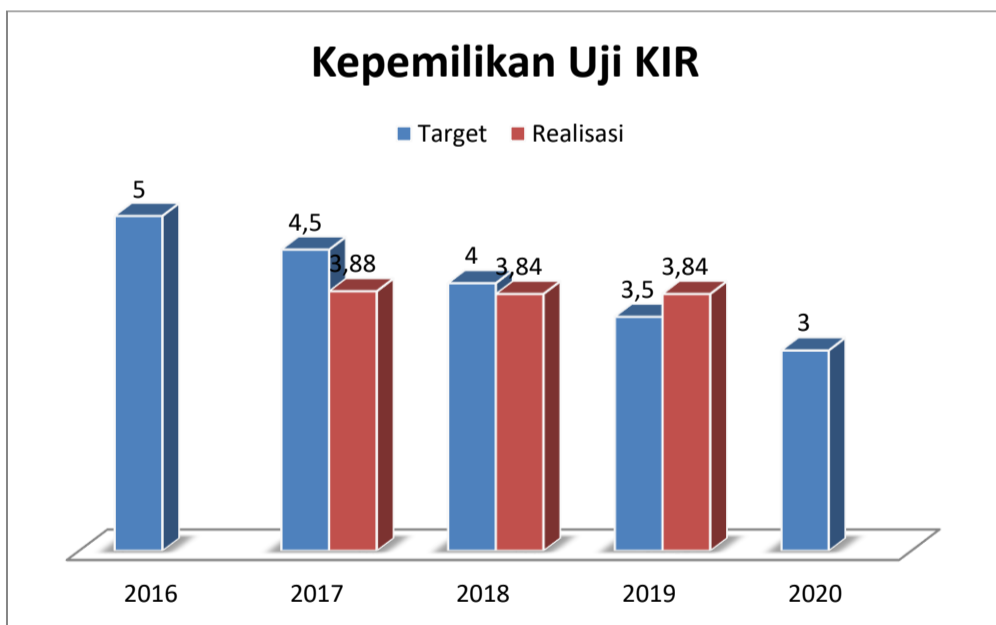
Pelaksanaan uji KIR angkutan umum bertujuan untuk menjamin keselamatan kendaraan bermotor secara teknis di jalan melalui penentuan kelaikan jalan kendaraan bermotor, ikut menjaga kelestarian lingkungan dengan mengontrol emisi gas buang kendaraan bermotor dan memberikan pelayanan publik. Berdasarkan data base Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor pada tahun 2017, jumlah uji KIR kendaraan umum di kabupaten Sumbawa 5772 unit kendaraan, pada tahun 2018 mengalami kenaikan 10.86% dari tahun 2017 dengan jumlah kendaraan yang lulus uji KIR 6399 unit kendaraan, tahun 2019 jumlah uji KIR kendaraan mengalami penurunan 10.30% dari tahun 2018 dengan jumlah 5740 unit, tahun 2020 mengalami penurunan 28.08% dari tahun 2019 dengan jumlah kendaraan yang lulus uji KIR tahun 2020 4128 unit. Grafik jumlah uji KIR tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik berikut.



Grafik Jumlah Uji KIR angkutan umum tahun 2016-2020

b. Persentase kepemilikan KIR angkutan umum

Jumlah kepemilikan uji KIR angkutan umum menunjukkan tingkat kesadaran pengusaha dalam mengurus KIR kendaraannya tiap tahun. Persentase kepemilikan KIR angkutan umum diperoleh dari perhitungan Jumlah angkutan umum yang tidak memiliki KIR pada **Tahun n** dibagi dengan jumlah angkutan umum pada **Tahun n** dikalikan 100%. Jumlah kepemilikan uji KIR tahun 2017 sebesar 3.88%, tahun 2018 sebesar 3.84%, tahun 2019 3.84%. Grafik kepemilikan uji KIR dapat dilihat pada grafik berikut.



Grafik jumlah kepemilikan uji KIR angkutan umum tahun 2016-2021

c. Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal Bis

1. Pelabuhan Laut

Pelabuhan laut yang dioperasikan di kabupaten Sumbawa adalah Pelabuhan Badas terletak di Kecamatan Labuhan Badas, ± 15 Km dari pusat kota Sumbawa Besar. Pelabuhan Badas dikelola oleh PT. Pelabuhan Indonesia III dan otoritas kesyahbandaran. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Badas ditetapkan dalam kategori Kelas V dan di pimpin oleh seorang Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) dengan tugas pokok : “Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan”. Dari segi Operasional, Pelabuhan Badas merupakan pintu gerbang utama perekonomian pulau Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), yang dikunjungi oleh kapal-kapal Pelayaran Rakyat dan Pelayaran Nusantara untuk muatan antar Pulau dan pelayaran khusus (suplay stok BBM Pertamina).

2. Dermaga/Tambatan Perahu

Dermaga adalah suatu bangunan pelabuhan yang digunakan untuk merapat dan menambatkan kapal yang melakukan bongkar muat barang dan menaikturunkan penumpang, dan jasa lainnya. Dermaga Rakyat berperan sebagai tempat pelayanan multifungsi untuk mendukung kehidupan masyarakat sekitarnya, khususnya di daerah terpencil dan terisolasi. Tahun 2016 direncanakan untuk dibangun Dermaga/tambatan perahu di Eks Pelabuhan Alas Kec. Alas menggunakan anggaran Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, namun dalam perkembangannya rencana dimaksud batal dilaksanakan karena beberapa hal yang sifatnya administratif dan teknis. pada Tahun 2017 dilaksanakan pembangunan dermaga yang berlokasi di desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas. Tahun 2019, berlokasi di Desa Bugis Medang Kec. Labuhan Badas (Dermaga Bugis Medang).

3. Terminal Bus

Sebagai konsekuensi dari perkembangan angkutan umum dan pelayanan pada jaringan trayek, diperlukan penentuan simpul yang merupakan tempat bagi pergantian antarmoda dan intermodal berupa Terminal. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang

digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan. Terminal dilengkapi dengan fasilitas utama, dan fasilitas penunjang. Dengan demikian lokasi Terminal berada pada simpul jaringan lalu lintas dan angkutan jalan. Ketersediaan Terminal penumpang angkutan jalan tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. Jumlah Terminal Penumpang Angkutan Jalan

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
- Type A	1	1	1	1	1
- Type C	1	1	1	1	1
- Shelter	1	1	1		

d. Persentase Pemasangan Rambu-rambu

Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan. Larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan. Pengadaan dan pemasangan Rambu Lalu Lintas berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas. Jumlah rambu lalu lintas yang dipasang Tahun 2017 sebanyak 100 buah sesuai target yang ditetapkan. Jumlah rambu lalu lintas yang dipasang Tahun 2018 dan 2019 sebanyak 0 buah tidak sesuai target yang ditetapkan karena kebutuhan tersebut tidak dialokasikan untuk Tahun 2018 dan 2019.

A. Realisasi Target Rencana Strategis (Renstra 2016-2021)

Realisasi target renstra diukur berdasarkan capaian kinerja indikator sasaran dan indikator program (outcome). Realisasi capaian kinerja dimaksud merupakan hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan selama periode renstra (2016-2021).

(1) Realisasi target indikator sasaran merupakan pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

- a) Persentase peningkatan arus penumpang (multi moda) yang terlayani (orang) terealisasi sebesar 51,81% dari target yang ditetapkan dalam renstra 2016-2021, pada realisasi pada tahun 2016 yang dihitung hanya Jumlah arus penumpang angkutan darat karena belum tersedianya data penumpang angkutan laut dan udara.

-
- b) Persentase Layanan Angkutan Darat, terealisasi sebesar 60% dari target yang ditetapkan.
 - c) Rasio Ijin Trayek, terealisasi sebesar 20% dari target yang ditetapkan.
 - d) Rasio Panjang jalan per jumlah Kendaraan Bermotor, realisasinya melebihi dari target yang ditetapkan, yaitu sebesar 2,42% atau mengalami peningkatan sebesar 201,66%. Hal ini dikarenakan adanya penambahan panjang jalan yaitu panjang jalan desa dan adanya penurunan jumlah kendaraan bermotor sebagai akibat dari adanya pandemi covid-19.

(2) Realisasi target indikator Program (outcome)

Realisasi kinerja atau capaian kinerja dari indikator program yang ditetapkan dalam renstra 2016-2021, untuk tahun 2016 realisasinya rata-rata 105 % dari target yang ditetapkan, capaian ini dipengaruhi oleh dibangunnya perlengkapan jalan (Portal) yang tidak ditargetkan namun penting dilaksanakan dengan pertimbangan mengatasi kesemrautan Lalu Lintas di wilayah perkotaan. Untuk tahun 2017 realisasinya 103%, tingginya capaian ini dipengaruhi oleh terlaksananya pembangunan Dermaga Rakyat di desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas, dimana kegiatan tersebut tidak direncanakan/ditargetkan pada renstra untuk tahun 2017. Untuk tahun 2018 terealisasi sebesar 90%, capaian ini disebabkan karena rendahnya realisasi dan rendahnya alokasi anggaran pada program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan. Dan untuk tahun 2019 juga terealisasi sebesar 90% hal ini disebabkan karena sebagian besar anggaran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 berasal dari dana DAK yang pengerjaan fisiknya baru mencapai 79% dan realisasi keuangannya mencapai 63,69%. Tahun 2020 realisasi capaian kinerja terealisasi sebesar 77%, capaian kinerja tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu, hal ini disebabkan karena adanya penyesuaian belanja pasca refocusing penanganan covid-19 sesuai dengan Instruksi Bupati Sumbawa No.4 Tahun 2020 tentang percepatan penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun 2020 dalam rangka penanganan corona virus disease 2019 (covid-19).

B. Capaian Kinerja Keuangan Tahun 2016-2021

Kinerja pembangunan bidang perhubungan selama Tahun 2016-2021

dilaksanakan dengan sejumlah alokasi penganggaran yang terdiri dari anggaran pendapatan dan anggaran belanja. Target dan realisasi pendapatan dan belanja pembangunan bidang perhubungan Tahun 2016-2021 seperti disajikan pada Tabel TC-24.

Tabel T-C.24.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2021

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan			
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi		
	1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
PENDAPATAN	2,172,795,000	617,835,000	616,965,000	680,800,000	530,800,000	972,014,603	536,602,140	596,298,200	617,466,433	599,269,372	0.45	0.87	0.97	0.91	1.13	-	328,399,000	-	74,549,046
Retribusi	2,172,795,000	617,835,000	616,965,000	680,800,000	530,800,000	972,014,603	536,602,140	596,298,200	617,466,433	599,269,372	0.45	0.87	0.97	0.91	1.13				
Retribusi Jasa Umum	1,887,000,000	525,000,000	550,000,000	600,000,000	450,000,000	801,371,243	472,020,000	525,047,500	535,199,150	492,453,950	0.42	0.90	0.95	0.89	1.09				
Retribusi Parkir di tepi jalan umum	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	150,000,000	167,088,000	73,770,000	121,445,000	157,695,000	191,125,000	0.84	0.37	0.61	0.79	1.27				
Pengujian Kendaraan Bermotor	325,000,000	325,000,000	350,000,000	400,000,000	300,000,000	344,827,500	398,250,000	403,602,500	377,504,150	301,328,950	1.06	1.23	1.15	0.94	1.00				
Pengendalian Menara Telekomunikasi	1,362,000,000					289,455,743					0.21								
Retribusi Jasa Usaha	262,725,000	69,765,000	66,965,000	80,800,000	80,800,000	154,843,360	56,307,140	71,250,700	82,267,283	106,815,422	0.59	0.81	1.06	1.02	1.32				
Terminal	145,980,000	17,100,000	17,100,000	17,100,000	17,100,000	65,141,000	6,520,000	5,500,000	8,140,000	17,140,000	0.45	0.38	0.32	0.48	1.00				
Jasa Pelabuhan	17,328,000	17,328,000	21,728,000	22,500,000	22,500,000	22,697,360	23,388,200	19,890,700	29,757,283	34,215,422	1.31	1.35	0.92	1.32	1.52				
Sewa kios/MCK terminal	72,480,000	8,400,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	40,005,000	1,650,000	330,000	570,000	1,210,000	0.55	0.20	0.28	0.48	1.01				
Retribusi tempat khusus parkir	26,937,000	26,937,000	26,937,000	40,000,000	40,000,000	27,000,000	24,748,940	45,530,000	43,800,000	54,250,000	1.00	0.92	1.69	1.10	1.36				
Retribusi Perizinan Tertentu	23,070,000	23,070,000	0	0	0	15,800,000	8,275,000	0	0	0	0.68	0.36							
Ijin Trayek	23,070,000	23,070,000	0	0	0	15,800,000	8,275,000	0	0	0	0.68	0.36							
Lain-lain PAD yang sah/penerimaan lain-lain																			

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
BELANJA	11,290,883,955	17,669,911,198	8,841,905,461	17,344,265,374	10,085,296,212	10,136,773,354	14,498,568,052	7,979,469,075	13,009,103,547	9,998,112,799	0.90	0.82	0.90	0.75	0.99		
Belanja Tidak Langsung	5,689,970,135	3,737,356,598	3,579,292,761	3,754,259,933	3,730,654,266	5,226,806,720	3,485,879,388	3,418,700,142	3,620,568,853	3,688,524,000	0.92	0.93	0.96	0.96	0.99		
Gaji dan tunjangan	4,761,770,135	2,879,116,598	2,710,004,511	2,806,999,933	2,818,442,266	4,495,948,720	2,840,565,588	2,611,676,342	2,747,580,895	2,786,126,580	0.94	0.99	0.96	0.98	0.99		
Tambahan Penghasilan PNS	928,200,000	858,240,000	869,288,250	947,260,000	912,212,000	730,858,000	645,313,800	807,023,800	872,987,958	902,397,420	0.79	0.75	0.93	0.92	0.99		
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah																	
Belanja Langsung	5,600,913,820	13,932,554,600	5,262,612,700	13,590,005,441	6,354,641,946	4,909,966,634	11,012,688,664	4,560,768,933	9,388,534,694	6,309,588,799	0.88	0.79	0.87	0.69	0.99		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	587,512,720	791,961,550	524,640,150	438,505,550	297,180,025	525,329,984	618,818,309	468,181,231	397,473,071	282,056,087	0.89	0.78	0.89	0.91	0.95		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	118,433,100	216,511,000	81,795,600	109,585,000	55,011,331	114,945,100	211,165,450	73,735,600	108,663,806	51,698,431	0.97	0.98	0.90	0.99	0.94		
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	8,844,800	21,481,300	17,702,800	3,475,600	4,821,200	8,624,800	14,705,300	15,852,800	3,445,600	4,798,200	0.98	0.68	0.90	0.99	1.00		
Program Penyusunan Rencana Kerja SKPD	10,334,000	36,625,000	30,495,000	33,236,400	33,275,400	10,333,400	35,272,750	28,886,500	32,086,400	32,440,400	1.00	0.96	0.95	0.97	0.97		
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	321,738,500	752,718,000	243,761,500	150,000,000	173,827,400	18,069,000	568,032,000	228,456,500	150,000,000	173,827,400	0.06	0.75	0.94	1.00	1.00		

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Tahun ke					Anggaran	Realisasi
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas LLAJ	1,576,421,000	188,086,000	44,926,000	24,000,000	89,450,000	1,543,457,700	184,590,280	43,945,100	23,300,000	87,655,000	0.98	0.98	0.98	0.97	0.98		
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	813,131,200	1,153,884,350	1,151,750,600	1,105,039,900	999,272,600	761,387,500	1,060,648,625	1,106,086,152	1,080,946,370	977,197,100	0.94	0.92	0.96	0.98	0.9		
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	791,879,200	10,771,287,400	3,167,541,050	11,726,162,991	4,701,803,990	722,355,750	8,319,455,950	2,595,625,050	7,592,619,447	4,699,916,181	0.91	0.77	0.82	0.65	1.00		
Program Pemanfaatan potensi sektor pos dan Telekomunikasi	181,100,000					174,380,100					0.96						
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media masa	33,754,500					24,626,500					0.73						
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Informasi dan Komunikasi	30,880,000					26,365,000					0.85						
Program Kerjasama Informasi dan media Massa	271,540,800					204,938,800					0.75						
Program Pengembangan Teknologi Informatika	855,344,000					775,153,000					0.91						

Akuntabilitas kinerja keuangan pembangunan bidang perhubungan merupakan bagian dari akuntabilitas kinerja keuangan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika selama periode Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

2.4. Pendapatan

Secara umum baik target maupun realisasi anggaran pendapatan selama periode tersebut mengalami pasang surut. Tren peningkatan realisasi PAD Tahun 2016-2020 disajikan pada grafik di bawah ini :



Grafik Realisasi PAD Tahun 2016-2020

Capaian kinerja keuangan berdasarkan realisasi anggaran pendapatan selama Tahun 2016-2020 peningkatannya mengalami pasang surut. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal capaian yang terjadi pada kurun waktu tersebut, meskipun di tahun 2019 realisasinya melebihi target yang ditetapkan. Kondisi capaian yang dimaksud sebagai berikut:

Kondisi capaian Tahun 2016 :

- Secara global PAD Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa untuk Tahun 2016 mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu. Target yang dicapai pada tahun 2016 ini sebesar 44,73% dibandingkan pada Tahun 2015 yang mencapai target sebesar 66,34% yakni mengalami penurunan. Penurunan tersebut disebabkan oleh menurunnya retribusi pendapatan dari beberapa sektor meskipun sektor lainnya ada yang mencapai target serta beberapa kendala lainnya.
- Target Retribusi Jasa Umum yang ditetapkan sebesar Rp. 1.887.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 801.371.245,- atau 42,46%. Hal tersebut disebabkan karena beberapa retribusi pendapatan yang belum mencapai target diantaranya yaitu retribusi menara telekomunikasi. Pada tahun

2015 pencapaian retribusi menara telekomunikasi yaitu sebesar Rp. 1.394.914.346,- namun pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar Rp. 289.455.743,- hal ini disebabkan karena masih adanya piutang retribusi menara yang masih belum terselesaikan pada tahun 2014, selain itu untuk retribusi tahun 2016 belum dapat dilakukan penagihan kepada para provider selaku wajib retribusi, mengingat rancangan Perda Kabupaten Sumbawa tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2012 tentang retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagai dasar hukum untuk melakukan penagihan, belum diundangkan.

- Pada retribusi pengujian kendaraan bermotor target yang ditetapkan adalah sebesar Rp. 325.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 344.827.200,- atau 106,1% mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2015 dari segi target maupun realisasi. Kendati demikian hal ini belum dapat meningkatkan retribusi PAD secara keseluruhan karena banyak sektor-sektor lain yang masih jauh dari pencapaian target dari yang telah ditentukan.
- Sedangkan retribusi pelayanan parkir tidak mencapai target, dari yang ditargetkan sebesar Rp.200.000.000,- hanya terealisasi sebesar Rp.167.088.000,-. Hal tersebut disebabkan karena retribusi parkir tahun 2016 tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebab pada dasarnya setiap pungutan retribusi harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku. Terkait dengan retribusi pelayanan parkir maka sejak penentuan target retribusi haruslah diketahui berapa sesungguhnya potensi titik parkir yang ada untuk kemudian ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Sumbawa sebagai dasar pungutan retribusi parkir, dengan demikian Surat Keputusan Bupati Sumbawa tentang lokasi parkir idealnya harus ditetapkan setiap tahun seiring berkembangnya aktifitas masyarakat. Maka untuk tahun 2016 pungutan retribusi parkir tidak diatur dengan Keputusan Bupati Sumbawa karena Surat Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 940 Tahun 2011 hanya mengatur titik maupun pungutan retribusi parkir tahun 2011, hal ini disebabkan oleh fakta di lapangan bahwa banyak titik parkir yang berada diluar ketentuan yang berlaku sehingga bila ditetapkan sebagai lokasi parkir akan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 khususnya pasal 12 serta penjelasan pasal 38 PP 34 Tahun 2004. Terkait dengan aktifitas parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku,

maka Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa menyadari bahwa ketertiban dan keselamatan transportasi merupakan suatu hal yang prioritas, sehingga sepanjang tidak mengganggu lalu lintas maka aktifitas parkir tersebut dapat dimaklumi sekaligus mengurangi dampak sosial yang mungkin terjadi karena faktanya juru pungut atau masyarakat yang melakukan aktifitas parkir di lokasi dimaksud adalah warga sekitar lokasi tersebut. Sementara untuk parkir yang dipungut dititik parkir diluar ketentuan yang berlaku sebagaimana fakta di lapangan adalah dipergunakan untuk biaya operasional pengawas parkir sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Jasa Umum pada BAB XIV bagian ketiga pasal 71 yang berbunyi “pemanfaatan dari Penerima Retribusi Jasa Umum diutamakan untuk mendanai kegiatan langsung dengan penyelenggaraan jasa umum yang bersangkutan”.

- Target Retribusi jasa Usaha ditetapkan sebesar Rp.262.725.000,- terealisasi sebesar Rp.154.843.360,- Tidak mencapai target disebabkan karena tidak adanya peningkatan beberapa pos antara lain Sewa kios/MCK/PKL dan Retribusi terminal. Hal ini disebabkan karena seiring dengan perkembangan jaman dan majunya teknologi khususnya di bidang transportasi, masyarakat yang dulunya bepergian memakai angkutan umum (bus, angkot) naik dan turun di terminal sedangkan sekarang masyarakat banyak memakai kendaraan pribadi, lancarnya transportasi udara dan masih banyak moda-moda transportasi lain yang digunakan masyarakat sehingga berpengaruh kepada semua jenis penerimaan PAD pada Terminal Sumer Payung Sumbawa.
- Retribusi Ijin Trayek Target yang ditetapkan sebesar Rp.23.070.000,- terealisasi Rp.15.580.000,- atau 67,53% disebabkan karena kurangnya kesadaran Pemilik/Pengusaha Angkutan untuk memperpanjang Izin Trayek.

Kondisi capaian Tahun 2017 :

- Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa tahun anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 617.835.000,- realisasinya sebesar Rp. 534.553.200,- atau sebesar 86,52% dari target yang ditetapkan. Target pendapatan atau retribusi pada tahun 2017 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya karena di tahun 2017 ini tdk ada lagi Retribusi Pengendalian Menara telekomunikasi karena dinas

perhubungan komunikasi dan informatika terpisah menjadi dinas perhubungan dan dinas komunikasi dan informatika. Namun demikian realisasinya tetap berkurang dari target yang ditetapkan.

- Target retribusi jasa umum tahun 2017 ditetapkan sebesar Rp. 525.000.000,- terdiri dari retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dan Retribusi pengujian kendaraan bermotor. Adapun realisasi retribusi jasa umum sebesar 89,91% dari target yang ditetapkan atau sebesar Rp. 472.020.000,- dengan rincian realisasi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebesar 36,89% dari target atau sebesar Rp. 73.770.000 dan realisasi retribusi pengujian kendaraan bermotor sebesar 122,54% dari target atau sebesar Rp. 398.250.000,-. Rendahnya realisasi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, sebesar 36,89% dari target yang ditetapkan, salah satunya disebabkan oleh retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum tahun 2017 dipungut dan disetor ke Kas Daerah mulai tanggal 31 Mei s/d 31 Desember 2017, hal ini disebabkan oleh kompensasi yang diberikan kepada pihak ketiga (pemenang beauty contest pengelola perparkiran tahun 2016) untuk melaksanakan pengelolaan perparkiran mulai 1 Januari s/d 30 Mei 2017 yang dimaksudkan untuk mengganti uang kesungguhan pemenang beauty contest pengelola perparkiran tahun 2016 sebesar Rp. 40.500.000,- yang terlanjur dicatat dan disetor ke Kas Daerah sebagai realisasi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum tahun 2016 sehingga jumlah kewajiban pemenang beauty contest pengelola perparkiran tahun 2016 melebihi jumlah yang disepakati.
- Target retribusi jasa usaha tahun 2017 ditetapkan sebesar Rp. 69.765.000,- terdiri dari retribusi sewa kios/MCK/PKL, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, dan retribusi pelayanan kepelabuhanan. Realisasi retribusi jasa usaha sebesar 80,71% dari target yang ditetapkan atau sebesar Rp. 56.307.140,- dengan rincian realisasi retribusi sewa kios/MCK/PKL sebesar 19,64% dari target atau sebesar Rp. 1.650.000,- realisasi retribusi terminal sebesar 38,13% dari target atau sebesar Rp. 6.520.000,- realisasi retribusi tempat khusus parkir sebesar 91,88% atau sebesar Rp. 24.748.940, dan realisasi retribusi pelayanan kepelabuhanan sebesar 134,97% dari target atau sebesar Rp. 23.388.200. Rendahnya realisasi retribusi sewa kios/MCK/PKL dan retribusi terminal disebabkan oleh pungutan retribusi sewa kios/MCK/PKL dan retribusi terminal dilaksanakan di Terminal Type C (terminal Empang) dimana

retribusi sewa kios/MCK/PKL dan retribusi terminal baru dapat dipungut dan disetor ke Kas Daerah pada bulan Juni 2017.

Kondisi capaian Tahun 2018 :

- Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa tahun anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 616.965.000,- realisasinya sebesar Rp. 596.298.200,- atau sebesar 96,65% dari target yang ditetapkan. Secara rinci target dan realisasi pendapatan tersebut disajikan pada tabel berikut.
- Retribusi Jasa Umum Target retribusi jasa umum tahun 2018 ditetapkan sebesar Rp. 550.000.000,- terdiri dari retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dan Retribusi pengujian kendaraan bermotor. Adapun realisasi retribusi jasa umum sebesar 95,46% dari target yang ditetapkan atau sebesar Rp. 525.047.500,- dengan rincian realisasi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebesar 60,72% dari target atau sebesar Rp. 121.445.000 dan realisasi retribusi pengujian kendaraan bermotor sebesar 115,32% dari target atau sebesar Rp. 403.602.500,-. Rendahnya realisasi retribusi parkir disebabkan oleh lemahnya pengawasan dan system yang belum sepenuhnya berjalan, hal ini dapat teridentifikasi dari beberapa temuan inspektorat Kabupaten Sumbawa yang segera ditindak lanjuti untuk perbaikan dimasa yang akan datang.
- Retribusi Jasa Usaha Target retribusi jasa usaha tahun 2018 ditetapkan sebesar Rp. 66.965.000,- terdiri dari retribusi sewa kios/MCK/PKL, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, dan retribusi pelayanan kepelabuhanan. Realisasi retribusi jasa usaha sebesar 106,40% dari target yang ditetapkan atau sebesar Rp. 71.250.700,- dengan rincian realisasi retribusi sewa kios/MCK/PKL sebesar 27,50% dari target atau sebesar Rp. 330.000,- realisasi retribusi terminal sebesar 32,16% dari target atau sebesar Rp. 5.500.000,- realisasi retribusi tempat khusus parkir sebesar 169,02% atau sebesar Rp. 45.530.000,- dan realisasi retribusi pelayanan kepelabuhanan sebesar 91,54% dari target atau sebesar Rp. 19.890.700,-. Rendahnya realisasi retribusi sewa kios/MCK/PKL dan retribusi terminal disebabkan oleh pungutan retribusi sewa kios/MCK/PKL dan retribusi terminal dilaksanakan di Terminal Type C (terminal Empang) dimana retribusi sewa kios/MCK/PKL dan retribusi terminal belum efektif dalam pelaksanaannya hal ini disebabkan salah satunya kurangnya tenaga/pegawai di Terminal Empang.

Kondisi capaian Tahun 2019 :

- Retribusi Jasa Umum Target retribusi jasa umum tahun 2019 ditetapkan sebesar Rp. 600.000.000,- terdiri dari retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dan Retribusi pengujian kendaraan bermotor. Adapun realisasi retribusi jasa umum sebesar 89,20% dari target yang ditetapkan atau sebesar Rp. 535.199.150,- dengan rincian realisasi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebesar 78,85% dari target atau sebesar Rp. 157.695.000 dan realisasi retribusi pengujian kendaraan bermotor sebesar 94,38% dari target atau sebesar Rp. 377.504.150,-. Rendahnya realisasi retribusi parkir disebabkan oleh lemahnya pengawasan dan system yang belum sepenuhnya berjalan, hal ini dapat teridentifikasi dari beberapa temuan inspektorat Kabupaten Sumbawa yang segera ditindak lanjuti untuk perbaikan dimasa yang akan datang.
- Retribusi Jasa Usaha Target retribusi jasa usaha tahun 2019 ditetapkan sebesar Rp. 80.800.000,- terdiri dari retribusi sewa kios/MCK/PKL, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, dan retribusi pelayanan kepelabuhanan. Realisasi retribusi jasa usaha sebesar 101,82% dari target yang ditetapkan atau sebesar Rp.82.267.283,- dengan rincian realisasi retribusi sewa kios/MCK/PKL sebesar 47,50% dari target atau sebesar Rp. 570.000,- realisasi retribusi terminal sebesar 47,60% dari target atau sebesar Rp. 8.140.000,- realisasi retribusi tempat khusus parkir sebesar 109,50% atau sebesar Rp. 43.800.000,- dan realisasi retribusi pelayanan kepelabuhanan sebesar 132,25% dari target atau sebesar Rp. 29.757.283,-. Rendahnya realisasi retribusi sewa kios/MCK/PKL dan retribusi terminal disebabkan oleh pungutan retribusi sewa kios/MCK/PKL dan retribusi terminal dilaksanakan di Terminal Type C (terminal Empang) dimana retribusi sewa kios/MCK/PKL dan retribusi terminal belum efektif dalam pelaksanaannya hal ini disebabkan salah satunya kurangnya tenaga/pegawai di Terminal Empang.

Kondisi capaian Tahun 2020 :

- Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa tahun anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 530.800.000,- realisasinya sebesar Rp. 599.269.372,- atau sebesar 112,90% dari target yang ditetapkan.
- Retribusi Jasa Umum Target retribusi jasa umum tahun 2020 ditetapkan sebesar Rp. 450.000.000,- terdiri dari retribusi pelayanan parkir di tepi

jalan umum dan Retribusi pengujian kendaraan bermotor. Adapun realisasi retribusi jasa umum sebesar 109,43% dari target yang ditetapkan atau sebesar Rp. 492.453.950,- dengan rincian realisasi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebesar 127,42% dari target atau sebesar Rp. 191.125.000,- dan realisasi retribusi pengujian kendaraan bermotor sebesar 100,44% dari target atau sebesar Rp. 301.328.950,-. Sejak bulan November 2020 hingga Desember 2020 target untuk retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum diturunkan yang semula sebesar Rp. 200.000.000,- menjadi Rp. 150.000.000,- sedangkan target retribusi pengujian kendaraan bermotor juga diturunkan dari Rp. 400.000.000,- menjadi Rp. 300.000.000,- Berkurangnya target disebabkan karena pertimbangan adanya pandemi covid-19 yang membatasi warga untuk keluar rumah.

- Retribusi Jasa Usaha Target retribusi jasa usaha tahun 2020 ditetapkan sebesar Rp. 80.800.000,- terdiri dari retribusi sewa kios/MCK/PKL, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, dan retribusi pelayanan kepelabuhanan. Realisasi retribusi jasa usaha sebesar 132,20% dari target yang ditetapkan atau sebesar Rp. 106.815.422,- dengan rincian realisasi retribusi sewa kios/MCK/PKL sebesar 100,83% dari target atau sebesar Rp. 1.210.000,- realisasi retribusi terminal sebesar 100,23% dari target atau sebesar Rp. 17.140.000,- realisasi retribusi tempat khusus parkir sebesar 1135,63% atau sebesar Rp. 54.250.000,- dan realisasi retribusi pelayanan kepelabuhanan sebesar 152,07% dari target atau sebesar Rp. 34.215.422,-.
- Dari penjelasan di atas terlihat bahwa Realisasi Pendapatan untuk tahun 2020 telah melampaui target, baik itu Retribusi Jasa Umum maupun Retribusi Jasa Usaha.

2.5. Belanja

Target dan realisasi anggaran belanja pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2020 seperti disajikan pada tabel TC-24, dari tahun ke tahun relatif mengalami naik turun/pasang surut. Hal tersebut dikarenakan alokasi anggaran untuk dinas perhubungan tergantung kondisi keuangan daerah. Anggaran belanja digunakan untuk melaksanakan program/kegiatan yang terdiri dari program/kegiatan rutin dan program/kegiatan prioritas. Perkembangan realisasi belanja, baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada

gambar di bawah ini :



Grafik Realisasi Belanja Tahun 2016-2020

2.6. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan bidang perhubungan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa selama Tahun 2016-2020 adalah:

- a) Kinerja pelayanan bidang perhubungan dititik beratkan pada kinerja pelayanan penyelenggaraan transportasi di Kabupaten Sumbawa. Secara umum tujuan dari penyelenggaraan transportasi adalah mewujudkan pelayanan transportasi yang aman, nyaman dan selamat. Selama kurun waktu Tahun 2016-2021 pelayanan transportasi terus ditingkatkan baik dari sisi kesiapan sarana prasarana maupun dari sisi pengguna jasa transportasi. Ditinjau dari sisi kesiapan sarana dan prasarana perhubungan diperlukan evaluasi secara menyeluruh berdasarkan regulasi yang ada sehingga sarana dan prasarana sesuai dengan yang dipersyaratkan. Dari sisi pengguna jalan, Tantangan menuju angka kecelakaan nol (*zero accident*) terutama disebabkan disiplin pengguna jalan yang masih rendah, memerlukan usaha tersendiri untuk memecahkannya baik melalui pendidikan kesadaran berlalu lintas bagi pengguna jalan khususnya generasi muda maupun melalui penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran lalu lintas yang terjadi.
- b) Pembangunan infrastruktur Bidang Perhubungan
Pembangunan infrastruktur perhubungan akan sangat berperan dalam proses pembangunan daerah. Tersedianya infrastruktur perhubungan akan membuka konektivitas antar wilayah dan mempercepat pembangunan ekonomi daerah. Hingga akhir tahun 2021, infrastruktur transportasi di Kabupaten Sumbawa masih perlu ditingkatkan. Kebutuhan ketersediaan terminal Type C di tiga Kecamatan (Kec. Plampang, Kec Utan, dan Kec. Alas)

sangat penting sebagai antisipasi pengembangan wilayah kota, perlunya terminal barang agar truk/angkutan barang tidak masuk ke dalam kota, rusaknya dermaga pelabuhan Alas perlu mendapat perhatian serius pada kurun waktu 2021-2026. Pembangunan infrastruktur, khususnya di bidang perhubungan dimungkinkan dilaksanakan secara lebih komprehensif dan terencana dengan melibatkan semua pihak terutama peran optimal Forum Lalu Lintas di Kabupaten Sumbawa.

c) Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa, salah satunya mengamanatkan pembentukan organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib tidak terkait dengan pelayanan dasar bidang perhubungan. Dengan demikian pembangunan bidang perhubungan menjadi semakin mendapat perhatian seiring dengan terbentuknya Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa dimana tugas pokoknya adalah membantu Bupati Sumbawa melaksanakan kewenangan otonomi daerah bidang perhubungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 64 Tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa. Hal tersebut merupakan peluang pengembangan pelayanan bidang perhubungan, khususnya dalam mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dapat disebutkan bahwa yang disebut sebagai permasalahan PD adalah kesenjangan antara kinerja PD yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai PD di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Berbagai permasalahan PD tersebut menjadi hal penting yang akan menjadi dasar penentuan isu strategis bagi PD. Isu strategis itu sendiri merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam penyusunan dokumen perencanaan PD karena akan memiliki dampak yang cukup signifikan bagi PD dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi PD di masa yang akan datang.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa yang terkait dengan Pelayanan atau penyelenggaraan tugas dan fungsi telah disinkronisasikan dengan hasil identifikasi permasalahan daerah pada sub urusan penunjang dalam rancangan awal RPJMD Kabupaten Sumbawa. Maka berbagai permasalahan pelayanan dan penyelenggaraan tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawaserta factor-faktor yang mempengaruhinya disajikan dengan memperhatikan hasil isian Tabel T-B.35 dalam Ranwal RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026, seperti dibawah ini:

TABEL T-B.35

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa

No	Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah	
(1)	(2)	(3)		(4)	
1	Kualitas Infrastruktur belum sepenuhnya dalam kondisi	1	Konektifitas antar wilayah masih memerlukan upaya	1	Belum optimalnya manajemen transportasi
				2	Sarana prasarana transportasi darat dan laut masih kurang

baik, sehingga diperlukan upaya peningkatan kualitas dan layanan infrastruktur terutama untuk mendukung Layanan Dasar dan Peningkatan Perekonomian masyarakat di Kabupaten Sumbawa	penyediaan dan pengembangan terhadap infrastruktur	3	Konektivitas antar moda transportasi masal yang menghubungkan destinasi wisata, simpul perekonomian dan simpul pendidikan belum terbangun.
		4	Frekuensi penerbangan dari dan ke Sumbawa masih rendah.
		5	Belum tersusunnya Rencana Induk jaringan lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Uraian masalah pokok pada Tabel T-B.35 dalam RPJMD di atas merupakan Perumusan Masalah pokok yang bersifat makro bagi daerah yang akan dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan dan sasaran. Uraian masalah merupakan perumusan masalah yang ditentukan dengan cara mencari beberapa penyebab dari masalah pokok yang lebih spesifik dan dipecahkan atau diselesaikan melalui pilihan-pilihan strategi. Uraian akar masalah merupakan perumusan akar masalah yang ditentukan dengan mencari beberapa penyebab dari masalah yang lebih rinci dan dipecahkan/diselesaikan melalui pilihan arah kebijakan atau kebijakan umum. Perhatikan isi Tabel T-B.35 dalam rancangan awal RPJMD, maka berikut ini adalah beberapa klasifikasi permasalahan dalam Pelayanan dan/atau penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu:

TABEL T-B.35a
Pemetaan Permasalahan terkait Pelayanan/ Penyelenggaraan Urusan sesuai Tugas dan Fungsi
Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa

No	Masalah	Akar Masalah	
1	Ketersediaan Sarpras LLAJ dan Penyelenggaraan LLAJ yang memenuhi standar belum optimal	1	Masih minimnya ketersediaan sarana dan prasarana Jalan Kewenangan Kabupaten
		2	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C belum optimal
		3	Penerbitan ijin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir belum optimal
2	Manajemen penyelenggaraan LLAJ belum optimal	1	Pengujian berkala kendaraan bermotor
		2	Audit dan Inspeksi Keselamatan

		3	LLAJ di jalan
		4	Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan dalam satu kabupaten/kota
		4	Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah kabupaten
3	Pengembangan dan Keselamatan Penyelenggaraan LLAJ belum optimal	1	Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek serta angkutan perkotaan dan pedesaan dalam satu daerah kabupaten/kota
4	Penyelenggaraan dan Ketersediaan Sarpras Pelayaran belum optimal	1	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal
5	Penyediaan Manajemen Pengelolaan Pelayaran belum optimal	1	Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam daerah kabupaten/kota dan beroperasi pada lintas pelabuhan di daerah kabupaten/ kota
6	Penyediaan Pengembangan dan Keselamatan Pelayaran belum optimal	1	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota

Akar masalah pada Tabel T.B-35a pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa terkait dengan kualitas Sarana dan Prasarana. Masalah dan akar masalah pada tabel di atas akan berkaitan dengan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah yang akan disajikan dalam Tabel T.C-26 pada bagian berikutnya dalam dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 ini.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi

Tugas dan fungsi Dinas Perhubungan yang terkait dengan pencapaian visi, melalui pelaksanaan misi-misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih didasarkan pada Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 64 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan. Tugas pokok Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa adalah membantu Bupati Sumbawa melaksanakan kewenangan otonomi daerah bidang perhubungan.

Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Sumbawa periode 2021-2026, mengusung Visi Pembangunan Kabupaten Sumbawa "Terwujudnya

Sumbawa Gemilang Yang Berkeadaban”. “Sumbawa gemilang” bermakna bahwa Kabupaten Sumbawa harus menjadi daerah yang memiliki daya saing kuat serta mampu berkompetisi baik di tingkat regional, nasional maupun internasional; dan “berkeadaban” yang mengandung makna bahwa masyarakat Sumbawa harus mampu memegang teguh agama dan nilai-nilai positif dari budaya lokal dalam kehidupan sehari-hari sehingga terbentuk kehidupan masyarakat sejahtera secara spiritual; penuh dengan kedamaian, persahabatan dan rasa kekeluargaan dalam menjalankan kehidupannya sebagai warga negara; kebutuhan sandang, pangan dan papan telah tersedia dan terdistribusi secara cukup.

Misi

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih akan dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) misi, sebagai berikut:

SUMBAWA BERSIH DAN MELAYANI

Menciptakan birokrasi pemerintahan yang bersih (anti Korupsi), cepat dan bermutu, memberikan kepastian serta pelayanan yang cepat dan efisien.

SUMBAWA SEJAHTERA DAN MANDIRI

Mempercepat penurunan kemiskinan, meningkatkan nilai tambah sektor agribisnis, Industri dan pariwisata.

SUMBAWA SEHAT DAN CERDAS

Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daerah yang maju melalui peningkatan derajat pendidikan dan kesehatan.

SUMBAWA AMAN DAN BERBUDAYA

Mewujudkan masyarakat yang beriman, berkeadilan, terlaksananya ketentraman dan ketentuan umum dan terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan.

SUMBAWA TANGGUH DAN BERKELANJUTAN

Pengembangan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah serta meningkatkan ketahanan terhadap bencana perubahan iklim melalui pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kab. Sumbawa dalam melaksanakan pembangunan bidang perhubungan di Kabupaten Sumbawa sesuai kebijakan pembangunan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah mewujudkan visi dengan melaksanakan Misi V (kelima) :

“*SUMBAWA TANGGUH DAN BERKELANJUTAN*, Pengembangan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah serta meningkatkan ketahanan terhadap bencana perubahan iklim melalui pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan”.

Dilaksanakan sesuai tujuan, sasaran serta strategi dan arah kebijakan yang digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Sumbawa Tahun 2021-2026.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan OPD Provinsi

a. Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan RI Tahun 2020-2024

Berdasarkan Sasaran strategis pembangunan Kementrian Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan Peraturan Menteri Nomor 80 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahunan 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- Terwujudnya Konektivitas Nasional
- Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi
- Meningkatnya Keselamatan Transportasi
- Meningkatnya Kualitas SDM Transportasi yang Kompeten
- Meningkatnya Kualitas Tata Kelola kebijakan, Regulasi dan Hukum
- Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian
- Meingkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
- Meningkatnya Transportasi Berkelanjutan.

b. Telaahan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi NTB Tahun 2019-2023

Sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

- Meningkatnya Konektivitas Layanan Transportasi
- Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat

Penyajian dan penelahaan terhadap sasaran dalam rencana strategis Kementerian Perhubungan dan sasaran dalam rencana strategis Dinas Perhubungan Provinsi Provinsi Nusa Tenggara Barat disajikan dalam bentuk matrik sehingga mudah diidentifikasi poin-poin yang dapat menjadi faktor pendorong dan/atau penghambat terhadap pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa, sebagai berikut:

No	Sasaran		Faktor	
	Kementerian Perhubungan 2020-2024	Dinas Perhubungan Provinsi NTB 2020-2024	+	-
1	Terwujudnya Konektivitas Nasional	Meningkatnya Konektivitas Layanan Transportasi	√	
2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi		√	
3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	√	
4	Meningkatnya Kualitas SDM Transportasi yang Kompeten		√	
5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola kebijakan, Regulasi dan Hukum		√	
6	Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian		√	
7	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik		√	
8	Meningkatnya Transportasi Berkelanjutan.		√	

Kesimpulan:

Memperhatikan sasaran-sasaran K/L di atas, maka secara umum memiliki korelasi dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa. Oleh karena itu sasaran-sasaran yang telah ditentukan di atas menjadi faktor pendorong pelaksanaan pelayanan atau penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Sumbawa

a. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Kabupaten Sumbawa telah menetapkan Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2021. RTRW berkedudukan sebagai pedoman antara lain bagi penyusunan rencana pembangunan, yaitu memberi pedoman bagi pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor, antar-daerah, dan antar pemangku kepentingan; penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan

penataan ruang kawasan strategis kabupaten.

b. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan program (KRP), melalui antisipasi kemungkinan dampak negatif KRP terhadap lingkungan hidup dan mengevaluasi sejauh mana KRP yang akan diterbitkan berpotensi: meningkatkan risiko perubahan iklim, meningkatkan kerusakan, kemerosotan atau kepunahan keanekaragaman hayati, meningkatkan intensitas bencana banjir, longsor, kekeringan dan/atau kebakaran hutan dan lahan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, menurunkan mutu dan kelimpahan sumber daya alam terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, mendorong perubahan penggunaan dan/atau alih fungsi kawasan hutan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, meningkatkan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keber-lanjutan penghidupan (*livelihood sustainability*) sekelompok masyarakat dan/atau meningkatkan resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

KLHS merupakan amanat dari Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 15 ayat (1) dimana Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Dalam Pasal yang sama ayat (2) juga dinyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rincinya Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional, provinsi dan kabupaten/kota; dan kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah Kajian yang harus dilakukan Pemerintah Daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tertuang dalam UU No. 32 Taun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan suatu wilayah, serta

penyusunan kebijakan dan program pemerintah.

Terkait dengan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa, guna mengantisipasi dampak negatif dari penyelenggaraan transportasi berupa perubahan iklim, dan pencemaran lingkungan, setiap angkutan umum yang melaksanakan uji KIR dilakukan serangkaian test uji emisi yang ditujukan untuk menentukan tingkat wajar gas buang suatu kendaraan, demikian halnya dengan pembangunan sarana/prasarana beberapa diantaranya telah dilengkapi dengan dokumen lingkungan yaitu dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup-upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL).UKL-UPL merupakan perangkat pengelolaan lingkungan hidup untuk pengambilan keputusan dan dasar menerbitkan ijin melakukan usaha dan atau kegiatan.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

3.5.1 Metoda penentuan isu-isu strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan PD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar kedalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka Panjang. Isus strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi kekuatan dan kelemahan dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsi maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan tantangan bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa di masa lima tahun mendatang.

3.5.2 Hasil Penentuan Isu-isu Strategis

Isu pembangunan bidang perhubungan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan dijabarkan sebagai berikut :

- a. Pelayanan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan dipandang penting menjadi perhatian untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan transportasi secara efektif dan efisien. Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan dilaksanakan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas; rekomendasi dan perijinan bidang transportasi dilaksanakan secara terpadu dengan mengikuti standar pelayanan yang ada antara lain untuk pelayanan uji KIR angkutan umum, ijin trayek, ijin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek (taksi dan angkutan kawasan tertentu), perizinan dan rekomendasi perizinan perhubungan laut. Demikian halnya dengan ketersediaan data, disamping ketersediannya penting untuk diperhatikan validitasnya seperti data arus penumpang (multi-moda) dan data arus barang (multi-moda), serta data terkait lainnya. Pelayanan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan dititikberatkan pada penyelenggaraan transportasi yang aman, nyaman dan selamat yang melibatkan kesiapan SDM dan stakeholder dibidang transportasi, untuk itu pembinaan SDM dan stakeholder merupakan salah satu isu yang penting diperhatikan.
- b. Pembangunan infrastruktur bidang perhubungan hingga Tahun 2020 dirasakan belum cukup memadai sehingga memerlukan perhatian dalam upaya pengembangannya. Infrastruktur bidang perhubungan meliputi sarana dan prasarana perhubungan : alat pengujian Kendaraan bermotor, terminal Tipe C , shelter, posjaga/pos-pantau, portal/palang lintasan, dermaga/tambatan perahu. Fasilitas keselamatan transportasi atau perlengkapan jalan seperti marka jalan, rambu lalu lintas, pagar pengaman jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), cermin tikungan, Zona Selamat Sekolah (ZoSS).

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN

Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mendefinisikan tujuan sebagai sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun, sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil PD yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program PD. Sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran pemerintah daerah yang tertuang dalam RPJMD, penentuan tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa berfokus terhadap indikator sasaran daerah yang berkesuaian dengan kewenangan, yaitu yang terkait dengan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan public melalui gerakan atau program reformasi birokrasi pada 8 (delapan) area perubahan. Dengan demikian maka tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan/pelaksanaan tugas/Fungsi/kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa sebagaimana tercantum dalam Tabel T-C.25 sebagai berikut:

Tabel T-C.25.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan/Pelaksanaan Tugas/Fungsi/Kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun

No.	Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator PD	Target Kinerja Tujuan / sasaran pada Tahun ke-					
				1	2	3	4	5	
1	Meningkatkan kualitas infrastruktur dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan reformasi birokrasi		Nilai Reformasi Birokrasi	51.32	51.91	52.50	55.00	57.50	
			Meningkatnya Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja PD	Kategori Predikat Hasil evaluasi AKIP Dinas Perhubungan	BB	BB	BB	BB	A
				Peningkatan infrastruktur dalam kondisi baik	86%	86.5%	87%	87.5%	88%
			Meningkatnya kualitas infrastruktur perhubungan	Rasio Konektivitas kabupaten	85,15	85,40	85,65	85,9	86,15

Tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa di atas dimaksudkan untuk memberikan kontribusi kepada sasaran pemerintah daerah yaitu meningkatnya kualitas infrastruktur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diselenggarakan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa adalah membantu Bupati Sumbawa melaksanakan kewenangan otonomi daerah bidang perhubungan. Maka nomenklatur tujuan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Sumbawa telah ditentukan dalam rangka mendukung pelaksanaan misi kelima dari Bupati/Wakil Bupati Sumbawa periode 2021-2026.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memperhatikan ketentuan Pasal 1 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Strategi di definisikan sebagai suatu langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Sementara itu, Arah Kebijakan dimaksudkan sebagai suatu rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Berdasarkan tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa beserta indikator dan targetnya, maka selanjutnya dilaksanakan penentuan strategi dan arah kebijakan yang akan mengarahkan pada ketercapaian dari target yang telah ditentukan pada Tabel TC-26 selaras dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, sebagai berikut:

Tabel T-C.26.

Hubungan antara Visi, Misi KDH/WKDH dengan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa

Visi : Sumbawa Gemilang yang Berkeadaban			
Misi 3 : Sumbawa Bersih dan Melayani			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan reformasi birokrasi	1 Meningkatkan Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	1 Optimalisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kewenangan Dinas Perhubungan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD 2 Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Administrasi Keuangan PD 3 Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada PD 4 Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Administrasi Kepegawaian PD 5 Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Administrasi Umum PD 6 Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan

			<p>dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada PD</p> <p>7 Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada PD</p> <p>8 Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada PD</p>
Misi 5	: Sumbawa Tangguh dan Berkelanjutan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mengoptimalkan Peningkatan kualitas Infrastruktur	1 Meningkatkan kualitas infrastruktur Perhubungan	<p>1 Penyediaan Sarpras LLAJ dan Penyelenggaraan LLAJ sesuai standar teknis</p> <p>2 optimalisasi Manajemen penyelenggaraan LLAJ</p> <p>3 optimalisasi Pengembangan dan Keselamatan Penyelenggaraan LLAJ</p> <p>4 Optimalisasi Penyelenggaraan dan Ketersediaan Sarpras Pelayaran</p> <p>5 Optimalisasi Penyediaan Manajemen Pengelolaan Pelayaran</p> <p>6 Optimalisasi Penyediaan Pengembangan dan Keselamatan Pelayaran</p>	<p>1 Menyediakan sarpras jalan kewenangan kabupaten yang sesuai standar teknis</p> <p>2 Mengoptimalkan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</p> <p>3 Mengoptimalkan Fasilitasi Penerbitan ijin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir</p> <p>1 Mengoptimalkan Pelaksanaan Pengujian berkala kendaraan bermotor</p> <p>2 Mengoptimalkan Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di jalan</p> <p>3 Menyediakan Rancangan Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan dalam kabupaten Sumbawa</p> <p>4 Memfasilitasi Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten</p> <p>1 Menyediakan rancangan dokumen Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek serta angkutan perkotaan dan pedesaan dalam daerah</p> <p>1 Melaksanakan Pembangunan, Fasilitasi Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpulan Lokal</p> <p>1 Memfasilitasi Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam daerah kabupaten dan beroperasi pada lintas pelabuhan di daerah</p> <p>1 Menyediakan rancangan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah</p>

Berdasarkan uraian pada tabel di atas, maka berbagai strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa selanjutnya dioperasionalkan dalam program-program yang telah disebutkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026, yaitu:

- a. Program administrasi umum/program penunjang urusan pemerintahan daerah
- b. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
- c. Program Pengelolaan Pelayaran.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, menyebutkan bahwa program merupakan suatu penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah diperbarui melalui penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Sumbawa umunya dan Dinas Perhubungan pada khususnya telah melakukan penyesuaian sebagaimana amanat kebijakan pemerintah sebagaimana tertuang dalam regulasi di atas dalam aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) sebagai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Program pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa merupakan program pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mendukung pelaksanaan misi kelima yaitu sumabawa tangguh dan berkelanjutan untuk mencapai visi Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 yaitu Mewujudkan Sumbawa Gemilang yang Berkeadaban sebagaimana disebutkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026. Setiap program memiliki sejumlah kegiatan dimana setiap kegiatan merupakan serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program. Selanjutnya setiap kegiatan terdiri dari sejumlah sub kegiatan yang merupakan serangkaian aktivitas belanja yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan sub keluaran (*suboutput*) dalam rangka mencapai keluaran (*output*) suatu kegiatan. Adapun rencana program, kegiatan/sub kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa periode Tahun 2021-2026 disajikan pada T-C.27.

Tabel T-C.27
Rencana Program, Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan
Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026

Tujuan PD	Sasaran n PD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kode	IK Tujuan (x), Sasaran (xx), Program (xxx), Kegiatan (xxxx) & Sub Kegiatan (xxxxx)	Sasaran Kinerja	NSPK Indikator	Formulasi	Satuan	Sumber/Penyedia Data	Pelaksana/Penganggung jawab	Objek Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi						
															2021		2022		2023		2024		2025		target	Rp			target	Rp	target	Rp	target	Rp
															(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			(18)					
MENINGKATKAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DENGAN PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGARAAN REFORMASI BIROKRASI					1	Peningkatan Nilai Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Reformasi Birokrasi Dinas Perhubungan	Perda 2/2021 tentang RPJMD		Nilai	Bappeda	Kadis	Dokumen Hasil Evaluasi NSPK	-	51.32	4,865,839,155	51.91	4,876,275,198	52.50	5,197,884,539	55.00	5,139,144,968	57.50	5,396,102,216	57.50	5,396,102,216	10	Dinas Perhubungan						
					1.1	Kategori Predikat Hasil evaluasi AKIP Dinas Perhubungan	Meningkatnya kategori predikat hasil evaluasi AKIP Dinas Perhubungan	Permenpan RB 89/2021	Kategori Predikat Hasil evaluasi AKIP Dinas Perhubungan tahun n-1	Nilai	Inspektorat	Kadis	LHE AKIP Dishub tahun n-1	8	BB	4,865,839,155	88	4,876,275,198	88	5,197,884,539	88	5,139,144,968	A	5,396,102,216	A	5,396,102,216	10	Dinas Perhubungan						
				(1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.1.1	Peningkatan Nilai AKIP Dinas Perhubungan	Meningkatnya Nilai AKIP Dinas Perhubungan	Permenpan RB 89/2021	Nilai Hasil evaluasi AKIP Dinas Perhubungan tahun n-1	Nilai	Inspektorat	Sekdis	LHE AKIP Dishub tahun n-1	70.00	70.12	4,865,839,155	72.00	4,876,275,198	74.00	5,197,884,539	76.00	5,139,144,968	80.01	5,396,102,216	80.01	5,396,102,216	10	Dinas Perhubungan						
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Jumlah Target Pendapatan Daerah Kewenangan PD Tahun n	Tercapainya Target Pendapatan Daerah Kewenangan PD	Perbup nomor 24 tahun 2022		Rupiah	Sekretariat	Sekdis	Pendapatan Daerah Kewenangan PD	#####	#####	-	676,530,800	-	1,305,500,000	-	1,322,471,500	10,000,000	1,339,663,630	10,500,000	1,339,663,630	10,500,000	10,500,000	10	Dinas Perhubungan					
				Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Kepmendagri 050-SBB8 tahun 2021	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah yang disusun Tahun n	Dokumen	Sekretariat	Sekdis	Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	1	5,000,000	1	5,250,000	1	5,250,000	1	5,250,000	10	Dinas Perhubungan				
				Analisis dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Tersedianya Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Kepmendagri 050-SBB8 tahun 2021	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah yang disusun Tahun n	Dokumen	Sekretariat	Sekdis	Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	1	5,000,000	1	5,250,000	1	5,250,000	1	5,250,000	10	Dinas Perhubungan				
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.1.1.1	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja sub kegiatan tahun 2021	Kepmendagri 050-SBB8 tahun 2021	Jumlah dokumen yang dihasilkan dari semua sub kegiatan tahun n	Dokumen	Sekretariat	Sekdis	Dokumen pelaksanaan kegiatan	7	7	44,905,000	7	74,601,997	7	62,781,200	7	71,484,994	7	75,059,244	7	75,059,244	7	75,059,244	10	Dinas Perhubungan				
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.1.1.1.1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Kepmendagri 050-SBB8 tahun 2021	Jumlah dokumen yang dihasilkan dari sub kegiatan	Dokumen	Sekretariat	Sekdis	Renstra, Renja & Dokumen Penjenjangan Kinerja	1	1	20,050,000	1	30,642,000	1	19,792,200	1	23,979,375	1	25,178,344	1	25,178,344	1	25,178,344	10	Dinas Perhubungan				
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.1.1.1.2	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kepmendagri 050-SBB8 tahun 2021	Jumlah dokumen Perencanaan PD yang disusun tahun n	Dokumen	Sekretariat	Sekdis	Dokumen RKA	1	1	260,000	1	2,002,000	1	12,994,000	1	2,207,205	1	2,317,565	1	2,317,565	1	2,317,565	10	Dinas Perhubungan				
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.1.1.1.3	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kepmendagri 050-SBB8 tahun 2021	Jumlah dokumen yang dihasilkan dari sub kegiatan	Dokumen	Sekretariat	Sekdis	Dokumen RKA Perubahan / Pergeseran	1	1	260,000	1	854,000	1	1,504,000	1	941,515	1	988,612	1	988,612	1	988,612	10	Dinas Perhubungan				
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.1.1.1.4	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kepmendagri 050-SBB8 tahun 2021	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD yang disusun tahun n	Dokumen	Sekretariat	Sekdis	Dokumen DPA	1	1	23,620,000	1	27,269,000	1	9,975,000	1	31,442,198	1	33,014,307	1	33,014,307	1	33,014,307	10	Dinas Perhubungan				
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.1.1.1.5	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kepmendagri 050-SBB8 tahun 2021	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun tahun n	Dokumen	Sekretariat	Sekdis	Dokumen Perubahan/ pergeseran DPA	1	1	195,000	1	650,997	1	2,968,000	1	717,724	1	753,610	1	753,610	1	753,610	10	Dinas Perhubungan				
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.1.1.1.6	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kepmendagri 050-SBB8 tahun 2021	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun tahun n	Laporan	Sekretariat	Sekdis	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	2	260,000	1	2,613,000	2	5,278,000	2	2,880,893	2	3,024,874	2	3,024,874	2	3,024,874	10	Dinas Perhubungan				
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.1.1.1.7	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PD	Tersedianya Evaluasi Kinerja PD	Kepmendagri 050-SBB8 tahun 2021	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja PD yang disusun tahun n	Laporan	Sekretariat	Sekdis	UKJP	1	1	360,000	1	10,571,000	1	10,270,000	1	9,316,125	1	9,781,931	1	9,781,931	1	9,781,931	10	Dinas Perhubungan				
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.1.1.1.2	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan PD	Tersedianya dokumen administrasi keuangan Dinas Perhubungan	Kepmendagri 050-SBB8 tahun 2021	Jumlah dokumen sub kegiatan yang dilaksanakan tahun n	Dokumen	Sekretariat	Sekdis	Dokumen pelaksanaan sub kegiatan	4	6	4,374,342,428	6	4,439,372,113	6	4,784,883,039	6	4,651,423,783	6	4,883,994,972	6	4,883,994,972	6	4,883,994,972	10	Dinas Perhubungan				
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.1.1.2.1	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kepmendagri 050-SBB8 tahun 2021	Jumlah ASN di Seta yang menerima Gaji dan Tunjangan bulanan tahun n	Orang	Sekretariat	Sekdis	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan; Data ASN	42	43	4,172,597,928	43	4,302,110,413	51	4,661,990,639	53	4,538,356,124	55	4,765,273,930	55	4,765,273,930	55	4,765,273,930	10	Dinas Perhubungan				

Tujuan PD	Sasaran PD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kode	IK Tujuan (x), Sasaran (xx), Program (xxx), Kegiatan (xxxx) & Sub Kegiatan (xxxxx)	Sasaran Kinerja	NSPK Indikator	Formulasi	Satuan	Sumber/Penyedia Data	Pelaksana/Penanggung Jawab	Objek Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi								
															2021		2022		2023		2024		2025		target	Rp			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
															target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp												
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)								(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)								
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.1.1.2.2	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kepmendagri 050-5889	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang disusun tahun n	Dokumen	Sekretariat	Sekdis	Laporan triwulan Pelaksanaan Sub Kegiatan; Data ASN	3	3	99,548,500	1	135,745,500	3	96,025,000	3	102,924,439	3	108,070,661	3	108,070,661	Dinas Perhubungan									
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.1.1.2.3	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kepmendagri 050-5889 tahun 2021	Jumlah laporan hasil pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi yang disusun SKPD tahun n	Dokumen	Sekretariat	Sekdis	Laporan triwulan Pelaksanaan Sub Kegiatan	N/A	N/A	-	N/A	-	1	5,950,000	1	8,581,860	1	9,010,953	1	9,010,953	Dinas Perhubungan									
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.1.1.2.4	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kepmendagri 050-5889 tahun 2021	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun tahun n	Laporan	Sekretariat	Sekdis	Laporan Tahunan Pelaksanaan Sub Kegiatan	N/A	1	1,332,000	N/A	-	1	17,700,000	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	Dinas Perhubungan								
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	1.1.1.2.5	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Kepmendagri 050-5889 tahun 2021	Jumlah laporan keuangan bulanan / triwulan / semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD yang disusun tahun n	Laporan	Sekretariat	Sekdis	Laporan keuangan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan Setda	N/A	1	764,000	1	1,416,200	3	987,000	3	1,561,361	3	1,639,429	3	1,639,429	Dinas Perhubungan									
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.1.1.2.6	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kepmendagri 050-5889 tahun 2021	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran yang disusun tahun n	Dokumen	Sekretariat	Sekdis	Laporan analisis prognosis realisasi anggaran	N/A	N/A	-	N/A	-	1	2,230,400	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	Dinas Perhubungan								
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.1.1.3	Jumlah Dokumen Administrasi Umum PD	Tersedianya dokumen administrasi umum Dinas Perhubungan	Kepmendagri 050-5889 tahun 2021	Jumlah dokumen sub kegiatan yang dilaksanakan tahun n	Dokumen	Sekretariat	Sekdis	Dokumen pelaksanaan sub kegiatan	3	4	77,883,623	4	76,828,900	4	99,956,000	4	86,778,988	4	91,117,937	4	91,117,937	Dinas Perhubungan									
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.1.1.3.1	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kepmendagri 050-5889 tahun 2021	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan tahun n	Paket	Sekretariat	Sekdis	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan; Data...	4	4	1,632,200	4	836,500	4	1,280,000	4	922,241	4	968,353	4	968,353	Dinas Perhubungan									
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.1.1.3.2	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kepmendagri 050-5889 tahun 2021	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan tahun n	Paket	Sekretariat	Sekdis	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan; Data...	2	2	20,880,000	1	11,310,000	2	35,806,000	2	8,213,625	2	8,624,306	2	8,624,306	Dinas Perhubungan									
				Penyediaan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.1.1.3.3	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kepmendagri 050-5889 tahun 2021	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disusun tahun n	Dokumen	Sekretariat	Sekdis	Koran, majalah, Buletin	2	2	3,000,000	2	4,615,000	2	4,630,000	2	5,385,713	2	5,654,998	2	5,654,998	Dinas Perhubungan									
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.1.1.3.4	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kepmendagri 050-5889 tahun 2021	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang disusun tahun n	Laporan	Sekretariat	Sekdis	Laporan hasil perjalanan dinas bulanan disub	24	24	52,371,423	24	60,067,400	24	58,240,000	24	72,257,409	24	75,870,279	24	75,870,279	Dinas Perhubungan									
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.1.1.4	Jumlah Dokumen Jasa Penunjang Urusan PD	Tersedianya dokumen jasa penunjang urusan Dinas Perhubungan	Kepmendagri 050-5889 tahun 2021	Jumlah dokumen sub kegiatan yang dilaksanakan tahun n	Dokumen	Sekretariat	Sekdis	Dokumen pelaksanaan sub kegiatan	3	4	117,955,800	4	125,871,005	4	141,912,500	4	136,321,975	4	143,138,074	4	143,138,074	Dinas Perhubungan									
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.1.1.4.1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kepmendagri 050-5889 tahun 2021	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang disusun tahun n	Laporan	Sekretariat	Sekdis	Laporan Bulanan Pelaksanaan Sub Kegiatan	1000	1000	47,760,000	1000	48,374,000	1000	47,000,000	1000	55,096,335	1000	57,851,152	1000	57,851,152	Dinas Perhubungan									
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.1.1.4.2	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kepmendagri 050-5889 tahun 2021	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik yang disusun tahun n	Laporan	Sekretariat	Sekdis	Laporan Bulanan Pelaksanaan Sub Kegiatan	4	4	26,890,250	4	36,547,955	4	37,200,000	4	34,756,313	4	36,494,128	4	36,494,128	Dinas Perhubungan									
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.1.1.4.3	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kepmendagri 050-5889 tahun 2021	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disusun tahun n	Laporan	Sekretariat	Sekdis	Laporan Bulanan Pelaksanaan Sub Kegiatan	12	12	7,645,550	12	1,824,050	12	3,747,500	12	2,011,015	12	2,111,566	12	2,111,566	Dinas Perhubungan									
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.1.1.4.4	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kepmendagri 050-5889 tahun 2021	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disusun tahun n	Laporan	Sekretariat	Sekdis	Laporan Bulanan Pelaksanaan Sub Kegiatan	3	3	35,660,000	3	39,125,000	3	53,965,000	3	44,458,313	3	46,681,228	3	46,681,228	Dinas Perhubungan									

Tujuan PD	Sasaran PD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kode	IK Tujuan (x), Sasaran (xx), Program (xxx), Kegiatan (xxxx) & Sub Kegiatan (xxxxx)	Sasaran Kinerja	NSPK Indikator	Formulasi	Satuan	Sumber/Penyedia Data	Pelaksana/Penganggung Jawab	Objek Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi	
															2021		2022		2023		2024		2025		Renstra PD				
															target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.1.1.5	Jumlah Dokumen Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD	Tersedianya dokumen pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Dinas Perhubungan	Kepmendagri 050-5889 tahun 2021	Jumlah dokumen sub kegiatan yang dilaksanakan tahun n	Dokumen	Sekretariat	Sekdis	Dokumen pelaksanaan sub kegiatan	1	4	350,852,304	4	159,701,183	4	108,351,800	4	183,135,228	4	192,291,989	4	192,291,989	Dinas Perhubungan		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1.1.1.5.1	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya pada tahun n	Kepmendagri 050-5889 tahun 2021	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya pada tahun n	Unit	Sekretariat	Sekdis	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan; Data Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (KIB BMD)	10	10	4,063,582	5	3,767,578	10	6,300,000	10	10,253,250	10	10,765,913	10	10,765,913	Dinas Perhubungan		
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.1.1.5.2	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kepmendagri 050-5889 tahun 2021	Jumlah unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhab tahun n	Unit	Sekretariat	Sekdis	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan; Data Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (KIB BMD)	N/A	1	109,936,531	1	55,488,355	N/A	-	1	61,188,750	1	64,248,188	1	64,248,188	Dinas Perhubungan		
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.1.1.5.3	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kepmendagri 050-5889 tahun 2021	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhab tahun n	Unit	Sekretariat	Sekdis	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan; Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (KIB BMD)	N/A	1	178,265,641	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	Dinas Perhubungan	
				Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	1.1.1.5.4	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kepmendagri 050-5889 tahun 2021	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara tahun n	Unit	Sekretariat	Sekdis	Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan; Data Peralatan dan Mesin Lainnya (KIB BMD)	N/A	4	58,586,550	1	100,445,250	4	102,051,800	4	111,693,228	4	117,277,889	4	117,277,889	Dinas Perhubungan		
MENINGKATKAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DENGAN PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN REFORMASI BIROKRASI					2	Peningkatan Persentase Infrastruktur dalam Kondisi Baik	Meningkatnya Infrastruktur Perhubungan dalam Kondisi Baik	Perda 2/2021 tentang RPJMD	%	Dishub	Kadis	Dokumen Hasil Evaluasi RKP	86	86	2,855,424,713	86.5	2,274,561,164	87	1,114,781,250	87.5	6,831,784,861	88	7,173,374,104	88	7,173,374,104	Dinas Perhubungan			
				Meningkatnya kualitas infrastruktur perhubungan	2.1	Rasio Konektivitas Kabupaten	Meningkatnya Rasio Konektivitas Kabupaten	Permdagri 18/2020/lppd	indek konektivitas 1 (ml angk jalan) x bobot angkutan jalan = IK 2	Nilai	Dishub	Kadis	LPD Dishub tahun n	84.90	85.15	2,855,424,713	85.40	2,274,561,164	85.65	1,114,781,250	85.90	6,831,784,861	86.15	7,173,374,104	86.15	7,173,374,104	Dinas Perhubungan		
				(2) PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.1.1	Persentase capaian Kinerja Penyelenggaraan Pengembangan dan Keselamatan LLIA	Terselenggaranya Pengembangan dan Keselamatan LLIA	Perbup nomor 24 tahun 2022	Jumlah capaian kinerja penyelenggaraan pengembangan dan keselamatan LLAJ tahun n dibagi jumlah target kinerja penyelenggaraan pengembangan dan keselamatan LLAJ tahun n dikali 100	%	Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Kabid Pengembangan dan Keselamatan	Isporan Pelaksanaan Kegiatan	100	100	260,000	100	1,036,000	100	10,380,000	100	1,754,078	100	1,841,781	100	1,841,781	Dinas Perhubungan		
				Penetapan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Kabupaten/Kota	2.1.1.1	Jumlah Dokumen Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Jalan dan Angkutan yang Disusun	Tersusunnya Dokumen Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Jalan dan Angkutan	Perbup nomor 24 tahun 2022	Jumlah Dokumen Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Jalan dan Angkutan tahun n	Dokumen	Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Kabid Pengembangan dan Keselamatan	Laporan Pelaksanaan Kegiatan	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	Dinas Perhubungan	
				Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Kabupaten/Kota	2.1.1.1.1	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Kabupaten/Kota	Kepmendagri 050-5889 tahun 2021	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Kabupaten tahun n	Dokumen	Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Kabid Pengembangan dan Keselamatan	Dokumen Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Jalan dan Angkutan	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	Dinas Perhubungan	
				Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Kabupaten/Kota	2.1.1.1.2	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Kabupaten/Kota	Ditetapkannya Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Kabupaten/Kota	Kepmendagri 050-5889 tahun 2021	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Kabupaten tahun n	Dokumen	Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Kabid Pengembangan dan Keselamatan	Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Jalan dan Angkutan	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	Dinas Perhubungan	
				Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Kabupaten/Kota	2.1.1.1.3	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Kabupaten/Kota	Tersusunnya Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Kabupaten/Kota	Kepmendagri 050-5889 tahun 2021	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Kabupaten/kota yang disusun tahun n	Laporan	Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Kabid Pengembangan dan Keselamatan	Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Kabupaten/kota	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	Dinas Perhubungan	

Tujuan PD	Sasaran PD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kode	IK Tujuan (x), Sasaran (xx), Program (xxx), Kegiatan (xxxx) & Sub Kegiatan (xxxxx)	Sasaran Kinerja	NSPK Indikator	Formulasi	Satuan	Sumber/Penyedia Data	Pelaksana/Penanggung Jawab	Objek Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi		
															2021		2022		2023		2024		2025		target	Rp				
															target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	(17)	(18)				
															(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			(18)	
				Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.2.1.2	Jumlah Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah yang ditetapkan	Ditetapkannya Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah	Perbup nomor 24 tahun 2022	Jumlah Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah yang ditetapkan tahun n	Kawasan	Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Kabid Pengembangan dan Keselamatan	Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	Dinas Perhubungan	
				Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.2.1.2.1	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terciptanya Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kepmendagri 050-5889 tahun 2021	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota tahun n	Dokumen	Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Kabid Pengembangan dan Keselamatan	Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	Dinas Perhubungan	
				Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.2.1.2.2	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersosialisasinya dan Terlaksananya Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kepmendagri 050-5889 tahun 2021	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota tahun n	Dokumen	Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Kabid Pengembangan dan Keselamatan	Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	Dinas Perhubungan	
				Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.2.1.3	Jumlah Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah yang ditetapkan	Tersedianya Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah	Perbup nomor 24 tahun 2022	Jumlah Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah yang ditetapkan tahun n	Dokumen	Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Kabid Pengembangan dan Keselamatan	Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	Dinas Perhubungan	
				Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.2.1.3.1	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terciptanya Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kepmendagri 050-5889 tahun 2021	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota tahun n	Dokumen	Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Kabid Pengembangan dan Keselamatan	Dokumen Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	Dinas Perhubungan	
				Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.2.1.3.2	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersosialisasinya dan Terlaksananya Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kepmendagri 050-5889 tahun 2021	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota tahun n	Dokumen	Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Kabid Pengembangan dan Keselamatan	Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	Dinas Perhubungan	
				Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.2.1.4	Jumlah Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah yang ditetapkan	tersedianya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah	Perbup nomor 24 tahun 2022	Jumlah Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah yang ditetapkan tahun n	Dokumen	Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Kabid Pengembangan dan Keselamatan	Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	Dinas Perhubungan	

Tujuan PD	Sasaran PD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kode	IK Tujuan (x), Sasaran (xx), Program (xxx), Kegiatan (xxxx) & Sub-Kegiatan (xxxxx)	Sasaran Kinerja	NSPK Indikator	Formulasi	Satuan	Sumber/Penyedia Data	Pelaksanaan/Penanggung Jawab	Objek Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
															2021		2022		2023		2024		2025		Remstra PD					
															target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
															(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)					
					1.2.1.4.1	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kepmendagri 050-5889 tahun 2021	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota tahun n	Dokumen	Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Kabid Pengembangan dan Keselamatan	Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	Dinas Perhubungan			
					1.2.1.4.2	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ditetapkan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kepmendagri 050-5889 tahun 2021	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota tahun n	Dokumen	Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Kabid Pengembangan dan Keselamatan	Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	Dinas Perhubungan			
					1.2.1.4.3	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terkendalinya Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kepmendagri 050-5889 tahun 2021	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota tahun n	Dokumen	Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Kabid Pengembangan dan Keselamatan	Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	Dinas Perhubungan			
					1.2.1.5	Perbup tentang tarif batas atas dan batas bawah kendaraan angkutan penumpang umum	Tersedianya Perbup tentang tarif batas atas dan batas bawah kendaraan angkutan penumpang umum	Perbup nomor 24 tahun 2022	Jumlah Perbup tentang tarif batas atas dan batas bawah kendaraan angkutan penumpang umum tahun n	Dokumen	Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Kabid Pengembangan dan Keselamatan	Perbup tentang tarif batas atas dan batas bawah kendaraan angkutan penumpang umum	1	1	260,000	1	1,036,000	1	10,380,000	1	1,754,078	1	1,841,781	1	1,841,781	Dinas Perhubungan			
					1.2.1.5.1	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kepmendagri 050-5889 tahun 2021	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota tahun n	Dokumen	Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Kabid Pengembangan dan Keselamatan	Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	Dinas Perhubungan			
					1.2.1.5.2	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kepmendagri 050-5889 tahun 2021	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota tahun n	Dokumen	Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Kabid Pengembangan dan Keselamatan	Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	1	260,000	1	1,036,000	1	10,380,000	1	1,754,078	1	1,841,781	1	1,841,781	Dinas Perhubungan			
					1.2.1.5.3	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terkendalinya dan Terawasinya Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kepmendagri 050-5889 tahun 2021	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota tahun n	Laporan	Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Kabid Pengembangan dan Keselamatan	Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	Dinas Perhubungan			
				2) PROGRAM PENYELANGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGGUTAN JALAN (LLAJ)	1.2.2	Persentase Capaian Kinerja Pengelolaan Prasarana LLAJ	Terseleenggaranya Pengelolaan Prasarana LLAJ	Perbup nomor 24 tahun 2022	Jumlah capaian kinerja penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan tahun n dibagi target kinerja penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan tahun n x100	%	Bidang Prasarana	Kabid Prasarana	Laporan Pelaksanaan Kegiatan	100	100	476,058,228	100	410,310,680	100	424,269,250	100	486,495,159	100	510,819,917	100	510,819,917	Dinas Perhubungan			

Tujuan PD	Sasaran n PD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kode	IK Tujuan (el, Sasaran (od), Program (ood), Kegiatan (oood) & Sub Kegiatan (oooo))	Sasaran Kinerja	NSPK Indikator	Formulasi	Satuan	Sumber/penyedia Data	Pelaksana/pemangung Jawab	Objek Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana PD		Unit Kerja PD Pemangung Jawab	Lokasi				
															2021		2022		2023		2024		2025		target	Rp	target	Rp			target	Rp	target	Rp
															target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)													
				Penyediaan Perlekapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1.2.2.1	Jumlah Unit Perlekapan Jalan yang Disediakan	Meningkatnya Perlekapan Jalan	Perbup nomor 24 tahun 2022	Jumlah Unit Perlekapan Jalan yang Disediakan tahun n	Unit	Bidang Prasarana	Kabid Prasarana	Perlekapan jalan	N/A	22	213,348,228	25	106,628,230	25	184,865,000	25	83,245,365	25	87,407,633	25	87,407,633	Dinas Perhubungan							
				Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1.2.2.1.1	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Terbangunnya Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kemendagri 050-5889 tahun 2021	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun tahun n	Unit	Bidang Prasarana	Kabid Prasarana	Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	Dinas Perhubungan							
				Penyediaan Perlekapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1.2.2.1.2	Jumlah Perlekapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Tersedianya Perlekapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kemendagri 050-5889 tahun 2021	Jumlah Perlekapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia tahun n	Unit	Bidang Prasarana	Kabid Prasarana	Perlekapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	N/A	22	81,635,728	1	25,506,000	25	184,865,000	25	29,222,865	25	30,684,008	25	30,684,008	Dinas Perhubungan							
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	1.2.2.1.3	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Kemendagri 050-5889 tahun 2021	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara tahun n	Unit	Bidang Prasarana	Kabid Prasarana	Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	N/A	1	131,712,500	1	81,122,230	1	48,834,000	1	54,022,500	1	56,723,625	1	56,723,625	Dinas Perhubungan							
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlekapan Jalan	1.2.2.1.4	Jumlah Perlekapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlekapan Jalan	Kemendagri 050-5889 tahun 2021	Jumlah Perlekapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara tahun n	Unit	Bidang Prasarana	Kabid Prasarana	Perlekapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	Dinas Perhubungan							
				Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	1.2.2.2	Persentase fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang tipe C yang tersedia	tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	Permendagri 18/2020/lppd	Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan tipe c yang tersedia tahun n dibagi Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan sesuai dengan standar pelayanan penyelenggaraan terminal angkutan jalan dikali 100	%	Bidang Prasarana	Kabid Prasarana	Dokumen pelaksanaan kegiatan	68.75	68.75	5,210,000	71.88	9,167,450	75.00	9,474,250	78.13	10,914,144	81.25	11,459,851	81.25	11,459,851	Dinas Perhubungan							
				Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	1.2.2.2.1	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	Tersusunnya Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Kemendagri 050-5889 tahun 2021	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun tahun n	Dokumen	Bidang Prasarana	Kabid Prasarana	Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	Dinas Perhubungan							
				Pembangunan Gedung Terminal	1.2.2.2.2	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	Terbangunnya Gedung Terminal	Kemendagri 050-5889 tahun 2021	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun tahun n	Unit	Bidang Prasarana	Kabid Prasarana	Gedung Terminal yang Terbangun	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	Dinas Perhubungan							
				Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	1.2.2.2.3	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	Berkembangnya Sarana dan Prasarana Terminal	Kemendagri 050-5889 tahun 2021	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan tahun n	Unit	Bidang Prasarana	Kabid Prasarana	Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	Dinas Perhubungan							
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	1.2.2.2.4	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Kemendagri 050-5889 tahun 2021	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara tahun n	Unit	Bidang Prasarana	Kabid Prasarana	Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	N/A	1	5,210,000	1	9,167,450	1	9,474,250	1	10,914,144	1	11,459,851	1	11,459,851	Dinas Perhubungan							
				Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	1.2.2.2.5	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Meningkatnya Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Kemendagri 050-5889 tahun 2021	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya tahun n	Orang	Bidang Prasarana	Kabid Prasarana	SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	Dinas Perhubungan							
				Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	1.2.2.3	Jumlah Rekomendasi izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir yang diterbitkan	Diterbitkannya Rekomendasi izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	Perbup nomor 24 tahun 2022	Jumlah Rekomendasi izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir yang diterbitkan tahun n	Rekom	Bidang Prasarana	Kabid Prasarana	Rekomendasi izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	1	1	257,500,000	1	294,515,000	2	229,930,000	2	392,335,650	2	411,952,433	2	411,952,433	Dinas Perhubungan							

Tahun PD	Sasaran PD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kode	IK Tujuan (a), Sasaran (b), Program (c), Kegiatan (d) & Sub Kegiatan (e)	Sasaran Kinerja	NSPK Indikator	Formulasi	Satuan	Sumber/Preyeksi Data	Pelaksana/Peranggung Jawab	Objek Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal (f)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
															2021		2022		2023		2024		2025		target Rp	Rp	target Rp	Rp			target Rp	Rp
															target (g)	Rp (h)	target (i)	Rp (j)	target (k)	Rp (l)	target (m)	Rp (n)	target (o)	Rp (p)								
				Facilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1.2.2.3.1	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kepmendagri 050-5889 tahun 2021	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang tersusun tahun n	Dokumen	Bidang Prasarana	Kabid Prasarana	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	Dinas Perhubungan	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1.2.2.3.2	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kepmendagri 050-5889 tahun 2021	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota yang tersusun tahun n	Dokumen	Bidang Prasarana	Kabid Prasarana	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	257,500,000	1	294,515,000	1	229,930,000	1	392,335,650	1	411,952,433	1	411,952,433	1	411,952,433	1	Dinas Perhubungan		
					1.2.3	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan LLAJ	Meningkatnya capaian kinerja penyelenggaraan LLAJ	Perbup nomor 24 tahun 2022	Jumlah capaian kinerja kegiatan dibagi jml target kinerja kegiatan x100	%	Bidang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan	Kabid Lalu Lintas Jalan dan Angkutan	laporan Pelaksanaan Kegiatan	100	100	1,016,720,000	100	2,514,055,470	100	680,132,000	100	2,053,674,158	100	2,156,357,865	100	2,156,357,865	100	2,156,357,865	100	Dinas Perhubungan		
			Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		1.2.3.1	Persentase pengujian kendaraan bermotor wajib uji berkala	Terlaksananya pengujian kendaraan bermotor wajib uji berkala	Permendagri 18/2020/lppd	Jumlah kendaraan yang diuji tahun n dibagi Jumlah kendaraan wajib uji sampai tahun n dikali 100	%	Bidang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan	Kabid Lalu Lintas Jalan dan Angkutan	Pengujian kendaraan bermotor wajib uji berkala	88.58	14.31	411,472,000	100	221,825,073	100	188,844,000	100	212,048,235	100	222,650,647	100	222,650,647	100	222,650,647	100	Dinas Perhubungan		
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.2.3.1.1	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kepmendagri 050-5889 tahun 2021	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia tahun n	Unit	Bidang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan	Kabid Lalu Lintas Jalan dan Angkutan	Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	N/A	3	386,212,000	1	134,325,073	1	126,844,000	1	115,579,485	1	121,358,459	1	121,358,459	1	121,358,459	1	Dinas Perhubungan		
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.2.3.1.2	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kepmendagri 050-5889 tahun 2021	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya tahun n	Orang	Bidang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan	Kabid Lalu Lintas Jalan dan Angkutan	Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	Dinas Perhubungan	
				Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	1.2.3.1.3	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	Terdaftaranya Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kepmendagri 050-5889 tahun 2021	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar tahun n	Unit	Bidang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan	Kabid Lalu Lintas Jalan dan Angkutan	Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	5157	5464	25,260,000	5514	87,500,000	5564	62,000,000	5614	96,468,750	5664	101,292,188	5664	101,292,188	5664	101,292,188	5664	Dinas Perhubungan		
				Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.2.3.1.4	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kepmendagri 050-5889 tahun 2021	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor tahun n	Dokumen	Bidang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan	Kabid Lalu Lintas Jalan dan Angkutan	Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	Dinas Perhubungan	
				Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.2.3.1.5	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersosialisasinya Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kepmendagri 050-5889 tahun 2021	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor tahun n	Laporan	Bidang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan	Kabid Lalu Lintas Jalan dan Angkutan	Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	Dinas Perhubungan	
				Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	1.2.3.1.6	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Terlaksananya Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Kepmendagri 050-5889 tahun 2021	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji tahun n	Laporan	Bidang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan	Kabid Lalu Lintas Jalan dan Angkutan	Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	Dinas Perhubungan	

Tujuan PD	Sasaran PD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kode	IK Tujuan (4), Sasaran (5a), Program (5b), Kegiatan (5c) & Sub Kegiatan (5c/a)	Sasaran Kinerja	NSPK Indikator	Formulasi	Satuan	Sumber/Penyedia Data	Pelaksana/Pemangung Jawab	Objek Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana PD		Unit Kerja PD Pemangung Jawab	Lokasi						
															2021		2022		2023		2024		2025		target	Rp			target	Rp	target	Rp	target	Rp
															target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp										
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)								(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)						
				Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penguji Berkala Kendaraan Bermotor	1.2.3.1.7	Jumlah Sarana dan Prasarana Penguji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Terpeliharannya Sarana dan Prasarana Penguji Berkala Kendaraan Bermotor	Kepmendagri 050-5889 tahun 2021	Jumlah Sarana dan Prasarana Penguji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara tahun n	Unit	Bidang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan	Kabid Lalu Lintas Jalan dan Angkutan	Sarana dan Prasarana Penguji Berkala Kendaraan Bermotor	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	Dinas Perhubungan							
				Koordinasi Penyelenggaraan Penguji Berkala Kendaraan Bermotor	1.2.3.1.8	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Penguji Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Penguji Berkala Kendaraan Bermotor	Kepmendagri 050-5889 tahun 2021	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Penguji Berkala Kendaraan Bermotor tahun n	Laporan	Bidang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan	Kabid Lalu Lintas Jalan dan Angkutan	Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Penguji Berkala Kendaraan Bermotor	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	Dinas Perhubungan							
				Penetapan Tarif Retribusi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor	1.2.3.1.9	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor	Ditetapkannya Tarif Retribusi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor	Kepmendagri 050-5889 tahun 2021	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor tahun n	Laporan	Bidang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan	Kabid Lalu Lintas Jalan dan Angkutan	Laporan Penetapan Tarif Retribusi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	Dinas Perhubungan							
				Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penguji Berkala Kendaraan Bermotor	1.2.3.1.10	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penguji Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penguji Berkala Kendaraan Bermotor	Kepmendagri 050-5889 tahun 2021	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penguji Berkala Kendaraan Bermotor tahun n	Laporan	Bidang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan	Kabid Lalu Lintas Jalan dan Angkutan	Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penguji Berkala Kendaraan Bermotor	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	Dinas Perhubungan							
				Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1.2.3.2	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan	Terlaksananya manajemen dan rekayasa lalu lintas jaringan jalan	Permendagri 18/2020/lppd	Jumlah pemasangan perlengkapan jalan tahun n dibagi Target kebutuhan perlengkapan jalan dikali 100	%	Bidang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan	Kabid Lalu Lintas Jalan dan Angkutan	Dokumen pelaksanaan kegiatan	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	Dinas Perhubungan							
				Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1.2.3.2.1	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Teratanya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kepmendagri 050-5889 tahun 2021	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota tahun n	Laporan	Bidang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan	Kabid Lalu Lintas Jalan dan Angkutan	Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	Dinas Perhubungan							
				Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	1.2.3.2.2	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Terlaksananya Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Kepmendagri 050-5889 tahun 2021	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas tahun n	Unit	Bidang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan	Kabid Lalu Lintas Jalan dan Angkutan	Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	Dinas Perhubungan							
				Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1.2.3.2.3	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Uji Coba dan Tersosialisasinya Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kepmendagri 050-5889 tahun 2021	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota tahun n	Dokumen	Bidang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan	Kabid Lalu Lintas Jalan dan Angkutan	Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	Dinas Perhubungan							
				Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	1.2.3.2.4	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Terawasainya dan Terkendalainya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kepmendagri 050-5889 tahun 2021	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota yang tersusun tahun n	Laporan	Bidang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan	Kabid Lalu Lintas Jalan dan Angkutan	Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	Dinas Perhubungan							
				Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	1.2.3.2.5	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Kepmendagri 050-5889 tahun 2021	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota tahun n	Laporan	Bidang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan	Kabid Lalu Lintas Jalan dan Angkutan	Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	Dinas Perhubungan							
				Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	1.2.3.3	Jumlah dokumen hasil analisis dampak lalu lintas (andalalin) yang disetujui	Tersedianya dokumen hasil andalalin yang disetujui	Permenhub 17 tahun 2021	Jumlah dokumen hasil analisis dampak lalu lintas (andalalin) yang disetujui tahun n	Dokumen	Bidang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan	Kabid Lalu Lintas Jalan dan Angkutan	Dokumen hasil analisis dampak lalu lintas (andalalin)	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	Dinas Perhubungan							

Tujuan PD	Sasaran PD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kode	IK Tujuan (L. Sasaran (No). Program (No). Kegiatan (No) & Sub Kegiatan (No))	Sasaran Kinerja	NSPK Indikator	Formulasi	Satuan	Sumber/Penyedia Data	Pelaksana/Penanggung Jawab	Objek Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi						
															2021		2022		2023		2024		2025		target	Rp			target	Rp	target	Rp	target	Rp
															target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp										
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)								(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)						
				Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	1.2.3.3.1	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan	Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Kepmendagri 050-5889 tahun 2021	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan tahun n	Dokumen	Bidang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan	Kabid Lalu Lintas Jalan dan Angkutan	Kebijakan Tata Kelola Andalalin	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	Dinas Perhubungan							
				Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	1.2.3.3.2	Jumlah Penilai Andalalin yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Meningkatnya Kapasitas Penilai Andalalin	Kepmendagri 050-5889 tahun 2021	Jumlah Penilai Andalalin yang Ditingkatkan Kapasitasnya tahun n	Orang	Bidang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan	Kabid Lalu Lintas Jalan dan Angkutan	Penilai Andalalin yang Ditingkatkan Kapasitasnya	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	Dinas Perhubungan							
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	1.2.3.3.3	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Teraksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Kepmendagri 050-5889 tahun 2021	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin tahun n	Laporan	Bidang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan	Kabid Lalu Lintas Jalan dan Angkutan	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	Dinas Perhubungan							
				Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	1.2.3.3.4	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	Teraksananya Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Kepmendagri 050-5889 tahun 2021	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi tahun n	Laporan	Bidang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan	Kabid Lalu Lintas Jalan dan Angkutan	Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	Dinas Perhubungan							
				Audit dan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Jalan dan Angkutan di Jalan	1.2.3.4	Jumlah dokumen hasil audit dan inspeksi keselamatan Lalu Lintas Jalan dan Angkutan yang disusun	terusunnya dokumen hasil audit dan inspeksi keselamatan Lalu Lintas Jalan dan Angkutan	Perbup nomor 24 tahun 2022	Jumlah dokumen hasil audit dan inspeksi keselamatan Lalu Lintas Jalan dan Angkutan yang disusun tahun n	Dokumen	Bidang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan	Kabid Lalu Lintas Jalan dan Angkutan	Dokumen hasil audit dan inspeksi keselamatan Lalu Lintas Jalan dan Angkutan	1	1	413,318,000	1	911,082,397	1	428,703,000	1	304,630,673	1	319,862,206	1	319,862,206	Dinas Perhubungan							
				Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur (Lalu Lintas Jalan dan Angkutan)	1.2.3.4.1	Jumlah Auditor dan Inspektur (Lalu Lintas Jalan dan Angkutan) yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Meningkatnya Kapasitas Auditor dan Inspektur (Lalu Lintas Jalan dan Angkutan)	Kepmendagri 050-5889 tahun 2021	Jumlah Auditor dan Inspektur (Lalu Lintas Jalan dan Angkutan) yang Ditingkatkan Kapasitasnya tahun n	Orang	Bidang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan	Kabid Lalu Lintas Jalan dan Angkutan	Auditor dan Inspektur (Lalu Lintas Jalan dan Angkutan) yang Ditingkatkan Kapasitasnya	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	Dinas Perhubungan							
				Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	1.2.3.4.2	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Teraksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kepmendagri 050-5889 tahun 2021	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor tahun n	Laporan	Bidang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan	Kabid Lalu Lintas Jalan dan Angkutan	Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	Dinas Perhubungan							
				Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	1.2.3.4.3	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Teraksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Kepmendagri 050-5889 tahun 2021	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal tahun n	Laporan	Bidang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan	Kabid Lalu Lintas Jalan dan Angkutan	Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	Dinas Perhubungan							
				Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	1.2.3.4.4	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Teraksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Kepmendagri 050-5889 tahun 2021	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota tahun n	Laporan	Bidang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan	Kabid Lalu Lintas Jalan dan Angkutan	Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	1	1	413,318,000	20	911,082,397	1	428,703,000	1	304,630,673	1	319,862,206	1	319,862,206	Dinas Perhubungan							
				Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	1.2.3.4.5	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Teraksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Kepmendagri 050-5889 tahun 2021	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum tahun n	Laporan	Bidang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan	Kabid Lalu Lintas Jalan dan Angkutan	Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	Dinas Perhubungan							
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.2.3.5	Jumlah sarana Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah yang dikendalikan dan diawasi	tersedianya sarana Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah yang dikendalikan dan diawasi	Perbup nomor 24 tahun 2022	Jumlah sarana Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah yang dikendalikan dan diawasi tahun n	Unit	Bidang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan	Kabid Lalu Lintas Jalan dan Angkutan	Sarana Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah yang dikendalikan dan diawasi	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	Dinas Perhubungan							
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	1.2.3.5.1	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kepmendagri 050-5889 tahun 2021	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia tahun n	Unit	Bidang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan	Kabid Lalu Lintas Jalan dan Angkutan	Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	Dinas Perhubungan							

Tujuan PD	Sasaran PD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kode	IK Tujuan (dL, Sasaran (dL), Program (dL), Kegiatan (dL)) & Sub Kegiatan (dL)	Sasaran Kinerja	NSPK Indikator	Formulasi	Satuan	Sumber/Penyedia Data	Pelaksana/Penanggung Jawab	Objek Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi						
															2022		2023		2024		2025		2026		2027				2028		2029			
															target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp	target	Rp	target	Rp
															(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			(18)	(19)	(20)			
					1.2.3.5.2	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Terkendalinya dan Terawalnya Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Keppmendagri 050-5889 tahun 2021	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota tahun n	Laporan	Bidang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan	Kabid Lalu Lintas Jalan dan Angkutan	Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	Dinas Perhubungan							
					1.2.3.6	Jumlah Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah yang ditetapkan	Tersedianya Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah	Perbup nomor 24 tahun 2022	Jumlah Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah yang ditetapkan tahun n	Dokumen	Bidang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan	Kabid Lalu Lintas Jalan dan Angkutan	Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah	1	1	142,710,000	1	142,200,000	1	750,000	1	159,614,438	1	167,595,159	1	167,595,159	Dinas Perhubungan							
					1.2.3.6.1	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersempurnanya Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Keppmendagri 050-5889 tahun 2021	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota tahun n	Dokumen	Bidang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan	Kabid Lalu Lintas Jalan dan Angkutan	Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	142,710,000	1	142,200,000	1	750,000	1	159,614,438	1	167,595,159	1	167,595,159	Dinas Perhubungan							
					1.2.3.6.2	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersosialisasinya dan Terlaksananya Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Keppmendagri 050-5889 tahun 2021	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota tahun n	Dokumen	Bidang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan	Kabid Lalu Lintas Jalan dan Angkutan	Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	Dinas Perhubungan							
					1.2.3.7	Jumlah Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah yang diterbitkan	Diterbitkannya Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah	Perbup nomor 24 tahun 2022	Jumlah Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah yang diterbitkan tahun n	Rekom	Bidang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan	Kabid Lalu Lintas Jalan dan Angkutan	Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah	342	342	49,220,000	342	1,238,948,000	342	61,835,000	342	1,377,380,813	342	1,446,249,853	342	1,446,249,853	Dinas Perhubungan							
					1.2.3.7.1	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Keppmendagri 050-5889 tahun 2021	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik tahun n	Laporan	Bidang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan	Kabid Lalu Lintas Jalan dan Angkutan	Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	342	342	48,960,000	131	47,030,000	342	61,835,000	342	54,380,813	342	57,099,853	342	57,099,853	Dinas Perhubungan							
					1.2.3.7.2	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Keppmendagri 050-5889 tahun 2021	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota tahun n	Laporan	Bidang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan	Kabid Lalu Lintas Jalan dan Angkutan	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	-	2	260,000	1	1,191,918,000	N/A	-	2	1,323,000,000	2	1,389,150,000	2	1,389,150,000	Dinas Perhubungan							

Tujuan PD	Sasaran PD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kode	IK Tujuan (a), Sasaran (a0), Program (a00), Kegiatan (a000) & Sub Kegiatan (a0000)	Sasaran Kinerja	NSPK Indikator	Formulasi	Satuan	Sumber/Penyedia Data	Pelaksana/Penanggung Jawab	Objek Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi						
															2022		2023		2024		2025		target		Rp		target				Rp		target		Rp	
															(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)			(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
				Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.2.3.8	Jumlah Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah yang diterbitkan	tersedianya Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah	Perbup nomor 24 tahun 2022	Jumlah Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah yang diterbitkan tahun n	Dokumen	Bidang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan	Kabid Lalu Lintas Jalan dan Angkutan	Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	Dinas Perhubungan			
				Facilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1.2.3.8.1	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Teraksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Kemendagri 050-5889 tahun 2021	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota tahun n	Laporan	Bidang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan	Kabid Lalu Lintas Jalan dan Angkutan	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	Dinas Perhubungan					
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota	1.2.3.8.2	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota	Teraksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kemendagri 050-5889 tahun 2021	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota tahun n	Laporan	Bidang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan	Kabid Lalu Lintas Jalan dan Angkutan	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	Dinas Perhubungan					
			(3) PROGRAM PELAYARAN		1.2.4	Persebtase Capaian Kinerja Penyelenggaraan LLA Pelayaran	Terselenggaranya Lalu Lintas dan Angkutan pelayaran	Perbup nomor 24 tahun 2022	Jumlah capaian kinerja kegiatan dibagi jml target kinerja kegiatan x100	%	Bidang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan	Kabid Lalu Lintas Jalan dan Angkutan	Laporan Pelaksanaan Kegiatan	100	100	1.362,386,485	100	1.327,000	100	-	100	12.484,500	100	13.108,725	100	13.108,725	100	13.108,725	Dinas Perhubungan							
				Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota	1.2.4.1	Jumlah rekomendasi penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah yang diterbitkan	tersedianya rekomendasi Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah yang diterbitkan tahun n	Perbup nomor 24 tahun 2022	Jumlah rekomendasi penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah yang diterbitkan tahun n	Rekom	Bidang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan	Kabid Lalu Lintas Jalan dan Angkutan	Rekomendasi penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah	N/A	1	1.362,386,485	1	1.327,000	1	-	1	12.484,500	1	13.108,725	1	13.108,725	Dinas Perhubungan									
				Facilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1.2.4.1.1	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kemendagri 050-5889 tahun 2021	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik tahun n	Dokumen	Bidang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan	Kabid Lalu Lintas Jalan dan Angkutan	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	-	1	1.362,386,485	1	1.327,000	N/A	-	1	10.500,000	1	11.025,000	1	11.025,000	Dinas Perhubungan									
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	1.2.4.1.2	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	Teraksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	Kemendagri 050-5889 tahun 2021	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota tahun n	Laporan	Bidang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan	Kabid Lalu Lintas Jalan dan Angkutan	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	1	1.984,500	1	2.083,725	1	2.083,725	Dinas Perhubungan									

Tujuan PD	Sasaran PD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kode	IK Tujuan (K), Sasaran (K), Program (K), Kegiatan (K) & Sub Kegiatan (K)	Sasaran Kinerja	NSPK Indikator	Formulasi	Satuan	Sumber/Penyedia Data	Pelaksana/Penanggung Jawab	Objek Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi				
															2022		2023		2024		2025		2026		2027				2028		2029	
															target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)													
					1.2.5	Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pengembangan dan Keselamatan Pelayaran	Terseleenggaranya Pengembangan dan Keselamatan pelayaran	Perbup nomor 24 tahun 2022	Jumlah capaian kinerja kegiatan dibagi jml target kinerja kegiatan x100	%	Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Kabid Pengembangan dan Keselamatan	Laporan Pelaksanaan Kegiatan	100	100	-	100	804,997,500	100	-	100	2,088,725	100	2,187,911	100	2,187,911	Dinas Perhubungan					
			Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota		1.2.5.1	Jumlah rekomendasi penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah yang diterbitkan	Tersedianya rekomendasi penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah	Perbup nomor 24 tahun 2022	Jumlah rekomendasi penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah yang diterbitkan tahun n	Dokumen	Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Kabid Pengembangan dan Keselamatan	Rekomendasi penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	Dinas Perhubungan					
			fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		1.2.5.1.1	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kepmendagri/050-5889 tahun 2021	fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik tahun n	Dokumen	Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Kabid Pengembangan dan Keselamatan	Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	Dinas Perhubungan					
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota		1.2.5.1.2	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kepmendagri/050-5889 tahun 2021	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota tahun n	Laporan	Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Kabid Pengembangan dan Keselamatan	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	N/A	-	N/A	-	1	10,000,000	1	10,500,000	1	11,025,000	1	11,025,000	Dinas Perhubungan					
			Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha		1.2.5.2	Jumlah rekomendasi Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha yang diterbitkan	Tersedianya rekomendasi Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	Perbup nomor 24 tahun 2022	Jumlah rekomendasi Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha yang diterbitkan tahun n	Rekom	Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Kabid Pengembangan dan Keselamatan	Rekomendasi Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	Dinas Perhubungan					

Tujuan PD	Sasaran PD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kode	IK Tujuan (K1, Sasaran (K2), Program (K3), Kegiatan (K4)) & Sub Kegiatan (K5)	Sasaran Kinerja	NSPK Indikator	Formulasi	Satuan	Sumber/Penyedia Data	Pelaksana/Penanggung Jawab	Objek Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
															2021		2022		2023		2024		2025		target	Rp		
															target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)									
				Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha	1.2.5.4	Jumlah rekomendasi Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha yang diterbitkan	Tersedianya rekomendasi Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha	Perbup nomor 24 tahun 2022	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha yang diterbitkan tahun n	Rekom	Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Kabid Pengembangan dan Keselamatan	Rekomendasi Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	Dinas Perhubungan	
				fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1.2.5.4.1	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kepmendagri 050-5889 tahun 2021	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik tahun n	Dokumen	Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Kabid Pengembangan dan Keselamatan	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	Dinas Perhubungan	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	1.2.5.4.2	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kepmendagri 050-5889 tahun 2021	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota tahun n	Laporan	Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Kabid Pengembangan dan Keselamatan	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	Dinas Perhubungan	
				Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kereta Api Kabupaten/Kota	1.2.5.5	Jumlah dokumen penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah	Tersedianya dokumen penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah	Perbup nomor 24 tahun 2022	Jumlah dokumen penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah yang disusun tahun n	Dokumen	Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Kabid Pengembangan dan Keselamatan	Dokumen penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	Dinas Perhubungan	
				Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.2.5.5.1	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kepmendagri 050-5889 tahun 2021	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota tahun n	Dokumen	Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Kabid Pengembangan dan Keselamatan	Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	Dinas Perhubungan	

Tujuan PD	Sasaran PD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kode	IK Tujuan (di Sasaran (di), Program (di), Kegiatan (di) & Sub Kegiatan (di))	Sasaran Kinerja	NSPK Indikator	Formulasi	Satuan	Sumber/Penyedia Data	Pelaksanaan/Penanggung Jawab	Objek Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
															2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028				2029	
															target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)													
				Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.2.5.5.2	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terkendalinya dan Terawasnya Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kepmendagri 050-5889 tahun 2021	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota tahun n	Laporan	Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Kabid Pengembangan dan Keselamatan	Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	Dinas Perhubungan			
				Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.2.5.6	Jumlah Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah	Tersedianya Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah	Perbup nomor 24 tahun 2022	Jumlah Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah tahun n	Dokumen	Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Kabid Pengembangan dan Keselamatan	Dokumen Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah	N/A	N/A	-	1	804,997,500	1	-	1	2,083,725	1	2,187,911	1	2,187,911	1	2,187,911	Dinas Perhubungan			
				Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	1.2.5.6.1	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang dioperasikan dan dipelihara	Terselenggaranya Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kepmendagri 050-5889 tahun 2021	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang dioperasikan dan dipelihara tahun n	Dokumen	Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Kabid Pengembangan dan Keselamatan	Pelabuhan Pengumpan Lokal yang dioperasikan dan dipelihara	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	Dinas Perhubungan			
				Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.2.5.6.2	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kepmendagri 050-5889 tahun 2021	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota tahun n	Dokumen	Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Kabid Pengembangan dan Keselamatan	Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	N/A	N/A	-	1	804,997,500	N/A	-	1	2,083,725	1	2,187,911	1	2,187,911	1	2,187,911	Dinas Perhubungan			
				Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.2.5.6.3	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terkendalinya dan Terawasnya Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kepmendagri 050-5889 tahun 2021	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota tahun n	Laporan	Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Kabid Pengembangan dan Keselamatan	Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	Dinas Perhubungan			
				Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	1.2.5.7	Jumlah rekomendasi Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	tersedianya rekomendasi Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	Perbup nomor 24 tahun 2022	Jumlah rekomendasi Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal yang disusun tahun n	Rekom	Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Kabid Pengembangan dan Keselamatan	Rekomendasi Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	Dinas Perhubungan			
				fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1.2.5.7.1	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kepmendagri 050-5889 tahun 2021	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik tahun n	Dokumen	Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Kabid Pengembangan dan Keselamatan	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	Dinas Perhubungan			

Tujuan PD	Sasaran PD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kode	IK Tujuan (K), Sasaran (K), Program (K), Kegiatan (K) & Sub Kegiatan (K)	Sasaran Kinerja	NSPK Indikator	Formulasi	Satuan	Sumber/Penyedia Data	Pelaksana/Penanggung Jawab	Objek Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
															2022		2023		2024		2025		2026		2027				2028	
															target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)											
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	1.2.5.7.2	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	Keppmendagri 050-5889 tahun 2021	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal tahun n	Laporan	Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Kabid Pengembangan dan Keselamatan	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	Dinas Perhubungan	
				Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.2.5.8	Perbup tentang tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam daerah	Tersedianya Perbup tentang tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam daerah	Keppmendagri 050-5889 tahun 2021	Jumlah Tarif Perbup tentang tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam daerah	Dokumen	Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Kabid Pengembangan dan Keselamatan	Perbup tentang tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam daerah	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	Dinas Perhubungan	
				Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.2.5.8.1	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Keppmendagri 050-5889 tahun 2021	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota tahun n	Dokumen	Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Kabid Pengembangan dan Keselamatan	Dokumen Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	Dinas Perhubungan	
				Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.2.5.8.2	Jumlah Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Keppmendagri 050-5889 tahun 2021	Jumlah Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota tahun n	Dokumen	Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Kabid Pengembangan dan Keselamatan	Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	Dinas Perhubungan	
				Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota	1.2.5.8.3	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota	Terkendalinya dan Terawasinya Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota	Keppmendagri 050-5889 tahun 2021	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota tahun n	Laporan	Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Kabid Pengembangan dan Keselamatan	Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	Dinas Perhubungan	
				Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	1.2.5.9	Jumlah Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Tersedianya Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Perbup nomor 24 tahun 2022	Jumlah Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal yang ditetapkan tahun n	Dokumen	Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Kabid Pengembangan dan Keselamatan	Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	Dinas Perhubungan	

Tujuan PD	Sasaran PD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kode	IK Tujuan (4), Sasaran (5a), Program (5b), Kegiatan (5c) & Sub Kegiatan (5cxa)	Sasaran Kinerja	NSPK Indikator	Formulasi	Satuan	Sumber/Penyedia Data	Pelaksana/Penanggung Jawab	Objek Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi						
															2021		2022		2023		2024		2025		target	Rp			target	Rp	target	Rp	target	Rp
															target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp										
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)								(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)						
				Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Perubahan Pengumpulan Lokal	1.2.5.9.1	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Perubahan Pengumpulan Lokal	Tersusunnya Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Perubahan Pengumpulan Lokal	Kepmendagri 050-5889 tahun 2021	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Perubahan Pengumpulan Lokal tahun n	Dokumen	Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Kabid Pengembangan dan Keselamatan	Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Perubahan Pengumpulan Lokal	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	Dinas Perhubungan					
				Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Perubahan Pengumpulan Lokal	1.2.5.9.2	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Perubahan Pengumpulan Lokal	Ditetapkan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Perubahan Pengumpulan Lokal	Kepmendagri 050-5889 tahun 2021	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Perubahan Pengumpulan Lokal tahun n	Dokumen	Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Kabid Pengembangan dan Keselamatan	Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Perubahan Pengumpulan Lokal	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	Dinas Perhubungan					
				Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Perubahan Pengumpulan Lokal	1.2.5.9.3	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Terkendalinya Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Perubahan Pengumpulan Lokal	Kepmendagri 050-5889 tahun 2021	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau tahun n	Laporan	Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Kabid Pengembangan dan Keselamatan	Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	Dinas Perhubungan					
				Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	1.2.5.10	Jumlah Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Tersedianya Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Perbup nomor 24 tahun 2022	Jumlah Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau yang ditetapkan tahun n	Dokumen	Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Kabid Pengembangan dan Keselamatan	Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	Dinas Perhubungan					
				Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	1.2.5.10.1	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Perubahan Sungai dan Danau	Tersusunnya rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Kepmendagri 050-5889 tahun 2021	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Perubahan Sungai dan Danau tahun n	Dokumen	Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Kabid Pengembangan dan Keselamatan	Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Perubahan Sungai dan Danau	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	Dinas Perhubungan					
				Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	1.2.5.10.2	Jumlah Dokumen penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Perubahan Sungai dan Danau	Ditetapkan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Kepmendagri 050-5889 tahun 2021	Jumlah Dokumen penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Perubahan Sungai dan Danau tahun n	Dokumen	Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Kabid Pengembangan dan Keselamatan	Dokumen penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Perubahan Sungai dan Danau	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	Dinas Perhubungan					

Tujuan PD	Sasaran n PD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kode	IK Tujuan (K1, Sasaran (K0), Program (K00), Kegiatan (K000) & Sub Kegiatan (K0000))	Sasaran Kinerja	NSPK Indikator	Formulasi	Satuan	Sumber/Penyedia Data	Pelaksana/Penanggung Jawab	Objek Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi						
															2021		2022		2023		2024		2025		target	Rp			target	Rp	target	Rp	target	Rp
															target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp										
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)								(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)						
				Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	1.2.5.10.3	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau	terlaksananya Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Kepmendagri 050-5889 tahun 2021	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau tahun n	Laporan	Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Kabid Pengembangan dan Keselamatan	Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	Dinas Perhubungan					
				Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	1.2.5.11	Jumlah Pembangunan dan Rekomendasi Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Terlaksananya Pembangunan dan Rekomendasi Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Perbup nomor 24 tahun 2022	Jumlah Pembangunan dan Rekomendasi Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau ditetapkan tahun n	Dokumen	Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Kabid Pengembangan dan Keselamatan	Pembangunan dan Rekomendasi Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	Dinas Perhubungan					
				fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang	1.2.5.11.1	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dilaksanakan	Terfaalitasnya Pemenuhan Persyaratan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Kepmendagri 050-5889 tahun 2021	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dilaksanakan tahun n	Dokumen	Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Kabid Pengembangan dan Keselamatan	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	Dinas Perhubungan					
				Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	1.2.5.11.2	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun	Terbangunnya Pelabuhan Sungai dan Danau	Kepmendagri 050-5889 tahun 2021	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun tahun n	Unit	Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Kabid Pengembangan dan Keselamatan	Pelabuhan Sungai dan Danau	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	Dinas Perhubungan					
				Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	1.2.5.11.3	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	Teroperasinya dan Terpeliharanya Pelabuhan Sungai dan Danau	Kepmendagri 050-5889 tahun 2021	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara tahun n	Unit	Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Kabid Pengembangan dan Keselamatan	Pelabuhan Sungai dan Danau	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	Dinas Perhubungan					
				Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	1.2.5.11.4	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Terawasinya Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Kepmendagri 050-5889 tahun 2021	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau tahun n	Laporan	Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Kabid Pengembangan dan Keselamatan	Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	Dinas Perhubungan					
				Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Sungai dan Danau	1.2.5.11.5	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Tersedia	Terpenuhinya Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai dan Danau	Kepmendagri 050-5889 tahun 2021	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Tersedia tahun n	Unit	Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Kabid Pengembangan dan Keselamatan	Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai dan Danau	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	Dinas Perhubungan					
				Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	1.2.5.11.6	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan	Terlaksananya Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	Kepmendagri 050-5889 tahun 2021	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang Dibangun tahun n	Unit	Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Kabid Pengembangan dan Keselamatan	Dermaga Sungai dan Danau	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	Dinas Perhubungan					
				Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	1.2.5.11.7	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	Kepmendagri 050-5889 tahun 2021	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara tahun n	Unit	Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Kabid Pengembangan dan Keselamatan	Dermaga Sungai dan Danau	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	Dinas Perhubungan					
				Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpuan Lokal	1.2.5.12	Jumlah rekomendasi Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpuan Lokal	Tersedianya Rekomendasi Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpuan Lokal	Perbup nomor 24 tahun 2022	Jumlah rekomendasi Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpuan Lokal yang diterbitkan	Rekom	Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Kabid Pengembangan dan Keselamatan	Rekomendasi Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpuan Lokal	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	Dinas Perhubungan					
				fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpuan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1.2.5.12.1	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpuan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terfaalitasnya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpuan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kepmendagri 050-5889 tahun 2021	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpuan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik tahun n	Dokumen	Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Kabid Pengembangan dan Keselamatan	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpuan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	Dinas Perhubungan					

Tujuan PD	Sasaran PD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kode	IK Tujuan (K1, Sasaran (K0), Program (K00), Kegiatan (K000) & Sub Kegiatan (K0000))	Sasaran Kinerja	NSPK Indikator	Formulasi	Satuan	Sumber/Penyedia Data	Pelaksana/Penanggung Jawab	Objek Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi						
															2021		2022		2023		2024		2025		target	Rp			target	Rp	target	Rp	target	Rp
															target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)															
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabahan di Pelabuhan Pengumpungan Lokal	1.2.5.12.2	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabahan di Pelabuhan Pengumpungan Lokal yang Dilaksanakan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabahan di Pelabuhan Pengumpungan Lokal	Kepmendagri 050-5889 tahun 2021	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabahan di Pelabuhan Pengumpungan Lokal tahun n	Laporan	Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Kabid Pengembangan dan Keselamatan	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabahan di Pelabuhan Pengumpungan Lokal	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	Dinas Perhubungan					
				Penerbitan Izin Pengembangan Pelabahan untuk Pelabuhan Pengumpungan Lokal	1.2.5.13	Jumlah rekomendasi Penerbitan Izin Pengembangan Pelabahan untuk Pelabuhan Pengumpungan Lokal	Tersedianya rekomendasi Penerbitan Izin Pengembangan Pelabahan untuk Pelabuhan Pengumpungan Lokal	Perbup nomor 24 tahun 2022	Jumlah rekomendasi Penerbitan Izin Pengembangan Pelabahan untuk Pelabuhan Pengumpungan Lokal yang diterbitkan	Rekom	Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Kabid Pengembangan dan Keselamatan	Rekomendasi Penerbitan Izin Pengembangan Pelabahan untuk Pelabuhan Pengumpungan Lokal	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	Dinas Perhubungan					
				Facilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabahan untuk Pelabuhan Pengumpungan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1.2.5.13.1	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabahan untuk Pelabuhan Pengumpungan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Dilaksanakan	Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabahan untuk Pelabuhan Pengumpungan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kepmendagri 050-5889 tahun 2021	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabahan untuk Pelabuhan Pengumpungan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Dilaksanakan tahun n	Dokumen	Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Kabid Pengembangan dan Keselamatan	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabahan untuk Pelabuhan Pengumpungan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	Dinas Perhubungan					
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabahan untuk Pelabuhan Pengumpungan Lokal	1.2.5.13.2	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabahan Untuk Pelabuhan Pengumpungan Lokal	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabahan untuk Pelabuhan Pengumpungan Lokal	Kepmendagri 050-5889 tahun 2021	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabahan Untuk Pelabuhan Pengumpungan Lokal tahun n	Laporan	Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Kabid Pengembangan dan Keselamatan	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabahan Untuk Pelabuhan Pengumpungan Lokal	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	Dinas Perhubungan					
				Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpungan lokal	1.2.5.13.3	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan pengumpungan Lokal yang Tersedia	Terperuhnya Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpungan Lokal	Kepmendagri 050-5889 tahun 2021	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpungan Lokal yang Tersedia tahun n	Unit	Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Kabid Pengembangan dan Keselamatan	Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpungan Lokal	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	Dinas Perhubungan					
				Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabahan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpungan Lokal	1.2.5.14	Jumlah rekomendasi Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabahan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpungan Lokal	Tersedianya rekomendasi Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabahan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpungan Lokal	Perbup nomor 24 tahun 2022	Jumlah rekomendasi Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabahan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpungan Lokal tahun n	Rekom	Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Kabid Pengembangan dan Keselamatan	Rekomendasi Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabahan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpungan Lokal	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	Dinas Perhubungan					
				Facilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengoperasian Pelabahan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpungan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1.2.5.14.1	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengoperasian Pelabahan Selama 24 Jam Untuk Pelabuhan Pengumpungan Lokal Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Dilaksanakan	Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengoperasian Pelabahan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpungan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kepmendagri 050-5889 tahun 2021	Facilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengoperasian Pelabahan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpungan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik tahun n	Dokumen	Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Kabid Pengembangan dan Keselamatan	Persyaratan Perolehan Izin Pengoperasian Pelabahan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpungan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	Dinas Perhubungan					

Tujuan PD	Sasaran PD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kode	IK Tujuan (K), Sasaran (K), Program (K), Kegiatan (K) & Sub Kegiatan (K)	Sasaran Kinerja	NSPK Indikator	Formulasi	Satuan	Sumber/Penyedia Data	Pelaksana/Penanggung Jawab	Objek Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi				
															2022		2023		2024		2025		target	Rp	target	Rp			target	Rp	target	Rp
															target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)													
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	1.2.5.14.1	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi yang Dilakukan dalam rangka Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kepmendagri 050-5889 tahun 2021	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi yang Dilakukan dalam rangka Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal tahun n	Laporan	Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Kabid Pengembangan dan Keselamatan	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi yang Dilakukan dalam rangka Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	Dinas Perhubungan					
				Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	1.2.5.15	Jumlah rekomendasi Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Tersedianya rekomendasi Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Perbup nomor 24 tahun 2022	Jumlah rekomendasi Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal tahun n	Rekom	Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Kabid Pengembangan dan Keselamatan	Rekomendasi Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	Dinas Perhubungan					
				Facilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1.2.5.15.1	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kepmendagri 050-5889 tahun 2021	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik tahun n	Dokumen	Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Kabid Pengembangan dan Keselamatan	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	Dinas Perhubungan					
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	1.2.5.15.2	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dilakukan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kepmendagri 050-5889 tahun 2021	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dilakukan tahun n	Laporan	Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Kabid Pengembangan dan Keselamatan	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	Dinas Perhubungan					
				Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	1.2.5.16	Jumlah rekomendasi Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	tersedianya rekomendasi Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Perbup nomor 24 tahun 2022	Jumlah rekomendasi Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal tahun n	Rekom	Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Kabid Pengembangan dan Keselamatan	Rekomendasi Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	Dinas Perhubungan					
				Facilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1.2.5.16.1	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kepmendagri 050-5889 tahun 2021	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik tahun n	Dokumen	Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Kabid Pengembangan dan Keselamatan	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	Dinas Perhubungan					

Tujuan PD	Sasaran PD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kode	IK Tujuan (K), Sasaran (KOL), Program (KOP), Kegiatan (KOPK) & Sub Kegiatan (KOPK)	Sasaran Kinerja	NSPK Indikator	Formulasi	Satuan	Sumber/Penyedia Data	Pelaksana/Penanggung Jawab	Objek Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi				
															2022		2023		2024		2025		target	Rp	target	Rp			target	Rp	target	Rp
															target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp										
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)								(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)				
					1.2.5.16.2	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kepmendagri 050-5889 tahun 2021	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal tahun n	Laporan	Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Kabid Pengembangan dan Keselamatan	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	Dinas Perhubungan			
					1.2.5.17	Jumlah rekomendasi Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	Tersedianya rekomendasi Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	Perbup nomor 24 tahun 2022	Jumlah rekomendasi Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal tahun n	Rekom	Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Kabid Pengembangan dan Keselamatan	Rekomendasi Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	Dinas Perhubungan			
					1.2.5.17.1	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kepmendagri 050-5889 tahun 2021	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik tahun n	Dokumen	Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Kabid Pengembangan dan Keselamatan	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	Dinas Perhubungan			
					1.2.5.17.2	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kepmendagri 050-5889 tahun 2021	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal tahun n	Laporan	Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Kabid Pengembangan dan Keselamatan	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	Dinas Perhubungan			
		(3) PROGRAM PELAYARAN			1.2.6	Persentase Capaian Kinerja Pengelolaan Prasarana Pelayaran	Terseleenggaranya Pengelolaan Prasarana pelayaran	Perbup nomor 24 tahun 2022	Jumlah capaian kinerja kegiatan dibagi jml target kinerja kegiatan x100	%	Bidang Prasarana	Kabid Prasarana	Laporan Pelaksanaan Kegiatan	100	100	-	100	3,542,834,514	100	-	100	4,275,293,243	100	4,489,057,905	100	4,489,057,905	100	4,489,057,905	Dinas Perhubungan			
					1.2.6.1	Jumlah Pembangunan serta rekomendasi Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Terlaksananya Pembangunan serta tersedianya Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Perbup nomor 24 tahun 2022	Jumlah Pembangunan serta rekomendasi Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal yang ditetapkan tahun n	Dokumen	Bidang Prasarana	Kabid Prasarana	Pembangunan serta rekomendasi Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	N/A	N/A	-	1	3,542,834,514	1	-	1	4,275,293,243	1	4,489,057,905	1	4,489,057,905	1	4,489,057,905	Dinas Perhubungan			

Tujuan PD	Sasaran PD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kode	IK Tujuan (L Sasaran (Ind), Program (Ind), Kegiatan (Ind) & Sub Kegiatan (Ind))	Sasaran Kinerja	NSPK Indikator	Formulasi	Satuan	Sumber/Penyedia Data	Pelaksana/Penanggung Jawab	Objek Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
															2021		2022		2023		2024		2025		Membra PD					
															target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
															(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			(18)	
				Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	1.2.6.1.1	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kepmendagri 050-5889 tahun 2021	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal tahun n	Dokumen	Bidang Prasarana	Kabid Prasarana	Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	Dinas Perhubungan	
				Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	1.2.6.1.2	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	Terbangunnya Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kepmendagri 050-5889 tahun 2021	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun tahun n	Unit	Bidang Prasarana	Kabid Prasarana	Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	Dinas Perhubungan	
				Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	1.2.6.1.3	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	Teroperasinya dan Terpeliharanya Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kepmendagri 050-5889 tahun 2021	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara tahun n	Unit	Bidang Prasarana	Kabid Prasarana	Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	N/A	N/A	-	1	3,542,834,514	N/A	-	1	4,275,293,243	1	4,489,057,905	1	4,489,057,905	1	4,489,057,905	Dinas Perhubungan	
				Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	1.2.6.1.4	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Terawasinya Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kepmendagri 050-5889 tahun 2021	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal tahun n	Laporan	Bidang Prasarana	Kabid Prasarana	Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	Dinas Perhubungan	
				Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal	1.2.6.1.5	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Tersedia	Terperuhnya Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan lokal	Kepmendagri 050-5889 tahun 2021	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Tersedia tahun n	Unit	Bidang Prasarana	Kabid Prasarana	Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Lokal	N/A	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	Dinas Perhubungan	

6.2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa terdiri dari Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha. Retribusi Jasa Umum terdiri dari Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. Sedangkan Retribusi Jasa Usaha terdiri dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Terminal, Retribusi tempat Khusus Parkir dan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan. Untuk tahun 2021 target PAD pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa lebih rendah dibandingkan target PAD tahun 2022 hal ini disebabkan karena adanya perubahan kebijakan dimana pengujian kendaraan bermotor hanya boleh dilaksanakan oleh unit pengujian terakreditasi dengan mengaplikasikan smart card (pengujian secara elektronik). Terhitung Mulai Tanggal 1 Desember 2021 sesuai Surat Akreditasi yang diterbitkan oleh Dirjen Perhubungan Darat, pengujian kendaraan baru dapat dilakukan di Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa sehingga target tahun 2022 meningkat. Adapun rencana Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa periode tahun 2021 – 2026 disajikan pada tabel sebagai berikut :

Rencana Pendapatan Asli Daerah (PAD)					
Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026					
Uraian	Rencana Pendapatan pada Tahun ke-				
	Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5
1	2	3	4	5	6
PENDPATAN	535,800,000.00	676,530,800.00	1,305,500,000.00	1,322,471,500.00	1,339,663,629.50
PENDAPATAN ASLI DAERAH	535,800,000.00	676,530,800.00	1,305,500,000.00	1,322,471,500.00	1,339,663,629.50
Hasil Retribusi Daerah	375,000,000.00	554,177,840.00	700,000,000.00	709,100,000.00	718,318,300.00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	225,000,000.00	240,924,000.00	250,000,000.00	253,250,000.00	256,542,250.00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	150,000,000.00	313,253,840.00	450,000,000.00	455,850,000.00	461,776,050.00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1,200,000.00	150,000.00	600,000.00	607,800.00	615,701.40
-MCK Terminal Empang	1,200,000.00	150,000.00	600,000.00	607,800.00	615,701.40
Retribusi Terminal	17,100,000.00	6,129,000.00	9,000,000.00	9,117,000.00	9,235,521.00
-Empang	11,520,000.00	6,129,000.00	9,000,000.00	9,117,000.00	9,235,521.00
-Brang Bara	5,580,000.00	-	-	-	-
Retribusi Tempat Khusus Parkir	120,000,000.00	110,050,000.00	592,400,000.00	600,101,200.00	607,902,515.60
-Pasar Brang Bara	-	4,400,000.00	4,800,000.00	4,862,400.00	4,925,611.20
-Pasar Brang Biji	-	7,000,000.00	8,400,000.00	8,509,200.00	8,619,819.60
-Pasar Empang	-	42,000,000.00	36,000,000.00	36,468,000.00	36,942,084.00
-Pasar Labuhan	-	6,000,000.00	7,200,000.00	7,293,600.00	7,388,416.80
-Pasar Langam	-	11,000,000.00	19,200,000.00	19,449,600.00	19,702,444.80
-Pasar Plampang	-	18,400,000.00	16,800,000.00	17,018,400.00	17,239,639.20
-Pasar Seketeng	-	21,250,000.00	500,000,000.00	506,500,000.00	513,084,500.00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	22,500,000.00	5,631,960.00	3,500,000.00	3,545,500.00	3,591,591.50
-Labuhan Badas	20,000,000.00	2,379,960.00	-	-	-
-Labuhan Alas	-	-	-	-	-
-Muara Kali	2,500,000.00	3,252,000.00	3,500,000.00	3,545,500.00	3,591,591.50

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERHUBUNGAN

Sesuai ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, diketahui bahwa capaian suatu program, kegiatan dan sub kegiatan menjadi sebuah kinerja dalam bentuk suatu keluaran/hasil/dampak yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya pembangunan (*input*). Untuk itu diperlukan suatu Indikator Kinerja yang akan berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja penyelenggaraan bidang urusan melalui suatu sub kegiatan, kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk sub keluaran (*sub output*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*) yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa.

Indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa pada lima tahun mendatang merupakan bentuk komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel T-C.28.

Tabel T-C.28
Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Sumbawa
(Yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Sumbawa 2021-2026)

No.	Indikator Tujuan PD (x), Indikator Sasaran PD (xx), Indikator Program (xxx)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	Nilai Reformasi Birokrasi	51.32	51.91	52.50	52.50	55.00	57.50	57.50
1.1	Peningkatan Kategori Predikat Hasil evaluasi AKIP Dinas Perhubungan	B	BB	BB	BB	BB	A	A
1.1.1	Peningkatan Nilai AKIP Dinas Perhubungan	70.00	70.12	72.00	74.00	76.00	80.01	80.01
2	Peningkatan Infrastruktur dalam Kondisi Baik	86%	86%	86.50%	87%	87.50%	88%	88%
2.1	Rasio Konektivitas kabupaten	84.90	85.15	85.40	85.65	85.90	86.15	86.15
2.1.1	Persentase capaian Kinerja Penyelenggaraan pengelolaan sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.1.2	Persentase capaian Kinerja Penyelenggaraan manajemen Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.1.3	Persentase capaian Kinerja Penyelenggaraan pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.1.4	Persentase capaian Kinerja Penyelenggaraan pengelolaan sarana dan prasarana pelayaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.1.5	Persentase capaian Kinerja Penyelenggaraan manajemen pengelolaan pelayaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.1.6	Persentase capaian Kinerja Penyelenggaraan pengembangan dan keselamatan pelayaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa 2021-2026 disusun sesuai amanat perundang-undangan dan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa kaidah-kaidah sebagai berikut:

- a. Bahwa implementasi pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, serta program dan kegiatan/sub kegiatan yang dirumuskan, diarahkan dan dikendalikan sepenuhnya oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa, serta dilaksanakan oleh seluruh ASN di Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya masing-masing;
- b. Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa menjadi pedoman dalam penyusunan Renja dan RKA Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa setiap tahunnya sesuai periode Renstra, dengan mengacu kepada RKPD Kabupaten Sumbawa;
- c. Pengendalian dan Evaluasi Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa 2021-2026 dilakukan dengan tertib dan obyektif serta disampaikan dalam bentuk laporan tertulis secara periodik dari seluruh aparatur sipil negara di Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa kepada Bupati Sumbawa melalui Kepala Dinas yang terintegrasi dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa. Optimalisasi penyelenggaraan tugas dan fungsi melalui pelaksanaan semua program, kegiatan hingga sub kegiatan diharapkan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan dalam lima tahun ke depan, dan diharapkan terbangun tata kelola anggaran yang akuntabel, sehingga dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang optimal serta terselenggaranya pelayanan publik yang lebih baik, lebih cepat dan akurat.

BUPATI SUMBAWA,



MAHMUD ABDULLAH